



**PERMASALAHAN UNI EROPA DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN KERJASAMA PERTAHANAN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Pertahanan  
Universitas Pertahanan Indonesia**

**Oleh**

**HERMAN**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 120090101023**

**Program Studi Strategi Perang Semesta  
Sekolah Strategi Perang Semesta  
Universitas Pertahanan Indonesia**

**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**2010**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERMASALAHAN UNI EROPA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN**  
**KERJASAMA PERTAHANAN**

**Oleh**

**HERMAN**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelah Magister Pertahanan pada program studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia**

**Ditetapkan di Jakarta, Agustus 2010**

**DISAHKAN OLEH**

1. **Prof. Sri Hartati R-Suradijono, MA, Ph.D,.....:Pembimbing I**
  
2. **Dr. Yohanes Sulaiman, .....: Pembimbing II**
  
3. **Prof. Dr. Dadang Gunawan .....: Penguji I**
  
4. **Marsma TNI Dr. U. H. Harahap, M. Si .....: Penguji II**
  
5. **Kol Czi Witjaksono, M.Sc .....: Penguji III**

**Jakarta, Agustus 2010**

**Mengetahui**  
**Komandan Sekolah Strategi Perang Semesta**

**Sonny ES Prasetyo, MA**  
**Brigadir Jendral TNI**



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
(Hasil Karya Perorangan)**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman  
NPM : 120090101023  
Program Studi : Strategi Perang Semesta  
Jenis karya : Thesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-exclusiveRoyalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
Permasalahan Uni Eropa dalam Mengimplementasikan Kerjasama Pertahanan

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta.  
Pada tanggal, Agustus 2010  
Yang menyatakan

Herman

**ABSTRACT**

Name : Herman  
Study Programme : The Total War Strategy Study  
Titile : The Problems of the European Union in implementating  
Defense Cooperation

This thesis discusses about the problems of the European Union (EU) in implementating defence cooperation within the Common Foreign and Security Policy (CFSP), which was established in 1993, in solving the Yugoslavian war, specially Bosnian war in 1995. Whereas US had pleased EU to solve that war, with reason that Yugoslavia was part of the Europe. Research result showed that there are two factors caused those problems, namely, there was a strong influence of US on EU and the individual interests of member states is stronger than common interests within the EU. Research result recomendate to conduct some research that related to the CFSP.

**ABSTRAK**

Nama : Herman

Program Studi : Sekolah Strategi Perang Semesta

Judul : Permasalahan Uni Eropa dalam Mengimplementasikan Kerjasama Pertahanan

Thesis ini membahas mengenai permasalahan Uni Eropa dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanan dalam *the Common Foreign and Security Policy* (CFSP) yang mereka bentuk pada tahun 1993, dalam menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995. Padahal, AS sudah memberikan kesempatan kepada Uni Eropa melalui CFSP-nya untuk berperan sepenuhnya, dengan alasan bahwa Yugoslavia merupakan bagian dari Eropa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu masih kuatnya pengaruh AS terhadap Uni Eropa dan lebih kuatnya kepentingan individu negara anggota dari pada kepentingan bersama dalam Uni Eropa. Hasil penelitian merekomendasikan untuk dilaksanakan penelitian lanjutan terkait kerjasama pertahanan Uni Eropa dalam CFSP.

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Herman  
NPM : 120090101023  
Tanda Tangan :  
Tanggal : Agustus 2010

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SINGKATAN.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian.....	7
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Teori Federalism.....	8
2.2 Penelitian yang sudah dilakukan.....	9
<b>3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Rencana.....	24
3.2 Pelaksanaan.....	24
<b>4. PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
4.1 Data Penelitian .....	26
4.2 Pembahasan ... ..	34
4.2.1 Kuatnya Pengaruh AS, melalui NATO, terhadap Uni Eropa...34	
4.2.2 Kuatnya Kepentingan Nasional masing-masing Negara Anggota Uni Eropa.....50	
<b>5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Rekomendasi .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Daftar negara-negara anggota Uni Eropa, NATO dan WEU	
Lampiran 2 : Peta Eropa	

**SINGKATAN-SINGKATAN**

<b>AS</b>	<b>Amerika Serikat</b>
<b>CEEC</b>	<b>Committee for European Economic Co-operation</b>
<b>CCP</b>	<b>Common Commercial Policy</b>
<b>CFSP</b>	<b>Common Foreign and Security Policy</b>
<b>DCI</b>	<b>Defense Capabilities Initiative</b>
<b>DK PBB</b>	<b>Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa</b>
<b>EC</b>	<b>European Committee</b>
<b>ECSC</b>	<b>European Coal and Steel Community State</b>
<b>EDC</b>	<b>European Defense Community</b>
<b>EEC</b>	<b>European Economic Community</b>
<b>EPC</b>	<b>European Political Cooperation</b>
<b>EU</b>	<b>European Union</b>
<b>GDP</b>	<b>Gross Domestic Product</b>
<b>GNP</b>	<b>Gross National Product</b>
<b>IFOR</b>	<b>Implementation Force</b>
<b>JHA</b>	<b>Justice and Home Affairs</b>
<b>NATO</b>	<b>North Atlantic Treaty Organization</b>
<b>PBB</b>	<b>Perserikatan Bangsa-Bangsa</b>
<b>QMV</b>	<b>Qualified Majority Voting</b>
<b>TEU</b>	<b>Treaty on European Union</b>
<b>UK</b>	<b>United Kingdom</b>
<b>UN</b>	<b>United Nations</b>
<b>US</b>	<b>United States</b>
<b>WEU</b>	<b>Western European Union</b>
<b>WUDO</b>	<b>Western Union Defense Organization</b>

# **PERMASALAHAN UNI EROPA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KERJASAMA PERTAHANAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kehadiran the North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Eropa selama ini yang memainkan peran utama sebagai penjaga keamanan Eropa, khususnya keamanan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, telah menciptakan kondisi aman bagi seluruh kawasan Eropa. Keterlibatan NATO, yang dibentuk oleh Amerika Serikat (AS) bersama dengan Belgia, Kanada, Prancis, Iceland, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Denmark, Portugal, dan Inggris pada tanggal 4 April 1949 (Alasdair Blair; 2006; 243), di Eropa memang bertujuan untuk menjaga keamanan negara-negara Eropa Barat, pasca perang dunia ke II, dari serangan militer Uni Sovyet (Glyn Morgan; 2005; 150), yang saat itu sangat ditakuti oleh negara-negara Eropa Barat.

Keputusan negara-negara Eropa untuk terlibat dalam NATO bersama AS tersebut didasari oleh suatu alasan kuat dalam rangka untuk menghadapi blok komunis Eropa Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet. Dengan kehadiran NATO, sebagai sebuah aliansi militer, telah menjadikan negara-negara Eropa Barat, yang non-komunis, memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi dan menghadapi ancaman dari negara-negara Eropa Timur, yang komunis, di bawah pimpinan Uni Sovyet (John W. Young & John Kent; 2004; 126-127 dan Glyn Morgan; 2005; 150). Disisi lain, merupakan sebuah kenyataan bahwa perang dunia ke II telah membawa kehancuran perekonomian negara-negara Eropa Barat (William O. Chittick; 2006;127), dan menyebabkan negara-negara Eropa Barat tidak memiliki kemampuan untuk membangun kekuatannya militer. Kondisi negara-negara Eropa Barat yang demikian tidak memungkinkan bagi mereka untuk mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri dari kemungkinan terjadinya perang antar sesama negara-negara Eropa Barat, seperti yang terjadi pada perang dunia ke II antara Jerman dengan Prancis dan Inggris, maupun oleh ancaman militer dari blok komunis yang dipimpin Uni Sovyet. Oleh sebab itu, negara-negara Eropa Barat pada pasca perang dunia ke

II, memang sangat membutuhkan dan menggantungkan keamanannya kepada AS, melalui NATO.

Dari sudut pandang kepentingan AS, kehadiran NATO, dimana oleh banyak pendapat mengatakan NATO merupakan “instrument of American domination” (Mark Trachtenberg dalam David M. Andrews; 2005; 230) ataupun keberadaan AS sebagai pemimpin NATO (Zoltan Barany; 2003; 14), di Eropa dapat dikatakan sebagai keberhasilan strategi kebijakan politik luar negeri AS, melalui NATO, sebagai bagian dari global strateginya (John W. Young & John Kent; 2004; 127). Dan hal tersebut semakin jelas apabila melihat bagaimana kebijakan luar negeri AS terhadap Uni Eropa sebelumnya, seperti, antara lain, kebijakan Marshall Plan dan Truman Doctrine, sebagai ekonomi, yang dikenal sebagai “the European Recovery Programme”, dan bantuan militer AS kepada negara-negara Eropa Barat, terutama kepada Yunani dan Turki yang sedang berjuang melawan komunis (William O. Chittick; 2006; 127). Kemudian kedua kebijakan tersebut juga sering diidentifikasi sebagai awal dari perang dingin dan “the longer-term global presence of the US” (William O. Chittick; 2006; 127 dan Alasdair Blair; 2006; 231, 294).

Kebijakan yang dilakukan oleh AS tersebut telah memberikan serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi negara-negara Eropa Barat (Uni Eropa saat ini), dan terbukti selama periode pasca perang dunia ke II, khususnya saat AS melalui NATO hadir di Eropa, sampai dengan era perang dingin berakhir tahun 1991, wilayah Eropa secara keseluruhan aman dan bebas dari konflik militer. Walaupun, hal tersebut memang sudah sesuai dengan alasan dibentuknya NATO, sebagai sebuah aliansi militer, yang didesain untuk menjaga keamanan Eropa terhadap ancaman serangan dari Uni Sovyet (John W. Young & John Kent; 2004; 126-127 dan Glyn Morgan; 2005; 150). Namun dalam perkembangannya, kehadiran AS, melalui NATO, untuk menjaga keamanan Eropa Barat, dimana kemudian berhasil memberikan dan menciptakan rasa aman dan nyaman di kawasan tersebut, telah membuat negara-negara Eropa Barat terus menggantungkan pengelolaan keamanannya kepada AS, melalui NATO. Keinginan Eropa Barat untuk mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri sebenarnya sudah pernah muncul dalam benak beberapa negara anggota, seperti, antara lain, yang ditunjukkan oleh Prancis bersama dengan lima negara Eropa Barat lainnya pada tahun 1950an, walaupun kemudian menemui kegagalan (William O. Chittick; 2006; 133). Namun, munculnya

kegagalan tersebut mungkin masih bisa dimengerti oleh logika bila melihat kondisi internal Eropa Barat yang masih terkotak-kotak oleh masalah dan kepentingannya masing-masing.

Berakhirnya perang dingin pada tahun 1989, yang ditandai oleh serentetan kejadian: penggantian pemerintahan komunis di Czechoslovakia dan Hungaria; runtuhnya tembok Berlin pada tanggal 9 Nopember 1989; pernyataan kemerdekaan Estonia dan Lithuania dan lepas dari Uni Sovyet; dan akhirnya pada tanggal 25 Desember 1991 Uni Sovyet bubar (William O. Chittick, 2006, 154), berarti peran AS, melalui NATO, sebagai penjaga keamanan Uni Eropa tidak diperlukan lagi, karena ancaman Uni Sovyet sudah tidak ada lagi. Namun, kenyataannya, AS, melalui NATO, masih terus hadir sebagai penjaga keamanan Uni Eropa, dan hal ini dapat diartikan bahwa Uni Eropa masih menyerahkan penjagaan keamanannya untuk dilaksanakan oleh AS, melalui NATO.

Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara anggota Uni Eropa akhirnya sepakat untuk membentuk institusi kerjasama pertahanan bersama sendiri, yaitu the Common Foreign and Security Policy (CFSP) pada tahun 1993 (Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd; 2003; 1-2). Pembentukan institusi kerjasama pertahanan bersama tersebut dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan harapan negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya bagi negara-negara yang memang sudah lama menginginkan, agar Uni Eropa mampu mandiri dalam mengelola keamanannya sendiri. Disisi lain, dapat juga merupakan sebuah tanda bagi AS dan NATO untuk segera melepaskan perannya sebagai penjaga keamanan Uni Eropa dan keluar dari kawasan Eropa. Namun, yang terpenting dari terbentuknya CFSP tersebut adalah telah munculnya percaya diri Uni Eropa serta adanya keinginan untuk memperlihatkan kepada AS dan NATO bahwa negara-negara anggota Uni Eropa memiliki tingkat saling percaya satu sama lain yang tinggi untuk bersatu dalam sebuah kerjasama pertahanan melalui CFSP, dan menunjukkan bahwa Uni Eropa sudah siap untuk menjaga keamanannya sendiri.

Dalam perkembangannya, ternyata harapan negara-negara anggota Uni Eropa untuk bisa mengelola keamanannya sendiri belum bisa terwujudkan, karena, disatu sisi adanya perbedaan pandangan dan kepentingan internal negara-negara anggota Uni Eropa, dimana kondisi tersebut kemudian menimbulkan konflik internal dan membawa negara-negara anggota Uni Eropa terbagi kedalam kelompok Europeanists yang pro Eropa dan kelompok Atlanticists yang pro AS (Desmond Dinan; 2005;587),

terkait dengan apakah Uni Eropa perlu mandiri dalam menjaga keamanannya ataukah tetap menggantungkan pengelolaan keamanannya kepada AS melalui NATO. Disisi lain, merupakan suatu kenyataan, bahwa pasca perang dingin kebijakan luar negeri AS terhadap Eropa ternyata tidak berubah, karena kenyataannya, AS, melalui NATO, tetap hadir di wilayah Uni Eropa dan belum adanya tanda-tanda yang menunjukkan adanya keinginan AS untuk melepaskan perannya sebagai penjaga keamanan Uni Eropa, sekalipun ancaman dari Uni Sovyet sudah tidak ada. Keadaan tersebut di atas diperberat dengan adanya kebijakan luar negeri AS untuk melaksanakan ekspansi, melalui NATO, ke negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah (Zoltan Barany; 2003; 4).

Kenyataan akan masih adanya masalah internal Uni Eropa yang kemudian memunculkan perbedaan pandangan internal terkait dengan apakah keamanan Uni Eropa perlu mereka kelola sendiri ataukah peran tersebut tetap dilakukan oleh AS, melalui NATO, serta belum adanya indikasi bahwa AS, melalui NATO, akan meninggalkan Eropa, telah menimbulkan kesulitan bagi Uni Eropa dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanan yang telah mereka buat dalam CFSP. ***Dan kesulitan Uni Eropa dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanannya dalam CFSP merupakan masalah yang akan diteliti dalam studi ini.*** Dengan alasan, bahwa seharusnya Uni Eropa sudah mampu untuk mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri karena telah memiliki institusi kerjasama pertahanan sendiri, yaitu CFSP, namun kenyataannya CFSP mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Padahal Uni Sovyet, yang menjadi alasan kehadiran AS, melalui NATO, untuk menjaga keamanan Uni Eropa (sebelumnya bernama Eropa Barat), sudah runtuh pada tahun 1991 dan berarti ancaman militer terhadap Uni Eropa sudah tidak ada. Dan kesulitan tersebut terbukti ketika perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia pada tahun 1995, Uni Eropa gagal untuk menyelesaikannya, padahal Yugoslavia adalah bagian dari Eropa.

Bila memperhatikan masalah-masalah internal Uni Eropa yang menyebabkan munculnya kesulitan dalam mengimplementasikan CFSP, maka ada dua masalah utama yang akan diteliti dalam studi ini, yaitu; ***pertama***, faktor kuatnya pengaruh AS, melalui NATO, terhadap Uni Eropa; ***kedua***, lebih kuatnya kepentingan nasional masing-masing negara anggota dari pada kepentingan bersama dalam Uni Eropa.

Penelitian yang dilakukan terhadap kedua masalah diatas akan menggunakan teori “federalism” (McLean & McMillan; 2003; 195 dalam Simon Sweeny; 2005; 165

dan 166), karena teori diatas relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa faktor-faktor penyebab munculnya masalah pro dan kontra internal Uni Eropa terkait keinginan Uni Eropa untuk mandiri dalam menjaga keamanannya melalui CFSP dan lepas ketergantungannya kepada AS, melalui NATO.

Pandangan Simon Sweeny tentang federalism bahwa beberapa hal yang terdapat dalam federation; Federal states nationalism, Suppresses local identity, Sovereignty absorbed by federal executive, dan Weak state identity (2005;151), memiliki pengaruh kepada kesulitan yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam mengimplementasikan CFSP, yang mereka bentuk pada tahun 1993.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kenyataan bahwa banyak negara anggota Uni Eropa adalah juga merupakan anggota NATO (P. M. Heywood, E. Jones, M. Rhodes & U. Sedelmeier; 2006; 37), dapat dikatakan ikut berperan atas munculnya dua kelompok dalam Uni Eropa, yakni kelompok Atlanticists yang pro NATO dan kelompok Europeanists yang pro Uni Eropa (Desmond Dinan; 2005;587). Bagi negara anggota Uni Eropa yang telah memiliki hubungan yang dekat dengan AS dan merasakan bahwa kehadiran AS, melalui NATO, ternyata dapat memberikan keuntungan bagi tercapainya kepentingan nasionalnya selama ini, seperti Inggris (Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd; 2003, 32, 33 dan David Andrews; 2005; 75-76), akan menganggap bahwa NATO-lah yang paling cocok untuk menjaga keamanan wilayah Uni Eropa. Apalagi, kehadiran NATO selama ini memang telah terbukti dapat menciptakan kondisi aman, karena tidak pernah terjadi konflik militer di Eropa, termasuk ketika ancaman kekuatan Uni Sovyet masih nyata bagi Uni Eropa selama era perang dingin (Glyn Morgan; 2005;89). Atau dapat dikatakan, telah terjadi hubungan yang harmonis dan saling pengertian yang baik dan mendalam antara negara-negara tersebut dengan AS, melalui NATO. Sementara bagi negara anggota Uni Eropa yang memang tidak memiliki hubungan yang baik dengan AS dan menolak ketergantungan Uni Eropa kepada AS, melalui NATO, untuk menjaga keamanan Uni Eropa, akan menganggap bahwa masalah keamanan Uni Eropa akan lebih baik bila dikelola sendiri oleh Uni Eropa (Marc Trachtenberg dalam David Andrews; 2005; 201 dan Desmond Dinan; 2005; 89).

Timbulnya kondisi tersebut diatas dapat dikatakan sebagai suatu hal yang dapat dimengerti oleh setiap negara anggota Uni Eropa mengingat Uni Eropa

bukanlah merupakan suatu negara, melainkan kumpulan banyak negara, dimana tiap negara memiliki dan akan mengutamakan kepentingan nasionalnya masing-masing. Bahkan bisa jadi akan menempatkan kepentingan bersama dalam CFSP hanya sebagai sesuatu yang dapat membantu untuk mencapai tujuan ambisinya (Paul M. Heywood, Erik Jones, Martin Rhodes dan Ulrich Sedelmeier; 2006; 38). Kondisi inilah yang menyebabkan pelaksanaan kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa melalui CFSP sulit direalisasikan.

Dari penjelasan diatas, maka yang menjadi *pertanyaan penelitian adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya kesulitan Uni Eropa dalam mengimplementasikan CFSP*. Adapun batasan penelitian yang akan dilakukan dalam studi ini adalah pada periode pasca runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991 sampai dengan perang Bosnia tahun 1995, dengan fokus penelitian pada kedua masalah yang menyebabkan Uni Eropa mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan CFSP, yaitu; *pertama*, faktor kuatnya pengaruh AS, melalui NATO, terhadap Uni Eropa; *kedua*, faktor lebih kuatnya kepentingan nasional masing-masing negara anggota dari pada kepentingan bersama dalam Uni Eropa.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Terbentuknya European Political Cooperation (EPC) dan kemudian digantikan oleh CFSP merupakan wujud keinginan negara-negara anggota Uni Eropa untuk melepaskan ketergantungannya kepada AS dalam menjaga keamanannya terhadap ancaman Uni Sovyet. Keinginan tersebut semakin kuat setelah runtuhnya Uni Sovyet serta banyak negara Eropa Tengah dan Timur, bekas anggota Pakta Warsawa, yang menjadi anggota Uni Eropa, yang berarti ancaman dari blok Timur yang komunis dibawah pimpinan oleh Uni Sovyet sudah tidak ada lagi. Namun kenyataannya, CFSP sampai saat ini masih menemui kesulitan dalam implementasinya. Kenyataan yang ada, faktor masih kuatnya pengaruh AS, melalui NATO, terhadap Uni Eropa, bahkan AS, melalui NATO, memperkuat kehadirannya di Eropa dengan melakukan ekspansi ke Eropa Timur dan Eropa Tengah. Disamping itu, faktor masih adanya perbedaan internal Uni Eropa terkait dengan keinginan keamanan Uni Eropa perlu dilaksanakan sendiri oleh Uni Eropa ataukah tetap dilaksanakan oleh AS, melalui NATO. Dengan adanya kenyataan akan kesulitan yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam mengimplementasikan CFSP, maka penelitian

ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan internal Uni Eropa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi Uni Eropa sehingga penerapan CFSP sebagai wujud kerjasama pertahanan Uni Eropa menghadapi kesulitan, dan terus menjadi bahan perdebatan diberbagai kalangan, perlu diungkap, agar dapat memberikan gambaran se jelas mungkin mengapa Uni Eropa menemui masalah untuk mewujudkan kerjasama pertahanan tersebut. Teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah kerjasama pertahanan Uni Eropa, dengan sendirinya, akan teruji sejauh mana keakuratan dan kebenarannya, bahkan mungkin saja akan ada teori-teori yang sudah ada akan terkoreksi dan melahirkan teori-teori baru yang merumuskan dan menjelaskan keberadaan dan perkembangan kerjasama pertahanan Uni Eropa melalui CFSP. Diharapkan, penelitian terhadap masalah dan solusi menyangkut masalah pro dan kontra internal anggota Uni Eropa terhadap pelaksanaan kerjasama pertahanan bersama ini dapat memberikan penjelasan alasan dibalik masalah tersebut dan apa yang perlu dilaksanakan oleh Uni Eropa dalam upaya untuk mewujudkan kerjasama pertahanan bersama melalui CFSP.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan dibatasi pada bagaimana dua faktor; terbaginya Uni Eropa kedalam dua kelompok, Atlantists dan Europeanists serta kenyataan Uni Eropa bukanlah sebagai negara, sehingga mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan yang bulat terhadap terbentuknya suatu kebijakan. Kedua faktor tersebut akan dibatasi pada periode sejak runtuhnya Uni Sovyet tahun 1991 sampai dengan terjadinya perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995, dengan alasan bahwa pada periode tersebut merupakan peluang terbaik bagi Uni Eropa untuk mewujudkan pelaksanaan kerjasama pertahanannya dalam CFSP mengingat ancaman militer dari Uni Sovyet sudah tidak ada lagi, dan perang di Yugoslavia merupakan uji coba pertama sejauh mana Uni Eropa dapat menerapkan CFSP. Dalam melakukan penelitian akan menggunakan teori Federalism.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Federalism

Masalah yang diangkat dalam thesis ini berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa yakni; ***mengapa Uni Eropa belum mampu untuk mengimplementasikan kerjasama pertahanan mereka dalam CFSP*** akan dianalisa dengan menggunakan teori federalism (McLean & McMillan; 2003; 195 dalam Simon Sweeny; 2005; 165 dan 166).

**Federalism** menurut **McLean & McMillan**, yang diungkapkan kembali oleh Simon Sweeny, adalah “*A system of integration which suggest that everybody can be satisfied by combining national and regional/territorial interests within a complex web of checks and balances between a national or federal government, and a multiplicity of regional governments* (2003; 195 dalam Simon Sweeny; 2005; 165)”. *Key features of a federal system of government menurut Simon Sweeny adalah “A federal political system has a clear division of competence between the higher level federal government and the states or regions that are its constituent parts”*(2005; 148).

Merujuk kepada pendapat Sweeny tersebut, maka elemen yang terdapat dalam federalism adalah; **(1) Federal/central government**; *Seat of sovereign state government, Central government institutions/National parliament or legislature, Administrative centre and higher courts. Policy areas*; *sole responsibility for defence, national security, foreign policy, social welfare, policing, economic policy, currency control, legal system, national infrastructure. Finance*; *Sets taxation levels, national budget and core areas of government spending. **(2) Regional/local level (states/region)**; *Local assembly/council/regional or local government offices. Responsibilities*; *Education, local transport, local services including leisure, street maintenance, refuse, health provision, emergency services, museums and parks. Finance*; *Limited tax raising powers, responsible for local budget.* Simon Sweeny memberi contoh federal system adalah AS, Jerman, Spanyol, Belgia dan Swiss. Simon Sweeny mengemukakan beberapa hal yang terdapat dalam federation; Federal states nationalism, Suppresses local identity, Sovereignty absorbed by federal executive, dan Weak state identity (2005;151).*

Beberapa pendapat yang berkaitan dengan federalism, diantaranya **Cini**, yang lebih menekankan kepada *'ideology behind the concept'*, yang berpendapat *"An ideological position that suggests that everyone can be satisfied by combining national and regional/territorial interests in a complex web of checks and balances between a central government and a multiplicity of regional governments. In a European Union context it tends to imply an ideological approach that advocates the creation of a federal state in Europe (2003; 418 dalam ibid; 166)"*.

Pendapat lain yang berkaitan dengan **federalism** adalah dari **Burgess**, yang mengatakan bahwa *"federal Europe"* refer to : *"a conception of the EU that is constantly changing, but which has at its core a set of basic principles or assumptions that indicate a voluntary union of state and citizens committed to the shared goals of welfare, security and prosperity, and which is structured in a manner which is specially designed to preserve nation states' identities, culture and interests, where this are consistent with overall well-being of the union"* (2003; 66 dalam Simon Sweeny; 2005; 143). Penafsiran Burgess tersebut sebagai *"common solutions to common problems"*, with the broad conception being *"unity in diversity"*. Burgess melanjutkan, *critical to the construction of the EU is that membership is voluntary and "based on political consent and legal agreement"* (2003; Ibid dalam Ibid; 143). *There is a basic principle of reconciliation of the interests of individual parts to the totality of the union or states* (Ibid; 67 dalam Ibid; 143).

**Rosamond** melihat sisi lemah dari federalist governance, yang cenderung untuk melemahkan penerimaan publik dan mengatakan *"The advantage of nation states is that they have a very powerful claim on the loyalties of peoples and in many respects constitute viable political communities in ways that powerfully federated communities cannot* (2000; 30 dalam Simon Sweeny; 2005; 144).

## **2.2 Penelitian yang sudah dilakukan.**

Masalah yang diangkat sebagai bahan penelitian dalam thesis ini, yakni berkaitan dengan pro dan kontra internal negara-negara anggota Uni Eropa menyangkut pelaksanaan kerjasama pertahanan bersama melalui CFSP telah banyak mendapat perhatian melalui penelitian dari berbagai pakar, dan telah melahirkan banyak pendapat, baik itu mendukung maupun tidak.

### 2.2.1 Pandangan Glyn Morgan.

Menurut pandangan **Glyn Morgan** (2005; 89-93) berpendapat, pendukung integrasi Eropa sering menegaskan bahwa integrasi Eropa sudah menjamin – dan terus untuk menjamin – bahwa Eropa tetap damai. Dari sudut pandang ini, rencana Eropa mendapatkan pembedanya dalam sejarah peperangan Eropa yang menyedihkan dan konflik antar negara. Jika integrasi Eropa dapat mengantar sejarah tersebut kepada kesudahan, maka rencana Eropa memiliki semua pembedan yang dibutuhkan.

Bagaimanapun juga, lanjut Morgan, bahwa keamanan-argumen dasar untuk integrasi Eropa (the security-based argument for European integration) memiliki sedikitnya tiga masalah, yaitu; **Pertama**, bahwa Eropa sudah stabil dan damai. Secara sederhana (simply put), jika Eropa sudah damai pada lima puluh tahun terakhir, mengapa saat ini penting bagi Eropa untuk mengambil langkah lebih jauh kearah integrasi politik penuh ? Sesungguhnya hal itu dapat diperdebatkan, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa *euroceptics*, bahwa lebih jauh integrasi politik tersebut hanya akan membahayakan elemen-elemen penting dari international order pascaperang, termasuk NATO dan bipolar balance.

Disini terjadi sebuah paradoks. Keberhasilan Eropa Barat dalam menghindari perang sejak tahun 1945 membuat lebih sulit untuk sungguh-sungguh (invoke) *a security-based argument for European politics integration*. Mungkin pembedan *the security-based* akan lebih dipercaya jika Rusia membangun aspirasi-aspirasi imperial (imperial aspirations) dengan menghormati negara-negara Eropa lainnya. Tapi hal ini kelihatannya tidak mungkin. “*Nor does this prospect seem to call for European political integration*”(2005; 89). Memang, NATO mungkin sarana terbaik untuk mengatasi Rusia. Tidak ada alasan yang jelas mengapa integrasi politik akan memberikan jawaban terhadap kebangkitan kembali Rusia.

**Kedua**, *problem with any security-based argument for European integration is that it begs the question of why the value of security should weigh so heavily in the scale* (masalah dengan pendapat -keamanan sebagai argumen dasar- untuk integrasi Eropa adalah bahwa hal ini memunculkan pertanyaan mengenai : mengapa nilai keamanan harus mendapat penekanan yang begitu besar). Sebuah *Euroceptic* mungkin mengijinkan bahwa rancangan integrasi Eropa menciptakan konflik kekerasan dalam Eropa kecil kemungkinannya, tapi meskipun demikian berpendapat bahwa keselamatan kedaulatan nasional melebihi keuntungan apapun demi keamanan

integrasi politik tersebut mungkin menghasilkan *A eurosceptic might allow that the project of European integration makes violent conflict within Europe somewhat less likely, but nonetheless contend that the preservation of national sovereignty outweighs whatever gains to security that political integration might yield* (2005; 89) (Seorang *Eurosceptic* mungkin setuju bahwa rencana pengintegrasian Eropa akan mengurangi konflik kekerasan antar negara-negara Eropa, tetapi menjaga kedaulatan nasional lebih penting dibandingkan keuntungan apapun dalam hal keamanan yang mungkin dihasilkan dari integrasi politik). *In order to meet this objection, the proponent of European integration needs to explain why security-and what form of security-matter* (2005; 89) (Untuk memenuhi tujuan ini, pendukung integrasi Eropa harus dapat menjelaskan “mengapa masalah keamanan” dan “bentuk keamanan seperti apa” penting). **Ketiga**, masalah dengan a security-based justification for European political integration adalah bahwa hal itu hanya akan berhasil pada pengeluaran terhadap beberapa pandangan yang berakar baik tentang hubungan internasional saat ini. Bagi “realists” dan “liberals” - dua kelompok yang dominan dalam hubungan internasional – ide integrasi politik Eropa adalah tidak dapat dilaksanakan dan tidak diperlukan. Bagi “realists,” negara mencari kekuatan relative dengan menghormati satu sama lain dibawa kondisi anarki internasional. Kebanyakan kelompok realist melihat Uni Eropa sebagai sebuah kelicikan dari perang dingin, yang ingin melestarikan bentuknya saat ini ataupun larut kedalam sebuah sistem persaingan multipolar. Bagi “liberals,” *dominant societal groups force states* (dominasi kelompok masyarakat negara kuat) untuk memaksimalkan kepentingan kelompok ini dengan membangun institusi-institusi internasional yang saling menguntungkan. Dari sudut pandangan ini, Uni Eropa mewakili sebuah contoh yang sukses sebagai sebuah institusi internasional. Hal tersebut didukung oleh kelompok masyarakat yang dominan yang tidak mempunyai kepentingan apapun didalam menciptakan sebuah integrasi Eropa yang lebih bersifat politik.

Glyn Morgan melanjutkan (2005; 90), bahwa titik pemberangkatan untuk semua teori-teori realist hubungan internasional adalah kenyataan dari anarki – kenyataann, dengan kata lain, bahwa interaksi antara negara terjadi dalam ketidakhadiran bentuk yang mengingat dari otoritas politik. Dibawah kondisi anarki tersebut, negara harus menjalankan kekuatan relatif. Perilaku negara dapat dijelaskan – dan mungkin diramalkan – diatas dasar pandangan motivasi negara (*state motivation*).

Lain lagi dengan **Kenneth Waltz**, seorang “realist,” dan kawan-kawan yang dikutip kembali **Glyn Morgan**, bahwa *Waltz and other structural realists have speculated on the likely response of states to the new era of US unipolarity* (2005; 92) (berspekulasi tentang kemungkinan tanggapan negara terhadap era baru unipolar AS). *Waltz’s structural theory predicts that other leading powers in the international system will eventually, acting either singly or collectively, balance against the United States* (2005; 92) (Teori structural Waltz meramalkan bahwa kekuatan-kekuatan utama lainnya dalam sistem internasional nantinya akan bertindak sendirian atau kolektif, pengimbang melawan AS). *Unbalanced power, whoever wields it* (2005; 92) (Ketidakseimbangan kekuatan, siapapun yang memegang dan menggunakannya). Waltz memberi alasan, *is potential danger to others....In international politics, overwhelming power repes and leads others to balance against it* (2005; 92) (adalah sebuah potensi bahaya bagi lainnya....Dalam politik internasional, kekuatan besar sekali menangkis dan memimpin yang lainnya untuk mengimbangi melawan AS)

Ketika Waltz memikirkan kasus Eropa sebagai sebuah penantang AS, Waltz mengharapkan Jerman – kekuatan yang dominan di Eropa – untuk mengambil alih kepemimpinan. Seperti Waltz katakan “*In the absence of radical change, Europe will count for little in international politics for as far ahead as the eye can see, unless Germany, becoming impatient, decides to lead a coalition*” (dalam Glyn Morgan; 2005; 92). Waltz juga tampaknya menyarankan bahwa jika Eropa berhasil untuk merintangi dominasi AS, Eropa harus menjadi sebuah negara terpadu, walaupun Waltz berpendapat hal ini tidak mungkin.

### 2.2.2 Pandangan John Gillingham.

**John Gillingham** dalam *Design for a New Europe* (2006 ; 29-31 ) melihat harapan terwujudnya kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa berpendapat bahwa *policy made in the name of Europe is backed by force. It is not, however, accompanied by responsibility* (2006; 29) (kebijakan yang dibuat atas nama Eropa didukung oleh kekuatan). Namun hal itu tidak disertai oleh tanggung jawab. *Unless Europe places limits to its ambitions, comes to a better understanding of its real needs, and recognizes the extent of its actual powers, it will create big problems for itself in the future* (2006; 29-30) (Kecuali kalau Eropa meletakkan batas pada ambisinya, sampai pada suatu pengertian yang lebih baik akan kebutuhannya yang

nyata, dan mengakui besarnya kekuatan nyata Eropa, hal itu akan menciptakan masalah-masalah besar bagi Uni Eropa sendiri dimasa akan datang

*‘Decisions regarding the use of this power will not be made in Brussels, Strasbourg, Luxembourg City or any other European capital except Paris’* (2006; 30) (Keputusan-keputusan mengenai penggunaan kekuatan tersebut tidak akan dibuat di kota Brussels, Strasbourg, Luxembourg, atau ibu kota Eropa lainnya kecuali Paris). Gillingham melanjutkan : *‘The shadowy figures behind the mysterious desk in Brussels pose an even more deep-seated threat : How can Europes – unable to hold even civilian Eurocrats accountable – control a future of EU military establishment shielded by secrecy laws and supported by a multinational defence industry exempt from competition and disclosure rules ?’* (2006; 30). *‘United States – the target of Chirac’s wild shots – continues to hope that reinforcing and bulking up the hollow vertical tube of the Common Security and Foreign Policy will enable the EU to carry part of the peacekeeping burden in the European theatre’* (2006; 30) (AS – sasaran tembakan liar Chirac – tetap mengharapkan bahwa memperkuat dan memperbesar the hollow vertical tube of CFSP akan memungkinkan Uni Eropa untuk memikul beban penjaga perdamaian di mandala Eropa’. *‘It also specially endorsed the creation of an independent European rapid deployment force to implement this responsibility, because the growing disparity between UN and European military proficiency would otherwise put American lives unnecessarily at risk in joint operations. Until recently, the Pentagon had no fear whatsoever of creating a European competitor, because the EU does not pose a credible threat to US security’* (2006; 30). *‘Europe’s new security policy originated in an intra – Europe struggle rather than that between Europe and the United States’* (2006; 30). *‘The Nice summit of December 2000 provides the background to the new emphasis on security policy’* (2006; 31).

### **2.2.3 Pandangan Desmond Dinan.**

**Desmond Dinan** dalam *Ever Closer Union* (2005; 559, 560, 586, 587, 590, 591, 592, 595, 598, 600, 601, 602, 604, 605, 624) dalam melihat kedua faktor penyebab munculnya pro dan kontra dalam mewujudkan kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa, berpendapat *‘As the EU became a leading international economic actor, its relatively weak political presence on the world stage appeared increasingly anomalous’* (2005; 559).

Desmond Dinan berpendapat terkait dengan integrasi Uni Eropa, bahwa *‘Many advocates of deeper integration believe that the EU’s destiny is to become a major global power and that the member states must ‘speak with one voice’ internationally’* (2005; 559). *‘Finally, the importance of counterbalancing the United States, the world’s sole superpower, is another possible reason for a common EU foreign policy’* (2005; 559). *‘Arguably, a unipolar world is inherently unstable, especially if the hegemon uses its power irresponsibly. Best to balance that power against an equally powerful entity: the EU’* (2005; 559). Desmond Dinan menegaskan, *‘Of course, the EU could never become a superpower without developing a common defence policy and military capability comparable to those of the United States, which unlikely ever to happen’* (2005; 559-560).

*‘National sovereignty remains a formidable barrier to the development of a truly common foreign policy, let alone a common defence policy or a common army. So do different national foreign policy interests, orientations, and traditions. Moreover, small member states are instinctively wary of the big member states’ motives and tendencies when it comes to foreign and defence policy cooperation’* (2005; 560).

*‘The possibility of a single EU seat in the United Nations Security Council illustrates the challenge of developing a common foreign policy. If the EU wants to speak with one voice internationally, logically it should have a single seat in the Security Council. But Britain and France, permanent Security Council member, are opposed to that idea’* (2005; 560). Meski demikian, Uni Eropa memiliki apa yang disebut CFSP dan sedang membangun kebijakan pertahanan bersama dengan sebuah kemampuan militer (2005; 560).

Jelas, CFSP bukanlah kebijakan bersama seperti Common Commercial Policy (CCP). Dengan kata lain, negara anggota tidak memiliki tanggung jawab bersama terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan, membiarkan sendirian kebijakan pertahanan, dalam Uni Eropa. *‘The CFSP undoubtedly helps the EU to raise its international profile and to apply additional pressure to promote stability and help resolve conflicts beyond the EU’s borders. Although member states accept that closer foreign and defence policy cooperation is in their interests, the political obstacle remain high’* (2005; 560).

*‘Perhaps the greatest spur to developing the CFSP and, especially, a common defence policy came from the EU’s inability to prevent the Balkan wars of the 1990’s’*

*triggered by disintegration of Yugoslavia*' (2005; 560) (Mungkin pendorong terbesar untuk membangun CFSP, dan khususnya, sebuah kebijakan pertahanan bersama datang dari ketidakmampuan Uni Eropa untuk mencegah perang Balkan tahun 1990 yang dipicu oleh disintegrasi Yugoslavia). *'The end of the Cold War, doubts about NATO's future, and uncertainty about the role of the United States in Europe complicated the issue and increased the Atlantists' reluctance to forge a link between the EU and the WEU'* (2005; 587) (Berakhirnya perang dingin, keraguan tentang masa depan NATO, dan ketidakpastian mengenai peran AS di Eropa serta meningkatnya keengganan atlantists untuk membina terlalu dekat hubungan antara Uni Eropa dengan Uni Eropa Barat).

*'Europeanists' countries-notably France-argued the contrary case, making the old point that a stronger European pillar would bolster the alliance and the new point that with the end of the Cold War, Europe needed to develop its own defence organization because the United States was bound to reduce its military involvement on the continent. Germany sided instinctively with Europeanists but, at least as long as Soviet Troops remained in the eastern part of the country, opted pragmatically for the Atlanticists'* (2005; 587). Desmond Dinan memberikan pendapat terkait dengan perang Yugoslavia, *'The instruments available to the embryonic EU included arbitration, inspection, diplomatic recognition or nonrecognition of the warring parties, and economic sanction and inducements'* (2005; 590).

Dalam prakteknya, perpecahan negara anggotanya menghambat Uni Eropa. Banyak negara anggota Uni Eropa yang simpati kepada Kroasia dan Bosnia, negara yang menjadi korban Serbia, namun Yunani simpati kepada Serbia yang memiliki hubungan budaya dan agama yang dekat. Yunani juga menghalangi pengakuan Komite Eropa (*European Committee*) terhadap Macedonia, yang dianggap telah mencuri nama tersebut, kecuali Republik Yugoslavia mengganti nama tersebut. Kegagalan CFSP mengatasi perang Yugoslavia menjadi nyata pada bulan April 1994 dengan terbentuknya Contact Group yang terdiri dari Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dan AS untuk mengelola situasi Yugoslavia. Walaupun terdapat tiga anggota Uni Eropa dalam group tersebut, kemudian disusul bergabungnya Italia, seharusnya mewakili Uni Eropa, kenyataannya, mereka masuk dalam group tersebut karena pengaruh dan ukuran negaranya yang besar dan hanya mewakili diri mereka sendiri.

Pada tahun 1995 AS bersama NATO melakukan tindakan militer dengan membombardir Serbia. Tindakan AS tersebut tidak dapat menyembunyikan cap kekuasaan AS dalam proses perdamaian dan kegagalan upaya Uni Eropa untuk mengakhiri perang dibekas Yugoslavia. Krisis Yugoslavia adalah sebuah pelajaran berharga dalam keterbatasan integrasi Eropa, khususnya kesulitan dalam kedaulatan bersama dalam area sensitive, keamanan dan pertahanan. Dibawah Perjanjian Maastricht, negara anggota dapat membiayai operasi CFSP baik dari budget sendiri maupun dari budget Uni Eropa. Tidak mengherankan, negara anggota lebih suka untuk menarik anggaran Uni Eropa dan enggan membayar biaya politik menyangkut keamanan oleh pengeluaran operasional CFSP melalui Parlemen Eropa. Negara anggota menyelesaikan isu menyangkut budget dalam Perjanjian Amsterdam dengan menyetujui bahwa pembelanjaan operasional CFSP akan dibebankan pada budget Uni Eropa.

Dinan melanjutkan, hanya Dewan Eropa (European Council) yang memiliki kewenangan politik untuk mengambil keputusan yang dianggap perlu didalam CFSP yang dikenal dengan *the European Security and Defense Policy* (ESDP). Pada pertemuan di Cologne bulan Juni 1999, European Council mendeklarasikan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan *Petersberg tasks (conflict prevention and crisis management)*, Uni Eropa “harus memiliki kapasitas untuk tindakan yang otonomi, didukung oleh kekuatan militer yang dapat dipercaya dan sarana untuk memutuskan menggunakannya dan sebuah kesiapan untuk melakukannya.”

Masyarakat Eropa menyambut baik ide intervensi militer diluar perbatasan Uni Eropa, dibawah naungan PBB untuk memberantas masalah agresi. Walaupun demikian, public yang sama umumnya tidak antusias tentang pengeluaran uang yang lebih untuk pertahanan. **Robert Kagan** berpendapat, yang dikutip kembali **Desmond Dinan**, Uni Eropa melakukan negosiasi tanpa akhir dalam mencari kompromi yang cerdas karena negara anggotanya, kebanyakan adalah bekas kekuatan besar, tidak memiliki kemampuan, telah kehilangan keinginan untuk melakukan apapun. AS, secara bertentangan, diharuskan bertindak secara pasti dan sepihak dalam mempertahankan kepentingannya karena AS memiliki sarana dan tekad untuk melakukannya. Dalam pandangan Kagan, lanjut Dinan, perbedaan antara AS dan Uni Eropa adalah sejarah, filosofis, dan structural. Mereka juga tidak dapat dijembatani. Seperti ungkap Kagan : AS berasal dari Mars dan Eropa dari Venus.

#### 2.2.4 Pandangan M. H. Paul, J. Erik, R. Martin, & S. Ulrich

Adapun pemahaman A. E. Rachel & G. Alexandra yang dikutip kembali oleh M. H. Paul, J. Erik, R. Martin, & S. Ulrich dalam *Development in European Politics* (2006 ; 318, 321) melihat salah satu respon Eropa Barat terhadap berakhirnya perang dingin adalah mengurangi anggaran pertahanan, yang dalam beberapa hal secara dramatis. Pada tahun 1988 dan 1989 seluruh negara Eropa anggota NATO menghabiskan sedikitnya 2 % GDPnya untuk pertahanan dan dengan cepat memikirkan untuk lebih dari itu. Pada tahun 1988, Perancis 3.7 %, Jerman 2.9 %, Inggris 4.1 %, Italia 2.3 %, Belanda 2.8 %, Norwegia 2.9 %. Pada periode yang sama, AS sekitar 5.7 % dari GDPnya. Mulai tahun 1990 anggaran pertahanan negara-negara Eropa anggota NATO tersebut, terkecuali AS, mengalami penurunan sampai dengan 2001 (tahun 9/11), dimana Jerman 1.4 % tahun 2002, Perancis dan Inggris 2.5 % tahun 2002 dan naik sedikit pada tahun 2003 sekitar 2.6 dan 2.8 %.

Secara umum anggaran pertahanan Eropa sekitar 1.9 %, dibawah rata-rata global. Pendapat M. H. Paul, J. Erik, R. Martin, & S. Ulrich tersebut didukung oleh M. David Andrews, yang mengatakan bahwa menurunnya anggaran pertahanan negara-negara anggota Uni Eropa tersebut, menjadikan Uni Eropa lebih bergantung kepada AS (M. Andrews, David, "The Atlantic Alliance Under Stress, US-EU Relations after Irak," Cambridge University", 2005, hal 22). Berakhirnya perang dingin, lanjut Rachel dan Alexandra, banyak politisi dan pengamat berpendapat ketika a new 'world order' telah muncul, dimana definisi konvensional keamanan, musuh dan ancaman tidak relevan lagi. Konsep keamanan fokus pada ancaman transnasional dan konflik diluar perbatasan Uni Eropa telah mendorong pemotongan anggaran secara signifikan dalam pertahanan. Menurut European's first Security Strategy : *'Our traditional concept of self - defence – up to and including the Cold War – was based on the threat of invasion. With the new threats, the first line of defence will often be abroad'* (EU, 2003: 11).

#### 2.2.5 Pandangan Michael E. Smith

Michael E. Smith (Michael E. Smith; Europe's Foreign and Security Policy; The Institutionalization of Cooperation; 2004; 245-247) melihat faktor keberadaan Uni Eropa bukan sebagai sebuah negara kesatuan penyebab munculnya masalah pro dan kontra internal anggota Uni Eropa, berpendapat bahwa terdapat lima kesukaran dalam kebijakan luar negeri Eropa, diantaranya; *pertama*, Keberadaan, ketahanan dan

perluasan kebijakan luar negeri Eropa (*The existence, endurance and expansion of European foreign policy*). Smith mengatakan, perluasan semacam Kebijakan Luar Negeri Eropa tidak dapat dihubungkan dengan perubahan dalam lingkungan eksternal sendiri. Realist cenderung fokus pada krisis dan ancaman-ancaman eksternal sebagai mekanisme untuk menyebabkan kerjasama, disamping itu tidak adanya hubungan yang konsistensi antara ancaman-ancaman dan tindakan bersama.

Dibandingkan dengan kecenderungan krisis kawasan global lainnya, seperti Timur Tengah, atau Asia Timur, dimana keefektifan koordinasi kebijakan luar negeri/keamanan adalah kurang, upaya-upaya Uni Eropa pada hal tersebut adalah teka-teki bagi realist, khususnya sejak keamanan Uni Eropa disediakan oleh aliansi yang paling sukses dalam sejarah : NATO. Didalam Uni Eropa, beberapa krisis (seperti the Persian Gulf War) tidak didukung oleh suatu respon bersama, dan, sebaliknya, di wilayah lain, seperti Amerika Tengah dan Afrika Selatan, dimana Uni Eropa bertindak diatas dasar pengertian dan prinsip bersama, tidak takut terhadap ancaman eksternal. Pengertian bersama tersebut dihasilkan dari suatu *constant and increasingly institutionalized debate* tentang kerjasama kebijakan luar negeri. Pertama-tama, Uni Eropa hanya berusaha untuk membagi informasi tentang kebijakan luar negeri mereka sendiri.

Mereka hanya berharap bahwa koordinasi kebijakan semacam itu akan mencegah tindakan-tindakan eksternal yang unilateral dari campur tangan dengan bisnis European Community; ide tindakan bersama tersebut tidak dijalankan secara serius. Kemudian, negara-negara Uni Eropa mencapai kesepakatan akan posisi atau tindakan yang diambil secara unilateral tetapi masih dalam kegunaan kepentingan bersama. Hanya setelah fundasi tersebut dibangun – kemudian menciptakan suatu kepercayaan dan kemampuan memperkirakan dalam kebijakan luar negeri – negara-negara Uni Eropa mulai untuk terlibat secara regular dalam tindakan kolektif menggunakan sumber daya European Community. Hampir semua tindakan-tindakan tersebut sebaliknya diinstitutionalisasikan diatas dasar preseden dan problem solving, bukan tawar-menawar kepentingan sendiri.

Metode-metode kerja informal baru dan kemajuan-kemajuan formal (terutama dalam rangka pembuatan keputusan, pembiayaan, dan perwakilan eksternal) telah membantu negara-negara Uni Eropa menemukan suatu keseimbangan antara stabilitas kelembagaan. Ketentuan-ketentuan baru tersebut juga memajukan kemampuan terus-menerus aktor-aktor Uni Eropa untuk mengeksploitasi kesenjangan-kesenjangan-

institusional dan pertentangan dengan mekanisme baru. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut meningkatkan kemandirian (*self-sustaining*) antar elit-elit Uni Eropa yang paling terlibat dengan hal tersebut. Smith mengatakan bahwa ujian sesungguhnya akan datang pada waktu pelaksanaan : ketika Uni Eropa pertama mencoba untuk menjadikan operasional tujuan kerjasama pertahanan dibawah doktrin baru ‘meningkatkan kerjasama (*enhanced cooperation*),’ khususnya setelah pemekaran berikutnya.

**Kedua,** Kebijakan luar negeri Uni Eropa dan dunia eksternal (*EU foreign policy and external world*). Smith mengawali puzzle kedua ini dengan pertanyaan; Apakah Uni Eropa aktor yang mempengaruhi dan bahkan diluar teritorinya sendiri? Smith merujuk pada European Politic Cooperation (EPC) awalnya bertujuan untuk membantu memperkuat integrasi ekonomi Eropa (*European economic integration*), bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah politik internasional yang kompleks. Sambutan luas akan ide tersebut bahwa Eropa seharusnya memainkan suatu peran politik internasional sama dengan peran ekonominya. Dalam sejarah EPC disediakan untuk membantu negara-negara Eropa saling mengerti kebijakan luar negerinya (seperti *confidence-building*), bukan untuk pengusahaan tindakan bersama. Akhirnya, adalah perdebatan yang menyesatkan bahwa Uni Eropa tidak akan pernah memiliki sebuah kebijakan luar negeri bersama selama Uni Eropa bukan sebuah negara kesatuan dengan pengambilan keputusan terpusat dan tentara sendiri. Selama Uni Eropa tetap sebuah kumpulan negara, perbandingan tersebut sama sekali tidak tepat.

Menyangkut pembiayaan hubungan eksternal Uni Eropa, Smith berpendapat, bahwa mekanisme kelembagaan menyangkut sumber pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan eksternal juga membuka serentetan masalah setelah Maastricht. Pilar *CFSP/Justice and Home Affair (JHA)* mulai operasi dibawah sebuah aturan bahwa sisi “operasional” dari kegiatan bersama mereka akan dibiayai oleh kontribusi nasional (kecuali diputuskan sebaliknya), sementara pembelanjaan “administrasi” akan ditarik dari anggaran EC. Hal tersebut tampaknya menjadi sebuah kemajuan yang jelas dari norma-norma EPC, yang mengatakan sedikit tentang pendanaan kegiatan bersama. Dalam prakteknya, bagaimanapun juga, pengaturan untuk menyediakan dana operasional dari kontribusi nasional menjadi subyek bagi masalah-masalah konseptual dan logistik gabungan dari kesulitan domestik dalam negara

anggota Uni Eropa. Administrasi Uni Eropa dari Mostar mengungkapkan bagaimana sulitnya untuk membiayai operasi CFSP melalui sarana nasional.

Treaty on European Union (TEU) (Artikel J.5) menetapkan bahwa kepresidenan Uni Eropa bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan bersama CFSP, tapi Komisi (Artikel 205) akan melaksanakan anggaran EC, sehingga beberapa negara anggota Uni Eropa menyarankan bahwa Qualified majority voting (QMV) digunakan (dibawah Artikel 205) melaksanakan tahap pembiayaan selanjutnya dari tindakan bersama di bekas Yugoslavia telah diputuskan secara bulat. Hal tersebut menjadi perdebatan yang berlarut-larut tentang “Joint action implementation” (oleh kepresidenan Uni Eropa) dan “budgetary implementation” (oleh Komisi). Inggris secara tegas menolak untuk menggunakan prosedur QMV dalam bidang ini, dan setiap tahap tindakan Uni Eropa di Balkan memerlukan suatu kebosanan yang berulang-ulang akan kesepakatan proses pembuatan keputusan pada tingkat tertinggi, bila pengeluaran normal anggaran Uni Eropa dapat dibuat dengan QMV.

#### **2.2.6 Pandangan Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd**

**Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd** dalam *Toward a European Army; A Military Power in the Making* (2003; 149) melihat pengaruh AS terhadap munculnya pro dan kontra internal anggota Uni Eropa terhadap pelaksanaan kerjasama keamanan bersama, memberikan penjelasan menyangkut respon AS dan NATO terhadap Uni Eropa, dan mengatakan bahwa integrasi Eropa menjadi sebuah cerita sukses dan benar pada kurun waktu Truman Doctrine dan Marshall Plan. AS membantu menanam benih, menyediakan bantuan, dan mempertahankan Eropa Barat dari ancaman eksternal. Beberapa pendapat di AS menjadi takut bahwa Eropa Barat nantinya akan bentrok dengan ambisi AS, bahwa ambisi Eropa untuk membangun sebuah negara yang akan mencapai kesetaraan geopolitik dengan AS, dengan saran bahwa pembentuk asli menghendaki sebuah blok Eropa, terpisah dari AS dan USSR. Bagi pendapat tersebut, AS mendukung integrasi Eropa, tapi hanya dengan syarat menurut kerangka Atlantic community dan kepemimpinan AS.

Presiden Harry Truman dan Dwight Eisenhower, dan menteri luar negeri Dean Acheson dan John Dulles, mendukung integrasi Eropa karena mereka percaya kehadiran AS di Eropa hanya bersifat sementara, tidak permanen. Eisenhower mencata: “If in ten years, all American troops stationed in Europe for national defence purposes have not returned to the United States, then this whole project will have

failed". Dulles percaya bahwa AS seharusnya tidak membuat hidup demikian mudah bagi Eropa sehingga mereka akan bergantung kepada AS. Salmon dan Shepherd melanjutkan 'Tercatat bahwa operasi militer melawan bekas Yugoslavia pada tahun 1999 telah menyoroti kekurangan Eropa dalam komando, pengendalian, komunikasi, dan sumber intelijen, pesawat tempur, precision-guided munition, angkutan udara, kemampuan gelar, logistik, dan secara keseluruhan tidak seimbangan antara kemampuan pertahanan AS dengan Eropa', yang mana melemahkan pembagian beban transatlantic (2003; 159).

Senat AS berpendapat bahwa 'NATO harus tetap menjadi institusi utama yang mana sekutu Eropa menyampaikan isu-isu keamanan yang berhubungan dengan transatlantik'. Semua harus meningkatkan kemampuan pertahanannya, khususnya melalui NATO's Defense Capabilities Initiative (DCI). Senat juga mencatat bahwa Uni Eropa menginginkan untuk memiliki 'kemampuan untuk bertindak otonom...ketika aliansi sebagai keseluruhan sedang tidak terlibat,' tapi lebih jauh bahwa, dalam hal perhatian bersama transatlantik, Uni Eropa seharusnya 'melakukan misi otonom melalui European Security and Defense Identity hanya setelah NATO menolak untuk melakukan misi tersebut'.

Menyangkut sumber daya, Salmon dan Shepherd (Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd; *Toward a European Army; A Military Power in the Making*; 2003; 162,163) mengatakan bahwa sumber daya telah dan tetap menjadi sebuah isu besar, sebagian karena anggaran Eropa telah jatuh atau tetap datar, even if the fall has been generally arrested. Pada tahun 2002 rata-rata pembagian gross domestic product (GDP) untuk pertahanan adalah 2.4 persen, 2.9 % persen bagi AS, 2.0 persen bagi anggota NATO di Eropa. Sebuah kegagalan untuk membiayai akan merugikan NATO. Anggota Uni Eropa memberikan indikasi bahwa mereka enggan untuk meningkatkan belanja pertahanannya. Seperti pada masa lalu, negara-negara Eropa kuat dalam retorika tapi rendah hasilnya.

Sebuah dimensi pertahanan Eropa tidak akan terjadi dengan anggaran militer saat ini. Bahkan, dengan kekuatan 2 juta tentara, Eropa sangat sulit menggelar dan mempertahankan 40.000 pasukannya di Kosovo. Mengurangi kesenjangan tersebut akan membutuhkan lebih banyak uang, more political will, lebih banyak kepaduan kebijakan, lebih efisien dalam procurement, pembangunan dan riset yang lebih baik, atau *'more of everything, and better in everything'*. Satu masalah adalah bahwa AS dan Uni Eropa tidak akan pernah setuju terhadap tingkat yang sesuai seharusnya

anggaran pertahanan, sejak mereka memiliki persepsi ancaman yang berbeda dan sejumlah tuntutan yang berbeda terhadap anggarannya, seperti pensiun, jaminan kesehatan, dan kesejahteraan.

Yang menjadi masalah besar adalah menjadikan anggota Uni Eropa setuju terhadap ancaman baru semacam itu bahwa NATO dan AS menghadapi ketidaksetaraan ekonomi, pengrusakan lingkungan, perbedaan etnik dan kebangsaan, migrasi, penyebaran senjata pemusnah massal, terorisme, konflik agama, dan sumber konflik, khususnya terhadap minyak, dan bagaimana mengatasinya. Bagian signifikan dari masalah tersebut adalah pertahanan peluru kendali, sebagaimana AS melihat ke Iran, Iraq, Libya, dan Korea Utara. Jelasnya, AS melihat pertahanan peluru kendali sebagai suatu yang penting, memperkuat kredibilitas komitmen keamanan AS di Eropa, dan menemukan ketidakbiasaan perlawanan Eropa.

Salmon dan Shepherd mengatakan bahwa masalah bagi Uni Eropa dalam mendukung ESDP adalah berlipat ganda; *pertama*, sejak berakhirnya konflik Kosovo, banyak komentator dan pendapat umum, menemukan hal tersebut sulit untuk mengidentifikasi ancaman yang memerlukan Uni Eropa untuk memiliki dimensi militer; *kedua*, mereka memperdebatkan bahwa ada NATO untuk melindungi ancaman potensial apa saja yang muncul (2003; 9).

Salmon dan Shepherd (2003; 17, 18, 22, 26) memberikan gambaran tentang kerjasama militer yang pernah dilakukan oleh negara-negara Eropa. Pada tanggal 4 Maret 1947, Inggris dan Perancis menandatangani *the Dunkirk Treaty of Alliance and Mutual Assistance*, yang terakhir dalam lima puluh tahun. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Perancis akan bersatu bila ada agresi dari Jerman. Pada tanggal 17 Maret 1948, dikenal dengan *the Brussel Treaty*; Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg menyetujui perjanjian *economic, social, and Culture Collaboration and Collective Self-Defense*. Pada bulan September 1948, dibentuk badan militer dibawah Brussel Treaty yang bernama *the Western Union Defense Organization (WUDO)* sebagai reaksi terhadap dimulainya blokade Berlin pada tanggal 24 Juni 1948. Pada tanggal 27 Mei 1952 *the European Defense Treaty* ditandatangani oleh enam negara penandatangan *the six European Coal and Steel Community State (ECSC)*. Perjanjian tersebut mendefinisikan *European Defense Community (EDC)* tersebut sebagai sebuah *'supranational European Organization....supranational in character, comprising common institution, cpmmmon armed forces, and a common budget'*. EDC merupakan tanggapan terhadap perang Korea, masalah

mempersenjatai kembali Jerman, membangun proposal ECSC, memenuhi mimpi Monnet dan Pleven.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rencana

Penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan menggunakan metoda kualitatif, yaitu meneliti suatu masalah/fenomena dalam batasan-batasan tertentu yang ditetapkan, dengan menganalisa serangkaian data *records* untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dilakukan secara deskripsi naratif/ dalam bentuk uraian kata-kata. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan.

Setelah menentukan topik yang akan dibahas, dilakukan pemilihan buku-buku yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian dilakukan pendokumentasian data yang meliputi fakta-fakta, teori pendukung, serta pendapat para pakar, untuk mendapatkan rumusan masalah dan selanjutnya sebagai bahan analisis dalam pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

#### 3.2 Pelaksanaan

Topik penelitian thesis ini adalah kerja sama pertahanan Uni Eropa. Dalam proses pengumpulan data awal diperoleh gambaran umum dan latar belakang masalah, hingga dapat ditentukan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya di dalam pembahasan penulis berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian, yaitu *faktor-faktor yang menjadi permasalahan bagi Uni Eropa dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanan, CFSP, terutama ketika Uni Eropa mendapat kesempatan untuk mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995.*

Pemilihan buku-buku lebih lanjut dilakukan dengan memperhatikan masalah-masalah yang akan dibahas dalam thesis ini, yaitu: **(a)** bidang kebijakan luar negeri AS; **(b)** bidang keamanan regional Eropa; **(c)** bidang sejarah Eropa; **(d)** bidang kebijakan kerjasama pertahanan Uni Eropa; **(e)** bidang perkembangan kebijakan NATO; **(f)** bidang perkembangan hubungan NATO dengan Uni Eropa; **(g)** bidang ambisi global Uni Eropa; dan **(h)** bidang kebijakan pengembangan keanggotaan Uni Eropa.

Selanjutnya dilakukan identifikasi dan pendokumentasian data-data dari buku-buku tersebut, yaitu data-data yang menjelaskan: **(1)** apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan nyata Uni Eropa sehingga perlu mendirikan institusi kerjasama pertahanan; **(2)** ancaman yang dihadapi sehingga Uni Eropa perlu memiliki dimensi militer; **(3)** bahwa diperlukan argumen (*the security-based argument for European Integration*) yang menjelaskan mengapa Uni Eropa memerlukan institusi kerjasama pertahanan, karena dalam kurun waktu lebih lima puluh tahun terakhir kondisi Uni Eropa sudah stabil dan damai; **(4)** Uni Eropa bukan sebagai negara kesatuan; **(5)** keretakan internal Uni Eropa antara negara besar dengan negara kecil; **(6)** menjelaskan negara-negara anggota Uni Eropa yang masuk dalam kelompok Atlantists maupun kelompok Europeanists; **(7)** pendukung integrasi Eropa perlu menjelaskan -mengapa masalah keamanan dan seperti apa bentuknya- menjadi penting; **(8)** kebijakan anggaran pertahanan negara-negara anggota Uni Eropa; **(9)** kebijakan Uni Eropa pasca Uni Sovyet runtuh; **(10)** kebijakan AS untuk bertindak *unipolar* **(11)** kebijakan luar negeri AS terhadap Eropa pasca runtuhnya Uni Sovyet;; **(12)** kekhawatiran AS terhadap terbentuknya kerjasama pertahanan Uni Eropa; **(13)** Uni Eropa perlu membangun kebijakan pertahanan bersama dan kemampuan militer sebanding dengan AS, jika ingin mewukudkan *balance of power*; **(14)** CFSP dianggap masih lemah karena tidak mampu mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia; dan **(13)** perang Yugoslavia.

Data-data di atas kemudian digunakan untuk analisis dalam pembahasan masalah. Data-data dikelompokkan menurut masalah yang dibahas. Untuk satu masalah diperoleh beberapa data yang berasal dari sumber yang berbeda tetapi membahas masalah yang sama dan saling mendukung. Dengan demikian pembahasan dapat dilakukan dengan diperkuat data yang lebih banyak.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Data Penelitian

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar. Data-data penelitian tersebut dibagi menjadi dua bagian besar, yang semuanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu;

##### 4.1.1 Data yang berkaitan dengan Kuatnya Pengaruh AS terhadap Uni Eropa

Data-data penelitian yang masuk dalam kelompok ini adalah data-data sekunder untuk menjawab pertanyaan dan fokus penelitian; Faktor Kuatnya Pengaruh AS terhadap Uni Eropa, dari hasil penelitian pakar sebelumnya, diantaranya;

##### 4.1.1.1 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Desmond Dinan

a. *Probably the best-known U.S. international initiative ever, the Marshall Plan was the main instrument used by the United States to encourage European integration. But the Marshall Plan – or the European Recovery Program, as it was formally called-had many origins and objectives, all of them interconnected* (2005; 18). Pendapat ini merupakan hasil penilaian terhadap kebijakan bantuan AS terhadap Eropa Barat pasca perang dunia II, ketika negara-negara Eropa Barat sedang berada dalam kesulitan ekonomi.

b. *Some revisionist historians see in it an effort by the United States to acquire an empire in Europe by design; others argue that Europe's economic weakness allowed the United States to acquire an empire by default* (2005; 19). Kemudian melanjutkan, bahwa *Healthy economic and political self-interest also guided the U.S. undertaking. Fear of an imminent economic recession, similar to that which had followed the cessation of hostilities in 1918, was one such motivation. Without economic growth in Europe, U.S. exports would stagnate and decline, and the United States itself would follow Europe into depression. However, the U.S. economy depended much less on exports to Europe in the late 1940s than it does today* (2005; 18). Pandangan

ini menilai bahwa kebijakan bantuan AS terhadap Eropa Barat merupakan sebuah strategi AS untuk menguasai Eropa melalui desain.

c. *Many contemporary Europeans were well aware of the dangers of relying too much on U.S. economic largesse and military protection and perceived European integration as a means of asserting the continent's independence* (2005;19). Pendapat ini menilai bahwa berbahaya untuk bergantung terlalu banyak kepada bantuan ekonomi AS.

d. Pandangan Desmond Dinan yang mengatakan *'Of course, the EU could never become a superpower without developing a common defence policy and military capability comparable to those of the United States, which is unlikely ever to happen'* (2005; 560), merupakan suatu analisis bahwa Uni Eropa akan sangat sulit untuk membangun kekuatan pertahanannya seperti yang dimiliki oleh AS. Dan pandangan Dinan tersebut dapat diartikan melalui kekuatan militernya, AS telah menciptakan suatu pengaruh yang kuat bahwa Uni Eropa akan terus bergantung kepada AS dalam menjaga keamanannya

#### **4.1.1.2 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Christopher Booker & Richard North**

a. Berkaitan dengan pendapat Charles de Gaulle, yaitu *'de Gaulle then startled the world by announcing his personal decision to veto Britain's entry, claiming that Britain was not yet sufficiently European in her outlook, and still too closely tied to the USA'* (Christopher Booker & Richard North; 2003; 102), merupakan gambaran yang jelas bahwa kuatnya hubungan Inggris dengan AS sebagai instrumen bagi dalam menanamkan pengaruhnya terhadap Uni Eropa.

b. *'In response to Marshall's declaration, 16 European nations agreed to attend a conference in Paris on 12 July 1947, to form a group known as the Committee for European Economic Co-operation (CEEC). The result of their work was a report on 12 December that, to cover the period 1948-1951, the 16 nations would need \$ 19.1 billion'* (Christopher Booker & Richard North;

2003; 39), merupakan gambaran bagaimana negara-negara Eropa memerlukan dan menyambut dengan antusias bantuan AS, dimana selanjutnya berubah menjadi bergantung kepada AS untuk membenahi perekonomiannya..

#### **4.1.1.3 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd**

a. Pandangan Charles de Gaulle yang dikutip kembali oleh Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd, yang mengatakan '*were they to be U.S. or European? In this period the unequivocal answer of the British was the United States and NATO*' (2003, 33), dapat dikatakan sebagai sebuah penekanan bahwa kedekatan AS dengan Inggris telah menciptakan pengaruh AS terhadap Uni Eropa.

b. Pendapat bahwa '*Without the ability to threaten or undertake military action, the EU was unable to exert sufficient influence on the major parties and powerless to alter the course of events. NATO air strikes, led primarily by the United States, forced a settlement in Bosnia in late 1995 and the peace was enforced by NATO's Implementation Force (IFOR). The EU had been forced to rely on the United States to bring a European conflict to an end*' (2003; 2), dapat dikatakan sebagai suatu kenyataan bagaimana kuatnya pengaruh AS terhadap Uni Eropa. .

c. '*The real concern is that some in the EU, especially France, want to build the EU into a genuine counterweight to the United States. The United States has a historical suspicion of France, believing that France has a different vision of the future. There is enormous hostility to France's alleged intention, its behavior, and its attempt to marginalize the influence of the United States. While the United States took some comfort from the fact that the France vision was a minority view, it believed that France wanted to increase the degree of European military independence from NATO and perhaps compete with the United States*' (2003; 157), dapat merupakan gambaran bagaimana keseriusan AS untuk mensukseskan kepentingannya di Eropa, dan menganggap Prancis dapat menjadi rintangan bagi AS.

#### **4.1.1.4 Pendapat berdasarkan hasil penelitian William Pfaff yang dikutip kembali oleh Nikos Kotzias dan Petros Liacouras.**

Bahwa *'The U.S. is very much focused on Europe as its sole serious economic and political counterweight and potential rival'* (2006; 37), menjelaskan akan pentingnya posisi Eropa bagi AS.

#### **4.1.1.5 Pendapat berdasarkan hasil penelitian David M. Andrew**

Sikap Inggris, dalam politik luar negerinya, berani untuk bertindak sebagai *'a bridge'* antara Eropa dengan AS (David M. Andrews; 2005; 152), memberikan gambaran bagaimana AS memakai Inggris sebagai jembatan untuk mempengaruhi Uni Eropa.

#### **4.1.1.6 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Michael E. Smith**

Pandangan Smith bahwa *'a number of EU states, as well as U.S, are still not in complete agreement about the ultimate purpose of a truly independent European military force and its relationship to NATO'* (2004; 210), dapat dikatakan sebagai gambaran akan ketidakjelasan masa depan kerjasama pertahanan Uni Eropa dan bagaimana AS menjadi salah satu faktor pertimbangan yang berpengaruh atas suksesnya kerjasama pertahanan tersebut.

#### **4.1.1.7 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Dick Leonard**

*'One has been the neutrality of Ireland, which has largely prevented the EU from playing the role of the European end of NATO'* (2005; 260), dapat dikatakan sebagai gambaran Irlandia lebih memilih NATO, dan hal itu merupakan indikasi akan dukungannya terhadap AS.

#### **4.1.1.8 Pendapat berdasarkan hasil penelitian William O. Chittick**

Sikap presiden Clinton yang *'characterized'*-kan kebijakan luar negeri AS, dimana salah satunya adalah *'enlargement, Partnership for Peace and NATO expansion'*, untuk melanjutkan upaya presiden sebelumnya, Carter, Reagan dan Bush, yaitu *'to promote human rights and democracy in Eastern Europe'* (William O. Chittick; 2006; 156), menunjukkan sikap AS yang ingin memperkuat posisi dan pengaruhnya di Eropa.

#### **4.1.1.9 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Zoltan Barany**

*‘NATO – the only international organization in Europe of which the United States was a recognized leader – would continue to be the institution through which the United States could best pursue its interests in Europe. Therefore, NATO expansion would increase Washington’s ability to shape East – Central and Southeastern European political developments and security’* (2003; 14), sebagai sebuah pengakuan bahwa ekspansi AS, melalui NATO, akan meningkatkan kuatnya pengaruh AS di Eropa.

#### **4.1.1.10 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Glyn Morgan**

*‘Indeed, NATO probably remains the best means of dealing with Russia. There is no obvious reason why European political integration would provide the answer to a resurgent Russia’* (2005; 89), merupakan pandangan yang melihat NATO sebagai sarana terbaik untuk menghadapi Rusia.

### **4.1.2 Data penelitian terkait dengan Lebih kuatnya kepentingan nasional masing-masing negara anggota dari pada kepentingan bersama dalam Uni Eropa.**

#### **4.1.2.1 Pendapat berdasarkan hasil penelitian John W. Young dan John Kent**

*‘Wealthy, well – armed West Europeans’* (2004; 638), merupakan gambaran kondisi nyata Uni Eropa, dimana seharusnya Uni Eropa dan Common Foreign and Security Policy-nya mampu mengatasi perang Bosnia, namun ternyata gagal karena Eropa Barat merupakan kumpulan banyak negara yang memiliki kepentingannya masing-masing.

#### **4.1.2.2 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Desmond Dinan**

- a. *‘Mitterrand advocated a permanent secretariat for the conduct of foreign policy cooperation and urged member state to make a common defence effort’* (dalam Desmond Dinan; 2005; 89), menunjukkan bagaimana Prancis terus berupaya mewujudkan ambisinya dengan mengajak agar Uni Eropa membentuk kerjasama pertahanan.

- b. Dalam Uni Eropa terdapat kelompok *‘Europeanists’* dan *‘Atlanticists’* (2005; 587), sebagai indikasi bahwa adanya kepentingan individu negara anggota Uni Eropa menyebabkan terjadinya perpecahan internal Uni Eropa
- c. *‘With its mediation effort in tatters, the EU’s involvement in the Bosnian conflict was reduced to providing humanitarian assistance, although individual member states also sent troops under UN auspices to protect so – called safe areas’* (2005; 591), sebagai gambaran negara-negara anggota lebih mengutamakan kepentingan individunya dari pada kepentingan Uni Eropa..
- d. *‘The possibility of a single EU seat in the United Nations Security Council illustrates the challenge of developing a common foreign policy. If the EU wants to speak with one voice internationally, logically it should have a single seat in the Security Council. But Britain and France, permanent Security Council members, are opposed to that idea’* (2005; 560), sebagai gambaran bagaimana Inggris dan Prancis lebih mengutamakan kepentingannya dari pada kepentingan Uni Eropa.

#### **4.1.2.3 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Marc Trachtenberg**

Pendapat Charles de Gaulle yang dikutip kembali oleh Marc Trachtenberg, *‘continental Europe would eventually be absorbed into a “colossal Atlantic Community, dependent on America and under American control,” and this France would not permit’*, dan dalam hal ini, Jerman mendukung Prancis (dalam David Andrews; 2005; 201), menunjukkan bagaimana Prancis menentang dominasi AS terhadap Eropa, dan sikap Prancis tersebut dapat dikatakan sebagai sikap individu demi kepentingan Prancis.

#### **4.1.2.4 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Michael E. Smith**

- a. *‘Germany’s unilateral recognition of Slovenia and Croatia in December 1991, which took place during the final Maastricht negotiation, was particularly offensive to those who wanted the EU to take a unified stand on the issue of Yugoslavia’* (Crawford; 1996 dalam Michael E. Smith; 2004; 179), merupakan gambaran bagaimana negara anggota Uni Eropa lebih mengutamakan kepentingan individunya dari pada kepentingan Uni Eropa.

b. *‘Event within the EU we can not explain cooperation by focusing primarily on the behaviors of three regional hegemons (France, Germany, and the UK)’* (Michael E. Smith; 2004; 20), menunjukkan bagaimana kepentingan individu ketiga negara besar anggota Uni Eropa tersebut mendominasi Uni Eropa.

c. *‘It is misleading to argue that the EU will never have a common foreign policy as long as it is not a unitary state with centralized decision – making and its own army. As long as the EU remains a collection of states, this comparison is entirely inappropriate’* (2004; 247), dapat diartikan bahwa faktor Uni Eropa sebagai kumpulan banyak negara, berarti banyak kepentingan, merupakan penghalang terbentuknya kerjasama pertahanan Uni Eropa.

d. Pendapat Hagleitner yang dikutip kembali oleh Michael E. Smith *‘The EU’s administration of Mostar revealed how difficult it would be to fund the CFSP’s operations through national means. Nearly a year after the initial Council decision (November 8, 1993) to support operation in part with national contributions, only three EU member states (Denmark, Greece, and Ireland) had contributed to it’* (2004; 216-217), merupakan kenyataan bahwa dalam terdapat ketidak kompak internal Uni Eropa.

#### **4.1.2.5 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Dick Leonard**

a. *‘One has been the neutrality of Ireland, which has largely prevented the EU from playing the role of the European end of NATO’* (2005; 260), dapat dikatakan sebagai gambaran sikap individu Irlandia yang lebih memilih NATO dari pada Uni Eropa.

b. *‘Three of the larger EU member – Germany, France and the UK – have also on occasion been reluctant to subordinate their independent interests to those of the Union’* (2005; 260), merupakan gambaran bagaimana ketiga negara besar anggota Uni Eropa tersebut mengutamakan kepentingan individunya dari pada kepentingan bersama dalam Uni Eropa.

#### **4.1.2.6 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Paul M. Heywood, Erik Jones, Martin Rhodes dan Ulrich Sedelmeier**

*‘For these two states (France and United Kingdom) the EU is more often perceived as a constriction on national foreign policy or simply as a means to amplify national foreign policy. The United Kingdom and France are also often bracketed with Germany as three members of an informal EU foreign policy directoire between whom there needs to be agreement in areas of foreign policy if the EU is to have a coherent collective position’* (2006; 40), merupakan indikasi bagaimana Prancis, Inggris dan Jerman lebih mengutamakan kepentingan individunya dari pada kepentingan Uni Eropa.

#### **4.1.2.7 Pendapat berdasarkan hasil penelitian Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd**

a. *‘The United Kingdom did not support developments that undermined NATO and showed little enthusiasm for majority voting in this area, being clear that decisions should be consensual’* (2003; 41), sebuah refleksi bagaimana Inggris lebih mengutamakan kepentingan individunya dengan lebih memihak NATO.

b. *‘Another fundamental division underlay the discussion. For the France it was prudent for Europe to make preparation independently of the United States’* (2003; 43), mencerminkan bagaimana sikap individu Prancis yang terus mendorong Uni Eropa untuk lepas dari ketergantungannya kepada AS. .

c. *‘France had remained in NATO, but outside the integrated military commands’*, yang kemudian diikuti oleh Spanyol yang sejak tahun 1982 ketika menjadi anggota Uni Eropa (EC waktu itu) tidak mengambil bagian dalam *‘integrated military structure’* (2003; 40), menunjukkan sikap Prancis, kemudian diikuti Spanyol, yang menolak NATO.

d. *‘Denmark had national legislation that did not allow nuclear weapons or foreign troops to be stationed on its territory in peacetime’* (2003; 41),

menunjukkan sikap Denmark yang sangat mengedepankan kepentingan nasionalnya.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Kuatnya pengaruh AS, melalui NATO, terhadap Uni Eropa**

Sebelum AS dan negara-negara Eropa Barat membentuk NATO, kebijakan luar negeri AS terhadap Uni Eropa sebenarnya sudah ada sebelumnya. Pada pasca perang dunia II, perekonomian negara-negara Eropa hampir seluruhnya dilanda resesi ekonomi, dan kondisi tersebut telah membatasi kemampuan negara-negara Uni Eropa (baca Eropa Barat) untuk membangun dan memiliki kekuatan militer. Situasi perekonomian negara-negara Eropa Barat yang sedang mengalami masalah tersebut segera ditanggapi oleh AS, yang kemudian diikuti oleh munculnya inisiatif AS untuk membantu Eropa Barat mengatasi masalah ekonominya, melalui kebijakan luar negeri terhadap Eropa Barat, yang dikenal dengan nama 'the Marshall Plan' (Desmond Dinan; 2005; 18).

Kebijakan AS untuk membantu negara-negara Eropa Barat dalam mengatasi perekonomiannya tersebut, adalah merupakan kelanjutan dari peran yang telah dilakukan oleh AS dalam perang dunia II, yakni ketika AS membantu negara-negara Eropa menghadapi Jerman, dan, dapat dikatakan bahwa hanya dengan bantuan AS-lah sehingga pada perang dunia II negara-negara Eropa Barat berhasil memenangkan perang melawan Jerman. Karena merasa telah berjasa dalam membantu sekutunya negara-negara Eropa mengalahkan Jerman pada perang dunia II, AS kemudian merasa ikut bertanggung jawab untuk ikut dalam melakukan pemulihan perekonomian negara-negara Eropa Barat melalui kebijakan Marshall Plan tersebut.

Namun, kebijakan Marshall Plan AS, bukanlah berarti tanpa syarat, artinya, dibalik bantuan tersebut, AS memiliki strategi jangka panjang tentang kehadirannya di Eropa. Keberhasilan AS dalam mendapatkan kepercayaan dari negara-negara Eropa Barat karena telah berhasil membantu mereka dalam mengalahkan Jerman pada perang dunia II, dapat dikatakan awal yang baik bagi AS dalam upayanya untuk mewujudkan kebijakan luar negerinya terhadap Eropa. Karena, yang pasti, keterlibatan AS dalam perang dunia II untuk membantu negara-negara Eropa Barat bukanlah sesuatu yang gratis, tapi karena adanya kepentingan AS di Eropa.

Disisi lain, bantuan melalui Marshall Plan tersebut dapat dilihat sebagai suatu strategi AS untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat memposisikan negara-negara

Eropa Barat untuk selalu bergantung kepada AS, seperti pengalaman pada perang dunia II dimana negara-negara Eropa sangat bergantung kepada AS untuk mengalahkan Jerman. Adanya pengharapan negara-negara Eropa terhadap bantuan AS untuk memperbaiki perekonomiannya memang kemudian terbukti. Hal ini dapat dilihat ketika sebuah konferensi yang dilaksanakan di Paris pada tanggal 12 Juli 1947, sebagai respon terhadap Marshall Plan, yang dihadiri oleh 16 negara-negara Eropa, untuk membentuk 'the Committee for European Economic Co-operation (CEEC)' yang bertugas merumuskan jumlah bantuan yang dibutuhkan oleh 16 negara tersebut pada periode 1948-1951 (Christopher Booker & Richard North; 2003; 39)

Sebelum Marshall Plan muncul, pada tahun yang sama, sudah ada paket bantuan AS kepada negara-negara Eropa, khususnya kepada Turki dan Yunani, yang dikenal dengan 'the Truman Doctrine', dimana kemudian Truman Doctrine serta Marshall Plan inilah yang sering diidentifikasi sebagai awal dari perang dingin (William O. Chittick; 2006; 127). Paket bantuan melalui Truman Doctrine ini lebih kepada adanya kekhawatiran AS terhadap tindakan komunis yang dipimpin oleh Uni Sovyet ketika itu, yang sangat agresif dalam menyebarkan pengaruhnya, khususnya terhadap Turki dan Yunani (Christopher Booker & Richard North; 2003; 38).

Bila melihat bagaimana 16 negara-negara Eropa Barat membentuk 'the Committee for European Economic Co-operation (CEEC)' sebagai respon terhadap bantuan AS melalui Marshall Plan (Christopher Booker & Richard North; 2003; 39) dan Truman Doctrine (William O. Chittick; 2006; 127), maka kondisi internal negara-negara Eropa Barat sampai tahap bantuan AS melalui Marshall Plan dan Truman Doctrine masih menunjukkan adanya 'kesamaan dan keseragaman' bahwa memang mereka benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Karena negara-negara Eropa Barat ketika itu memang sedang mengalami masalah ekonomi dan juga menghadapi ancaman Uni Sovyet yang sudah menjangkau Turki dan Yunani saat itu. Dan sangat masuk akal apabila belum adanya perbedaan pandangan ataupun sikap menolak negara-negara Eropa Barat ketika itu terhadap strategi kebijakan luar negeri AS untuk hadir di Eropa melalui bantuan Marshall Plan dan Truman Doctrine.

Isu-isu komunis, sesuatu yang menjadi kekhawatiran AS, telah berperan menciptakan suatu kondisi lain yang menguntungkan AS, atau dapat disebut sebagai 'pembenaran' selanjutnya bagi AS untuk lebih menguatkan pengaruh dan kehadirannya di Eropa. Melalui isu-isu komunis, AS memberikan 'lampu tanda bahaya baru' kepada negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat, bahwa ada

ancaman komunis dari Uni Sovyet. Strategi melalui isu-isu ancaman dari komunis tersebut dapat dikatakan memang penting untuk dimunculkan oleh AS bila ingin tetap mempertahankan pengaruh dan kehadirannya di Eropa. Karena tanpa adanya isu-isu yang dapat memunculkan semacam ancaman terhadap seluruh negara-negara Eropa Barat, maka sudah pasti mereka tidak akan membutuhkan kehadiran AS di Eropa. Terutama bila masalah perekonomian negara-negara Eropa Barat sudah pulih.

Harapan AS akan adanya suatu kondisi dimana negara-negara Eropa Barat masih akan terus bergantung kepada kehadiran AS di Eropa dengan adanya isu-isu ancaman dari komunis Uni Sovyet tersebut, akhirnya dapat terwujud dengan munculnya kesepakatan antara AS dengan beberapa negara Eropa Barat, seperti Belgia, Kanada, Prancis, Iceland, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Denmark, Portugal, dan Inggris untuk membentuk dan mewujudkan suatu kerjasama pertahanan melalui the North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada tanggal 4 April 1949 (Alasdair Blair; 2006; 243). Negara-negara yang terlibat dalam pembentukan NATO tersebut sepakat bahwa pembentukan NATO, sebagai sebuah aliansi militer, didesain untuk menjaga keamanan Eropa terhadap ancaman serangan dari Uni Sovyet (John W. Young & John Kent; 2004; 126-127 dan Glyn Morgan; 2005; 150).

Bila merujuk kepada pendapat Mark Trachtenberg dalam David M. Andrews yang mengatakan bahwa NATO adalah sebagai “instrument of American domination”(2005; 230), maka kehadiran NATO sebagai penjaga keamanan negara-negara Eropa Barat merupakan keberhasilan strategi AS untuk memiliki suatu instrument yang sah dan melibatkan negara-negara Eropa, sebagai kepanjangan tangannya dalam mengendalikan Eropa Barat. Kehadiran NATO sebagai penjaga keamanan Eropa Barat telah membuat cengkeraman AS terhadap kawasan tersebut semakin kuat. Disisi lain, ada semacam kesan bahwa negara-negara Eropa Barat membiarkan dan merelakan dirinya maupun lingkungannya untuk berada dibawah kendali AS. Walaupun hal itu dapat juga merupakan suatu keuntungan bagi mereka karena tidak perlu membagi konsentrasi untuk mengurus masalah keamanan, tetapi bisa lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi mereka yang memang sangat terpuruk waktu itu pasca perang dunia II.

Bila melihat jumlah negara-negara Eropa Barat yang terlibat langsung pada pembentukan awal NATO, yaitu hanya sembilan negara, diluar AS dan Kanada, maka dapat memberikan pengertian bahwa kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa Barat ketika itu, secara eksplisit, belum sepenuhnya disetujui oleh seluruh negara-negara

Eropa Barat. Hal ini sangat berbeda dengan situasi ketika bantuan AS melalui Marshall Plan yang secara serentak ditanggapi positif oleh enam belas negara dengan melakukan konferensi di Paris (Christopher Booker & Richard North; 2003; 39). Artinya, terdapat perbedaan respon negara-negara Eropa Barat terhadap dua kebijakan AS terhadap Eropa tersebut, dimana kebijakan berupa bantuan ekonomi melalui Marshall Plan lebih banyak yang menyetujuinya dari pada bantuan militer melalui NATO. Dari sudut pandang jumlah negara yang setuju, maka negara-negara Eropa ketika itu lebih merasa 'nyaman' untuk menerima bantuan ekonomi dari pada bantuan keamanan.

Ketika sembilan negara Eropa Barat disibukan oleh pembentukan NATO, pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu pada tanggal 5 Mei 1949, sepuluh negara Eropa terlibat dalam penandatanganan 'the Statute of the Council of Europe' di London (Christopher Booker & Richard North; 2003; 44). Pada waktu yang hampir bersamaan tersebut, dua momen penting telah dilakukan oleh negara-negara Eropa, yaitu, disatu sisi mereka mengakui keterlibatan AS, melalui NATO, secara sah untuk menjaga keamanan Eropa Barat, di sisi lain mereka juga secara aktif berupaya untuk membentuk integrasi Eropa. Dari dua peristiwa penting di atas, menunjukkan suatu indikasi akan adanya sikap yang berlawanan satu sama lain yang ada dalam tubuh Eropa Barat saat itu. Walaupun demikian, paling tidak, pada waktu itu negara-negara Eropa Barat sudah menunjukkan adanya keinginan dan semangat untuk berintegrasi untuk mengelola masalah mereka secara bersama-sama. Pada sesi diskusi kedua, sikap Inggris dan Skandinavia terhadap pandangan kelompok federalists Eropa tersebut dapat dikatakan tidak sejalan. Perbedaan cara pandang antara Inggris dengan negara-negara yang tergabung dalam kelompok federalists Eropa tentang mekanisme kerja the Council of the Europe, membuat timbul perpecahan, terutama dari pihak Inggris dan Skandinavia yang menentang untuk berintegrasi (Christopher Booker & Richard North; 2003; 45).

Sikap Inggris yang sering berseberangan dengan negara-negara Eropa lainnya, khususnya dengan Prancis, tergambar jelas bagaimana aplikasi Inggris baru dapat diterima menjadi anggota European Economic Community (EEC) pada tahun 1970, dan itupun merupakan aplikasi yang ketiga, setelah dua aplikasi sebelumnya ditolak oleh Charles de Gaulle, presiden Prancis waktu itu, dan resmi menjadi anggota pada tanggal 1 Januari 1973 (Christopher Booker & Richard North; 2003; 102, 158). Munculnya sikap yang bertentangan antara Inggris dan Prancis tersebut lebih didasari

oleh adanya posisi Inggris, yang dalam pandangan de Gaulle, lebih dekat ke AS dari pada ke Eropa.

Pandangan de Gaulle tentang bagaimana kedekatan hubungan antara AS dengan Inggris, didukung oleh beberapa pendapat, diantaranya disampaikan oleh Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd, yang mengatakan ‘were they to be U.S. or European? In this period the unequivocal answer of the British was the United States and NATO’ (2003, 33). Ataupun pandangan Sir Anthony Eden, menteri luar negeri Inggris pada tahun 1952, yang dikutip kembali oleh Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd, tentang hubungan Inggris dengan Eropa, mengatakan ‘can be expressed by prepositions, but the preposition “with” but not “of” – we are with them, but not of them’ (2003; 32, 33). Berbagai pandangan diatas dapat diartikan bahwa internal negara-negara anggota EEC ketika itu sudah ada perpecahan, khususnya antara Prancis dengan Inggris, terkait kehadiran dan peran AS, melalui NATO, di Eropa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa sebagai penjaga keamanan telah menimbulkan sikap pro dan kontra antara negara-negara anggota EEC (EEC merupakan cikal bakal Uni Eropa).

Dalam perkembangannya, dengan melihat adanya sikap Inggris yang lebih mementingkan hubungannya dengan AS dari pada dengan EEC, telah menimbulkan dilema bagi negara-negara Eropa mengingat Inggris adalah juga anggota EEC. Kondisi ini dapat memberikan pengertian bahwa EEC ketika itu tidak akan pernah bisa menolak kehadiran AS, melalui NATO, sebagai penjaga keamanannya, dengan alasan bahwa Inggris, yang sudah merasa nyaman dan aman oleh kehadiran NATO, lebih yakin bahwa kepentingan nasionalnya akan lebih memungkinkan dan optimal untuk dicapai apabila keamanan Eropa dipercayakan kepada AS, melalui NATO, dari pada penjagaan keamanan dilakukan sendiri oleh EEC. Dan, sangat mungkin bahwa Inggris akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa, sekalipun hal itu mungkin akan membuat Inggris dikucilkan oleh negara-negara Eropa Barat lainnya.

Gagasan-gagasan untuk membentuk kerjasama pertahanan bersama negara-negara Eropa Barat sudah pernah ada sebelumnya walaupun masih bersifat himbuan atau kesepakatan bilateral ataupun multilateral antara beberapa negara. Salah satu diantaranya adalah ketika pada bulan Mei 1984, Presiden Perancis, Mitterrand menyampaikan sebuah sambutan yang terkenal kepada Parlemen Eropa yang mengajak reformasi institusional dan memperbesar kompetensi hubungan internal

maupun eksternal, dan Mitterrand menyokong pembentukan “permanent secretariat” untuk melaksanakan kerjasama kebijakan luar negeri dan mendesak negara-negara anggota untuk membentuk upaya pertahanan bersama (Desmond Dinan; 2005; 89). Namun himbauan Mitterrand tersebut belum mampu mendorong dan tidak mendapat tanggapan negara-negara Eropa Barat untuk bersatu dan membangun kerjasama pertahanan bersama.

Bila melihat kembali alasan utama dibentuknya NATO, yaitu untuk melindungi negara-negara Eropa Barat dari serangan komunis Uni Sovyet, maka salah satu momen yang paling mungkin bagi Uni Eropa untuk mewujudkan keinginannya lepas dari ketergantungannya kepada NATO dalam menjaga keamanan Eropa Barat adalah ketika berakhirnya perang dingin pada tahun 1989 dan kemudian diikuti oleh runtuhnya Uni Sovyet pada tanggal 25 Desember 1991 Uni Sovyet bubar (William O. Chittick, 2006, 154). Dengan runtuhnya Uni Sovyet dan bubarnya Pakta Warsawa, maka secara logika, ancaman militer yang ditimbulkan oleh Uni Sovyet terhadap negara-negara Eropa Barat, dimana namanya kemudian berubah menjadi Uni Eropa pada tahun 1991 (Alasdair Blair; 2006; 292), sudah tidak ada lagi, sehingga kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa sebagai penjaga keamanan sudah tidak relevan lagi. Dan hal ini memberikan pengertian bahwa Uni Eropa sudah tidak lagi memerlukan kehadiran AS, melalui NATO. Oleh karena itu dan seharusnya AS, melalui NATO, melakukan peninjauan kembali terhadap peran awalnya ketika dibentuk, yaitu untuk menjaga keamanan Eropa dari ancaman militer komunis Uni Sovyet.

Namun bila melihat bagaimana presiden Clinton ‘characterized’ kebijakan luar negeri AS ketika ia mengambil alih kursi kepresidenan, dimana salah satunya adalah ‘enlargement, Partnership for Peace and NATO expansion’, untuk melanjutkan upaya presiden sebelumnya, Carter, Reagan dan Bush, yaitu ‘to promote human rights and democracy in Eastern Europe (William O. Chittick; 2006; 156), maka perkiraan secara logika bahwa kehadiran NATO sebagai penjaga keamanan Eropa Barat dari ancaman militer komunis Uni Sovyet sudah tidak relevan lagi karena Uni Sovyet sudah hancur dan berarti ancaman komunis sudah tidak ada lagi, ternyata tidak benar. Kebijakan AS terhadap Uni Eropa pasca runtuhnya Uni Sovyet tersebut telah membuktikan bahwa berbagai kebijakan luar negeri AS terhadap Eropa, seperti diantaranya Marshall Plan, Truman Doctrine maupun pembentukan NATO, termasuk isu-isu ancaman militer dari komunis Uni Sovyet, hanyalah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan kepentingan nasional AS di Eropa.

Kekuatan cengkeraman AS terhadap Eropa melalui NATO telah membuat negara-negara anggota Uni Eropa tidak berdaya untuk ‘mengusir’ NATO dari Eropa. Namun, faktor yang paling berperan dibalik masih hadirnya AS, melalui NATO, di Eropa adalah karena AS sendiri belum memiliki niat untuk menarik diri dari kawasan Eropa, sekalipun ancaman komunis Uni Sovyet sudah tidak ada. Artinya, Eropa masih merupakan sasaran penting kebijakan luar negeri AS, seperti pendapat yang disampaikan oleh William Pfaff dalam Nikos Kotzias dan Petros Liacouras, yaitu ‘The U.S. is very much focused on Europe as its sole serious economic and political counterweight and potential rival (2006; 37).

Kondisi internal Uni Eropa sendiri dimana posisi Inggris, sebagai salah satu dari ‘the big three’ dalam Uni Eropa selain Jerman dan Prancis, yang memiliki ‘special relationship’ dengan AS (David Andrews; 2005; 75-76), memiliki peran kuat atas munculnya ‘ketidakberdayaan’ Uni Eropa dalam menghadapi kekuatan cengkeraman AS, melalui NATO. Dalam arti, kebijakan Inggris, disatu pihak telah menyatakan keberpihakannya lebih condong kepada AS dari pada Uni Eropa, juga selalu berusaha memposisikan diri ‘in between’ antara AS dan Uni Eropa, dimana Inggris secara tegas mengatakan bahwa Inggris, dalam politik luar negerinya, berani untuk bertindak sebagai ‘a bridge’ antara Eropa dengan AS (David M. Andrews; 2005; 152). Kebijakan Inggris tersebut telah memperjelas suatu gambaran akan alasan, disatu sisi, mengapa muncul semacam ‘sikap pasrah’ Uni Eropa untuk tetap berada di bawah naungan perlindungan AS, melalui NATO. Disisi lain, semakin kuatnya posisi tawar AS, melalui NATO, untuk tetap hadir di Eropa, sekalipun ancaman komunis Uni Sovyet sudah tidak ada lagi.

Terkait ekspansi AS, melalui NATO, ke negara-negara bekas anggota pakta warsawa, sudah barang tentu ekspansi tersebut akan memberikan keuntungan bagi AS. Disamping faktor kebijakan AS tersebut diatas, maka terdapat faktor lain yang membuat kebijakan luar negeri AS terhadap Eropa ‘merambah’ ke bekas negara-negara anggota pakta warsawa, yaitu adanya hubungan yang tidak harmonis antara Prancis dengan Inggris maupun antara Prancis dengan AS.

Merupakan suatu kenyataan bahwa Prancis selalu memandang Inggris sebagai sesuatu yang menghambat bagi kemandirian Uni Eropa untuk menjaga keamanannya sendiri dengan alasan bahwa Inggris memiliki special relationship dengan AS sehingga. Perbedaan ataupun rivalitas antara Prancis dan Inggris tersebut dapat merupakan sebagai gambaran akan adanya persaingan kepentingan nasional antara

kedua negara besar anggota Uni Eropa. Prancis merasa tidak bisa ‘menikmati’ kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa memang sejak awal menghendaki agar Uni Eropa mandiri dalam menjaga keamanannya dan lepas dari ketergantungannya kepada AS. Dan Prancis tidak senang melihat Inggris yang memposisikan diri sangat dekat dengan AS. Sedangkan dari sudut pandang kepentingan Inggris, dengan keberadaan ‘special relationship-nya’ dengan AS, maka kehadiran AS, melalui NATO, yang memegang peran utama dalam menjaga keamanan Uni Eropa, akan dianggap sebagai hal yang lebih menguntungkan dan dapat menjamin kepentingan nasionalnya. Sebagai salah satu dari the big three, maka peran yang dimiliki Inggris akan mampu memberikan pengaruh kuat terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam CFSP. Dengan alasan tersebut, maka AS akan lebih memilih Inggris sebagai ‘jembatan’ untuk mewujudkan kebijakannya terhadap Uni Eropa. Kondisi rivalitas yang terjadi dan berlarut antara kedua negara tersebut sudah pasti akan mempengaruhi dan mengelompokkan negara-negara kecil anggota Uni Eropa lainnya menjadi kelompok ‘Prancis’ dan kelompok ‘Inggris’.

Terjadinya pengelompokkan dalam Uni Eropa merupakan keuntungan bagi AS, karena kondisi yang demikian dengan sendirinya akan menciptakan hubungan yang tidak harmonis internal sesama negara-negara anggota Uni Eropa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa cukup hanya dengan mengontrol beberapa negara saja maka AS akan dapat menciptakan ketidakkompakan internal Uni Eropa. Dengan terjadinya pengelompokkan dalam Uni Eropa, maka sudah pasti akan menimbulkan kesulitan bagi Uni Eropa untuk mendapatkan kesepakatan yang bulat dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanan yang mereka telah bentuk dalam rangka untuk mengelola keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya pada NATO.

Pasca runtuhnya Uni Sovyet mendapat tanggapan serius oleh Uni Eropa, dengan alasan bahwa inilah momen yang paling tepat bagi Uni Eropa untuk secara mandiri mengelola urusan keamanan Eropa maupun internasional, dan memang Uni Eropa kemudian membentuk the Common Foreign and Security Policy (CFSP) pada tahun 1993 (Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd; 2003; 1-2 dan Michael E. Smith; 2004; 176, 190). Munculnya kesepakatan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membentuk CFSP tersebut, bila dilihat dari sudut pandang sebagai suatu reaksi terhadap runtuhnya Uni Sovyet, maka hal itu merupakan suatu tindakan yang tepat dan berani. Dikatakan tepat, karena dengan keruntuhan Uni Sovyet maka ancaman militer yang ditakutkan oleh negara-negara Eropa Barat selama ini sudah tidak ada

lagi, sehingga negara-negara anggota Uni Eropa tidak lagi membutuhkan kehadiran AS, melalui NATO, untuk menjaga keamanan mereka. Dikatakan berani karena tindakan tersebut dapat dikatakan semacam unjuk kekuatan dan sikap memberontak ataupun dapat merupakan tindakan ‘pengusiran’ AS, melalui NATO dari Eropa. Namun, bila melihat masih adanya perbedaan-perbedaan cara pandang dan kepentingan internal Uni Eropa terkait siapa yang harus menjaga keamanan Uni Eropa, maka tindakan pembentukan CFSP tersebut merupakan sebuah ambisi yang hanya sekedar didorong oleh faktor ‘runtuhnya Uni Sovyet’, sehingga perlu segera membentuk suatu kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa.

Perbedaan-perbedaan mendasar internal Uni Eropa harus diakui memang masih ada, katakanlah, seperti apa yang dikatakan oleh Michael E. Smith, *‘a number of EU states, as well as U.S, are still not in complete agreement about the ultimate purpose of a truly independent European military force and its relationship to NATO’* (2004; 210). Ataupun sikap netral Irlandia yang tidak menghendaki EU memainkan peran yang mengakhiri peran NATO, dan juga negara-negara Eropa seperti Norwegia, Iceland dan Turki sebagai anggota NATO tetapi bukan anggota Uni Eropa (Dick Leonard; 2005; 260). Ditambah lagi persaingan kepentingan antara Inggris dan Prancis, dua negara besar anggota Uni Eropa. Dan demikian juga sikap unilateral Jerman yang mengakui kemerdekaan Slovenia dan Kroasia pada bulan Desember 1991 dianggap melawan posisi Uni Eropa yang menginginkan untuk mengambil posisi bersatu terhadap isu-isu Yugoslavia (Michael E. Smith; 2004; 179). Pernyataan yang disampaikan oleh Inggris lebih meyakinkan lagi bahwa negara tersebut lebih mengutamakan NATO, yaitu melalui diungkapkan yang disampaikan oleh perdana menteri Inggris waktu itu, John Major, yang dikutip kembali Christopher Booker dan Richard North, *‘we ensured a safer Europe, and we reaffirmed the primacy of NATO; we set the framework of a stronger and more coherent European foreign policy, in which our national independence of action is assured’* (2003; 276).

Berbagai masalah internal Uni Eropa diatas merupakan hambatan yang akan sangat sulit untuk diselesaikan, karena hal itu terkait dengan kepentingan nasional masing-masing negara, seperti yang disampaikan oleh Desmond Dinan, yaitu *‘National Sovereignty remain a formidable barrier to the development of a truly common foreign policy* (2005; 560). Sehingga, dalam tubuh Uni Eropa terdapat dua sikap yang berlawanan satu sama lain, yaitu, disatu sisi, adanya sebagian negara-negara anggota yang menghendaki dan merasa sangat membutuhkan adanya

kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa sehingga mampu mandiri dalam untuk mengelola keamanannya sendiri, apalagi ancaman Uni Sovyet sudah tidak ada. Dan disisi lain, negara-negara anggota Uni Eropa tersebut sangat menyadari akan kuatnya kepentingan nasional masing-masing telah menimbulkan perbedaan cara pandang diantara mereka terkait keinginan untuk mewujudkan kerjasama pertahanan bersama. Dua sikap yang terjadi dalam Uni Eropa tersebut dapat dikatakan merupakan penghambat utama untuk mewujudkan kerjasama pertahanan bersama, pasca runtuhnya Uni Sovyet, sekalipun sudah ada CFSP. Memang akan sangat sulit memahami bagaimana Uni Eropa bisa memiliki dan mewujudkan keinginannya untuk membentuk suatu kerjasama pertahanan bersama padahal masih ada masalah-masalah penting diantara mereka yang sulit diselesaikan.

Ujian pertama yang dihadapi oleh kerjasama pertahanan Uni Eropa melalui CFSP adalah ketika perang Yugoslavia meletus, khususnya perang Bosnia Herzegovina pada tahun 1995. Bagi Uni Eropa, perang Yugoslavia memiliki dua makna, yaitu, *pertama*, keberadaan Yugoslavia, dimana secara geographi, merupakan bagian dari Eropa. Artinya, bahwa perang Yugoslavia adalah juga merupakan ‘perangnya’ Eropa karena terjadi di Eropa, sehingga secara langsung akan memberikan pengaruh kepada seluruh negara-negara Eropa, khususnya Uni Eropa. Uni Eropa seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan perang Yugoslavia, karena hal itu terkait dengan ‘kebesaran’ nama Uni Eropa yang sudah terkenal dan mampu memainkan perang penting dalam politik internasional. Sehingga kebesaran nama Uni Eropa akan merupakan jaminan mutu terhadap penyelesaian perang Yugoslavia. *Kedua*, dengan adanya Yugoslavia sebagai bagian dari Eropa, maka A.S. sangat mempersilahkan Uni Eropa sendiri untuk menyelesaikan masalah perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, seperti yang disampaikan oleh John W. Young dan John Kent,

*“The U.S. was anxious to limit its own overseas commitments and still fearful of “another Vietnam”, so that Secretary of State Baker publicly declared “we don’t have a dog in this fight”. Washington was keen to see the EC play a leading role in Bosnia and the Community’s creation of a Common Foreign and Security Policy (CFSP) under the February 1992 Maastricht Treaty led to real hopes of concerted action by the wealthy, well Armed West European” (2004; 638).*

Namun, kenyataan yang terjadi adalah Uni Eropa melalui CFSP tidak mampu berbuat banyak dan gagal memanfaatkan ‘kebaikan dan kesempatan’ yang diberikan oleh AS tersebut, yang telah mengijinkan Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah internal rumah tangga Uni Eropa, yakni perang Yugoslavia. Ataupun Uni Eropa

telah gagal membuktikan bahwa mereka telah siap untuk mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO. Demikian juga pendapat senada yang disampaikan oleh Jacques Poos, Menteri Luar Negeri Luxembourg dan kemudian memimpin the EC Council of Ministers, yang dikutip kembali oleh John W. Young dan John Kent, *'If one problem can be solved by the Europeans it is Yugoslav problem.....It is not up to anyone else'* (2004; 638).

Kegagalan Uni Eropa dalam menyelesaikan perang Yugoslavia lebih disebabkan oleh ketidakmampuan Uni Eropa sendiri, seperti yang disampaikan oleh Trevor C. Salmon & Alistair J. K. Shepherd, yaitu

*'Without the ability to threaten or undertake military action, the EU was unable to exert sufficient influence on the major parties and powerless to alter the course of events. NATO air strikes, led primarily by the United States, forced a settlement in Bosnia in late 1995 and the peace was enforced by NATO's Implementation Force (IFOR). The EU had been forced to rely on the United States to bring a European conflict to an end'* (2003; 2).

Munculnya ketidakmampuan Uni Eropa dalam menyelesaikan perang Yugoslavia dan kembali bergantung kepada campur tangan dan pertolongan AS, melalui NATO, telah mengecilkan arti keberadaan CFSP dimata A.S. maupun anggota NATO lainnya. Memang patut dipertanyakan kesungguhan dan kemampuan Uni Eropa untuk mewujudkan suatu kerjasama pertahanan bersama melalui CFSP, apabila menyelesaikan perang Yugoslavia saja, khususnya perang Bosnia, yang terletak di jantung Eropa, tidak mampu untuk diselesaikan, apalagi untuk menghadapi konflik yang lebih besar, seperti kejadian pada perang dunia II. Yang jelas, keinginan Uni Eropa untuk tidak tergantung lagi pada AS, melalui NATO, dan mandiri dalam menjaga keamanannya, tidak cukup hanya dengan membentuk CFSP, karena ternyata keberadaan CFSP-pun tidak cukup efektif dalam memecahkan masalah seperti perang Yugoslavia, apalagi untuk menjaga keamanan Uni Eropa, baik itu dalam konteks menjaga keamanan kawasan Eropa ataupun keamanan individu negara-negara anggotanya.

Kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa telah membagi Uni Eropa, atau kawasan tersebut, kedalam kelompok Atlantists dan kelompok Europeanists (Desmond Dinan; 2005;587), dimana kedua kelompok tersebut memiliki pandangan yang berbeda, bahkan dapat dikatakan, berlawanan satu sama lain. Terbaginya Uni Eropa menjadi dua kelompok tersebut tidak terlepas dari adanya cara pandang dan pemahaman yang berbeda antara negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya antara

Inggris dengan Prancis, tentang keuntungan yang mereka bisa peroleh atas kehadiran NATO tersebut, atau dengan kata lain, karena adanya kepentingan nasional yang berbeda satu sama lain.

Bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang merasa kepentingan nasionalnya lebih terjamin dengan kehadiran NATO tersebut, sudah tentu akan mendukung kehadiran NATO di Eropa tersebut, dan akan terus berupaya agar NATO tetap hadir di Eropa sebagai penjaga keamanan Uni Eropa. Negara yang masuk dalam kelompok Atlantists adalah Inggris, Belanda dan Portugal, dimana menurut Desmond Dinand, negara-negara ini merupakan *'staunch NATO supporters – traditionally shied away from initiatives that might weaken, or appear to weaken, the Atlantic alliance'* (2005;587).

Dipihak lain, kelompok Europeanists, seperti Prancis termasuk Jerman, memiliki sikap yang berbeda dengan kelompok Atlanitsts, oleh Desmond Dinan, dikatakan bahwa,

*'Europeanists countries – notable France – argued the contrary case, making the old point that a stronger European pillar would bolster the alliance and the new point that with the end of the Cold War, Europe needed to develop its own defence organization because the United States was bound to reduce its military involvement on the continent'* (2005; 587).

Dalam hal ini, pendapat Desmond Dinan tersebut dapat diartikan bahwa AS akan mengurangi kekuatannya di Eropa terkait dengan runtuhnya Uni Sovyet, tidak melihat kebijakan ekspansi AS ke bekas negara-negara anggota pakta warsawa sebagai sesuatu 'memperkuat' kekuatan militer AS di Eropa. Artinya, pendapat Desmond Dinan tersebut akan memiliki pemahaman yang berbeda apabila ekspansi ke negara-negara bekas pakta warsawa tersebut diartikan sebagai penambahan kekuatan AS, melalui NATO, di Eropa.

Namun bila merujuk kepada kenyataan, bahwa kebijakan luar negeri AS, melalui NATO, telah melakukan ekspansi ke negara-negara bekas anggota paktawarsawa pasca perang dingin, maka perkiraan Prancis bahwa AS akan mengurangi kekuatannya di Eropa pasca perang dingin hanya didasari oleh kenyataan bahwa Prancis menghendaki Eropa untuk memiliki kerjasama pertahanan sendiri, atau dapat dikatakan karena adanya rasa 'ketidaknyamanan' Prancis terhadap kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa. Pandangan Prancis tersebut memang sangat beralasan bila melihat alasan sesungguhnya pembentukan NATO, yaitu sebagai

pelindung Uni Eropa terhadap ancaman militer komunis Uni Sovyet. Karena, logikanya, NATO harus segera mundur dari Eropa dan menyerahkan penjagaan keamanan Uni Eropa kepada Uni Eropa sendiri, setelah ancaman dari Uni Sovyet sudah tidak ada lagi.

Dalam sudut pandang Prancis, bahwa dengan berakhirnya perang dingin, sehingga Uni Eropa perlu membangun organisasinya sendiri, dapat merupakan sebuah ajakan bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang tergolong mendukung kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa, untuk lebih memihak kepada kepentingan Uni Eropa. Dapat dikatakan bahwa Prancis melihat pasca perang dingin adalah merupakan peluang yang sangat baik bagi Uni Eropa untuk melepaskan ketergantungannya kepada AS, melalui NATO, dalam menjaga keamanannya sendiri, mengingat Uni Sovyet sudah hancur, atau dapat diartikan bahwa Uni Eropa sedang tidak menghadapi ancaman dari manapun. Sehingga Prancis melihat tidak ada lagi alasan bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang selama ini menunjukkan 'loyalitasnya' dengan mendukung kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa, hanya karena adanya ancaman militer komunis Uni Sovyet, untuk tetap mempertahankan loyalitasnya kepada AS, melalui NATO, tersebut. Disini Prancis melihat sudah saatnya untuk mengalihkan loyalitasnya kepada Uni Eropa dan membangun kerjasama pertahanan bersama.

Hubungan antara Prancis, termasuk beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, dengan AS, khususnya pada era pemerintahan presiden Charles de Gaulle, tidaklah harmonis. Seperti yang diungkapkan oleh Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd,

*'The real concern is that some in the EU, especially France, want to build the EU into a genuine counterweight to the United States. The United States has a historical suspicion of France, believing that France has a different vision of the future. There is enormous hostility to France's alleged intention, its behavior, and its attempt to marginalize the influence of the United States. While the United States took some comfort from the fact that the France vision was a minority view, it believed that France wanted to increase the degree of European military independence from NATO and perhaps compete with the United States' (2003; 157).*

Bagi AS sendiri, karena memang memiliki kepentingan di Eropa, merasa penting untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota Uni Eropa, sehingga kehadiran dan selama berperan menjaga keamanan di Eropa, melalui NATO, dapat berjalan dengan baik, dalam arti, tidak harus berhadapan dengan negara-negara anggota Uni Eropa dari kelompok Europeanists. Dan strategi yang dipakai oleh AS

untuk mendapatkan dukungan dari dalam Uni Eropa adalah dengan membangun persahabatan dengan negara-negara tertentu anggota Uni Eropa yang dianggap mendukung kehadirannya di Eropa, melalui NATO, misalnya seperti Inggris dan negara-negara yang tergabung dalam kelompok Atlantists Desmond Dinan; 2005;587). Dengan adanya strategi AS terhadap Uni Eropa yang demikian, telah menimbulkan perpecahan internal Uni Eropa kedalam kelompok Atlantists, yang mendukung AS dan kelompok Europeanists, yang menentang AS.

Kelompok Atlantists yang ‘dibentuk’ oleh AS memang berhasil menciptakan suatu kondisi dalam Uni Eropa yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga upaya untuk mewujudkan kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa selalu menemui kesulitan. Disamping memang kelompok Atlantists merasa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan AS, sehingga tetap mendukung kehadiran AS di Eropa. Kelompok Atlantists yang mendukung kehadiran AS, melalui NATO, sebagai penjaga keamanan Uni Eropa, memang dapat memberikan bukti ketika terjadi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995. Karena, pada perang Bosnia tahun 1995, hanya karena bantuan AS, melalui NATO-lah, perang tersebut dapat diselesaikan, karena, seperti yang disampaikan oleh Desmond Dinan *‘The EU could neither take nor threaten to take military action, although individual member could’* (2005; 590).

Bagi kelompok Atlantists yang mendukung kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa sudah tentu memiliki alasan, paling tidak, karena memang sudah memiliki hubungan yang baik, sehingga dalam pandangan kelompok Atlantists akan lebih menguntungkan apabila AS, melalui NATO, tetap sebagai penjaga keamanan Uni Eropa. Disamping itu, terdapat pandangan lain yang mengatakan bahwa sejak NATO dibentuk dalam rangka menghadapi ancaman Uni Sovyet sampai dengan runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991, kawasan Eropa, khususnya Uni Eropa bebas dari konflik militer, atau dapat dikatakan, dalam lima puluh tahun terakhir Eropa berada dalam keadaan aman (Glyn Morgan; 2005; 89). Apalagi, dengan runtuhnya Uni Sovyet, yang merupakan ancaman yang ditakutkan oleh Uni Eropa sebelumnya, sudah tidak ada lagi. Sehingga sangat wajar bila sebagian negara anggota Uni Eropa atau kelompok Atlantists merasa tidak perlu lagi Uni Eropa membentuk kerjasama pertahanan bersama.

Disamping itu, kelompok Atlantists berpikir bahwa belum ada lagi ancaman terhadap Uni Eropa, seperti ancaman Uni Sovyet dahulu, yang memerlukan

diwujudkan kerjasamanya pertahanan bersama Eropa. Dalam pandangan kelompok Atlantists, untuk apa menghabiskan konsentrasi dan anggaran yang banyak hanya untuk membangun sebuah kekuatan militer untuk mendukung terwujudnya kerjasama pertahanan bersama untuk menjaga keamanan Uni Eropa, apabila ternyata sudah ada kekuatan yang telah siap dan telah terbukti berhasil menciptakan perdamaian di Eropa selama lebih kurang lima puluh tahun terakhir, yaitu NATO. Seandainya pun keberadaan Rusia saat ini dianggap sebagai ancaman bagi Uni Eropa saat ini (Glyn Morgan; 2005; 89), walaupun pada kenyataannya Rusia belum dianggap sebagai ancaman saat ini, maka kekuatan yang paling mungkin dan siap untuk menghadapinya adalah AS, melalui NATO, dan bukan Uni Eropa. Dengan alasan bahwa perang Yugoslavia saja, khususnya perang Bosnia, Uni Eropa melalui CFSP-nya tidak mampu mengatasinya, apalagi menghadapi kekuatan militer Rusia, yang tentunya persoalannya akan jauh lebih rumit dari pada perang Yugoslavia.

Adanya pandangan kelompok Atlantists bahwa akan lebih baik bila AS, melalui NATO, tetap hadir di Eropa, dapat juga digambarkan sebagai suatu sikap yang mau menerima kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Uni Eropa untuk melaksanakan kerjasama pertahanan bersama selama ini selalu mengalami kegagalan. Sehingga kelompok Atlantists dapat dikatakan lebih realistis menyangkut untuk apa meneruskan upaya tersebut apabila hasilnya akan tetap sama, yaitu gagal. Disisi lain dari sikap realistis kelompok Atlantists ini adalah, sekalipun mereka juga memiliki keinginan untuk mewujudkan kerjasama pertahanan tersebut, apakah AS akan mau memberikan toleransi dan menyetujui sikap tersebut. Bukankah lebih baik untuk membiarkan AS, melalui NATO, untuk terus menjaga keamanan Uni Eropa, karena hal tersebut, pada kenyataannya, tidak merugikan kepentingan nasional mereka, bahkan mereka bisa menggunakan anggaran, yang seyogianya digunakan untuk keperluan membangun kekuatan militer, untuk kepentingan nasional lainnya, seperti membangun ekonomi. Besarnya resiko yang muncul bila 'berseberangan' dengan Prancis dan negara-negara lainnya yang masuk dalam kelompok Europeanists akan lebih kacil bila dibandingkan bila melawan kebijakan AS. Seperti contoh pada kasus perang Bosnia, dimana peran Prancis telah dianggap gagal dan bantuan AS, melalui NATO, berhasil menyelesaikan perang tersebut.

Resiko yang muncul bila sampai AS keluar dari Eropa harus diperhitungkan dengan cermat oleh negara-negara kelompok Atlantists. Karena bila sampai terjadi, kerugian yang terjadi bagi Uni Eropa bukan saja terkait dengan keamanan, tetapi juga

pada masalah ekonomi, mengingat hubungan ekonomi antara AS dengan Uni Eropa sudah berjalan baik selama ini (Desmond Dinan; 2005; 609, 610). Bahkan, hal yang lebih buruk yang bisa terjadi pada Uni Eropa apabila mencoba untuk memposisikan diri sebagai pesaing AS dalam hubungan internasional. Karena dengan kekuatan militer dan ekonomi serta kemampuan diplomasi yang dimiliki AS saat ini, hampir mustahil bagi Uni Eropa untuk mampu bersaing dan mensejajarkan diri dengan AS, bahkan bisa kalah bersaing dengan negara-negara bekas kelompok pakta warsawa yang telah dan sedang direkrut oleh AS, melalui NATO, untuk menjadi anggota NATO.

Karena, demi untuk mempertahankan kepentingannya di Eropa, maka bila sampai AS dan NATO ditolak oleh Uni Eropa, maka aliansi barunya di Eropa Timur dan Tengah akan menjadi tumpuan AS dalam melanjutkan dominasinya di Eropa. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Zoltan Barany,

*'NATO – the only international organization in Europe of which the United States was a recognized leader – would continue to be the institution through which the United States could best pursue its interests in Europe. Therefore, NATO expansion would increase Washington's ability to shape East-Central and Southeastern European political developments and security' (2003; 14).*

Salah satu faktor yang harus dikorbankan oleh negara-negara kelompok Atlantists tersebut adalah bahwa 'kedaulatan' negara mereka masing-masing sudah tentu akan terintervensi oleh kebijakan AS. Artinya, bahwa negara-negara kelompok Atlantists harus bersedia apabila AS ikut mengatur kebijakan pertahanan mereka, sekalipun hal tersebut mengandung unsur paksaan dari AS, namun harus diterima sebagai suatu kenyataan akan harga yang harus dibayar karena kesediaan mereka untuk menerima AS, melalui NATO, untuk menjaga keamanan mereka maupun Eropa secara umum. Dan, harga yang paling buruk yang harus dibayar oleh negara-negara kelompok Atlantists ini adalah AS dapat menggunakan 'jasa' NATO sebagai penjaga keamanan mereka untuk meningkatkan posisi tawar AS terhadap kelompok Atlantists maupun Uni Eropa secara keseluruhan. Sebagai contoh adalah pada kasus perang Bosnia tahun 1995, dimana PBB, yang didukung Inggris, ketika itu memberlakukan embargo senjata terhadap Serbia untuk mencegah suplai senjata Rusia terhadap Serbia, namun kemudian melibatkan AS yang datang dengan kebijakan 'lift and strikes'-nya, artinya, embargo senjata dicabut dan dilakukan air strike (John W. Young dan John Kent; 2004; 638). Kebijakan AS tersebut memberikan suatu gambaran bahwa, oleh karena diminta untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan

masalah Bosnia, maka semua negara, termasuk Inggris sekalipun, harus mengikuti kebijakan yang diambil AS, yaitu kebijakan ‘lift and strikes’.

Dengan melihat akan keberhasilan AS, melalui NATO, dalam menciptakan kondisi aman dan tanpa adanya konflik militer di Eropa pada lima puluh tahun terakhir yakni pada era perang dingin, serta pembuktian bahwa hanya dengan melibatkan AS, melalui NATO, sehingga perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995 dapat diatasi, maka sangat masuk akal apabila kelompok Atlantists berpendapat bahwa apakah perlu membentuk kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa apabila Uni Eropa sendiri sudah aman oleh kehadiran AS, melalui NATO, untuk menjaga keamanan mereka. Dengan alasan tersebut, maka keinginan Uni Eropa untuk mewujudkan suatu kerjasama pertahanan bersama melalui CFSP yang dimilikinya saat ini, masih dan akan terus menimbulkan perdebatan yang panjang dan dalam internal Uni Eropa.

#### **4.2.2 Lebih kuatnya kepentingan nasional masing-masing negara anggota dari pada kepentingan bersama dalam Uni Eropa.**

Dalam sejarah Eropa, khususnya sejarah perang dunia I dan perang dunia II, negara-negara besar seperti Prancis, Jerman dan Inggris, merupakan negara-negara yang selalu muncul sebagai aktor utama (P. K Ojong; 2003). Pada perang dunia I, Prancis, Inggris dan Jerman muncul sebagai aktor utama yang mewarnai bahkan menentukan sejarah tersebut, mulai dari awal sampai berakhirnya perang. Dan pada perang dunia I tersebut Jerman muncul sebagai inisiator, yaitu pihak yang memulai perang, namun kemudian Prancis dan Inggris muncul sebagai pemenang perang (P. K Ojong; 2003; 17). Demikian juga dengan perang dunia II, Jerman sekali lagi muncul sebagai pihak yang memulai perang, dimana pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang negara-negara Eropa (P. K Ojong; 2003; viii dan L. W. Gerhard; 2005; 9-13).

Khusus dalam perang dunia II, yang memunculkan Jerman sebagai aggressor, banyak negara-negara kecil yang muncul sebagai korban, baik karena terlibat secara langsung dalam perang maupun hanya sebagai korban perang, seperti antara lain negara-negara Skandinavia, Belanda, dan Luxembourg (P. K Ojong; 2003). Negara-negara yang tergolong ‘kecil’ tersebut tidak berdaya menghadapi situasi perang yang melibatkan negara-negara the big three tersebut. Padahal negara-negara kecil tersebut tidak memiliki kepentingan yang mengharuskan mereka untuk terlibat dalam

perang dunia II. Atau dapat dikatakan, bahwa negara-negara kecil tersebut telah menjadi korban konflik kepentingan negara-negara besar yang terlibat dalam bentuk perang dunia II tersebut.

Dalam perang tersebut, negara-negara besar Eropa bersekutu satu sama lain, termasuk di dalamnya AS, sehingga berhasil mengalahkan Jerman. Tetapi, bagi negara-negara kecil, mereka tidak peduli terhadap siapapun yang memenangkan peperangan, apakah itu Jerman ataupun sekutu, karena dampak dari perang tersebut pada akhirnya akan merugikan mereka. Demikian juga dengan negara-negara yang berhadapan dalam perang, mereka juga tidak pernah memikirkan akan dampak dari perang yang mereka lakukan terhadap negara-negara kecil. Hanya satu hal yang muncul dalam pemikiran aktor-aktor utama yang terlibat dalam perang tersebut, yaitu bagaimana memenangkan perang dan menguasai negara-negara yang kalah dalam perang. Sebagai contoh, adalah kekalahan Jerman dari Prancis pada perang dunia I, dimana kemudian muncul Perseutan Versailles yang isinya yang menghukum Jerman dengan melarang untuk mengembangkan angkatan bersenjata hingga cukup besar untuk mengancam lagi perdamaian Eropa, serta diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada negara-negara sekutu pemenang perang, namun ternyata dilanggar oleh Jerman, bahkan, Jerman merasa tidak dikalahkan dalam perang, malah merasa dihianati oleh Perseutan Versailles (Ojong, P. K; 2003; xxvii – xxviii). Sikap Jerman yang tidak mau membayar ganti rugi tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak peduli dengan negara yang telah menjadi korban dalam perang.

Disisi lain, negara-negara sekutu pemenang perang menekan Jerman hanya untuk membayar ganti rugi kepada mereka (Ojong, P. K; 2003; xxix). Padahal masih banyak negara-negara lain yang turut menjadi korban perang tersebut yang lebih layak untuk mendapatkan ganti rugi, namun tidak mendapatkannya. Sikap negara-negara sekutu tersebut sama saja dengan sikap Jerman, yaitu ketidakpedulian kepada negara-negara lain yang telah menjadi korban perang dunia I tersebut.

Dengan adanya sikap Jerman dan negara-negara sekutu yang demikian, secara tidak langsung, telah membangun rasa tidak percaya, ketakutan, ataupun pemisah antara negara-negara besar yang menjadi aktor utama dengan negara-negara kecil yang menjadi korban perang.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada pasca perang dunia II, dimana era perang dingin dimulai, negara-negara besar yang berperan sebagai aktor utama dalam sejarah perang dunia I dan perang dunia II tersebut, Inggris, Prancis dan Jerman,

muncul kembali sebagai penguasa Uni Eropa, atau lebih dikenal sebagai *'the big three'* (Michael E. Smith; 2004; 20 dan Desmond Dinan; 2005; 600). Ketiga negara tersebut kembali terlibat dalam persaingan dalam Uni Eropa, khususnya persaingan kepentingan antara Prancis dan Inggris. Kedua negara yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam Uni Eropa tersebut, karena didorong oleh ambisi dan kepentingan nasionalnya masing-masing, selalu berusaha untuk menanamkan pengaruhnya terhadap negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dan ingin tampil sebagai pemimpin Uni Eropa. Persaingan yang muncul antara kedua negara tersebut, telah menggiring seluruh negara-negara anggota Uni Eropa untuk terbagi ke dalam kelompok *Europeanists* dan kelompok *Atlantists* (Desmond Dinan; 2005;587).

Salah satu contoh yang memperlihatkan bagaimana negara-negara kecil anggota Uni Eropa menunjukkan 'keraguan' terkait kebijakan yang ada dalam CFSP, adalah, seperti yang diungkapkan oleh Michael E. Smith yang mengatakan bahwa *'one of the objectives of the Union was to assert its identity on the international scene, which could include more cooperation in defence matters'*, ditentang oleh Denmark, Irlandia, Belanda, Portugal, termasuk Inggris (2004; 182). Penentangan terhadap kebijakan tersebut, khususnya yang dilakukan oleh Denmark, Irlandia, Belanda dan Portugal, dapat dilihat sebagai suatu alasan untuk menghindari terlibat dalam isu-isu yang mengedepankan kerjasama pertahanan Uni Eropa dalam panggung internasional. Ataupun, dapat dikatakan sebagai perwujudan akan adanya sikap 'keraguan' untuk terlibat dalam masalah-masalah kerjasama pertahanan, karena dibayangi oleh rasa trauma dari pengalaman perang dunia I maupun perang dunia II.

Negara-negara kecil anggota Uni Eropa menyadari sepenuhnya akan dampak yang dapat menimpa negara mereka bila sampai negara-negara yang tergolong kekuatan-kekuatan utama Eropa tersebut terlibat kembali dalam perang oleh karena faktor kepentingan nasional masing-masing yang tersembunyi dibalik CFSP. Dengan adanya rasa trauma oleh pengalaman masa lalu, negara-negara yang tergolong kecil tersebut masih belum percaya ataupun masih diliputi ketakutan untuk menyerahkan masalah-masalah pengelolaan keamanan dalam negerinya dilaksanakan oleh Uni Eropa sendiri. Karena, bila sampai Uni Eropa dibiarkan untuk mengelola keamanannya sendiri dan lepas dari pantauan AS, melalui NATO, maka hal itu sama saja dengan memberikan kesempatan kepada negara-negara yang telah menjadi aktor utama dalam perang dunia I maupun perang dunia II untuk mengelola, bukan saja

keamanan negara-negara yang tergolong kecil tersebut, tetapi juga mengendalikan seluruh kepentingan nasional mereka.

Khusus bagi Irlandia, salah satu negara tergolong kecil anggota Uni Eropa dan merupakan negara netral, secara tegas mengatakan, seperti yang diungkapkan oleh Dick Leonard, *'One has been the neutrality of Ireland, which has largely prevented the EU from playing the role of the European end of NATO'* (2005; 260). Sikap Irlandia tersebut dapat merupakan suatu gambaran bahwa Irlandia tidak percaya kepada Uni Eropa, dan lebih percaya kepada NATO untuk mengelola keamanan Uni Eropa dari pada dikelola oleh Uni Eropa. Sikap demikian dapat diartikan bahwa Irlandia tidak melihat negara-negara besar anggota Uni Eropa akan memberikan peluang bagi negara-negara yang tergolong kecil dan lemah untuk sukses dan berhasil dalam mencapai kepentingan nasionalnya, bahkan sebaliknya, mereka pasti akan selalu lebih mengutamakan kepentingan nasional mereka masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat yang diungkapkan oleh Dick Leonard, *'Three of the larger EU member – Germany, France and the UK – have also on occasion been reluctant to subordinate their independent interests to those of the Union'* (2005; 260).

Sikap Irlandia dan tiga negara besar anggota Uni Eropa tersebut, dapat dikatakan telah memperjelas kondisi sebenarnya ketiga negara besar anggota Uni Eropa tersebut yang lebih mengutamakan nasional masing-masing dan akan selalu berusaha untuk mempertahankan sikap hegemony mereka. Kondisi tersebut juga merupakan gambaran bagaimana tingkat saling percaya diantara negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya antara 'three larger EU member' dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang lebih kecil lainnya. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa antara sesama negara anggota Uni Eropa melihat satu sama lainnya sebagai sebuah 'ancaman' terhadap kepentingan nasionalnya. Sehingga, dengan adanya kenyataan akan rendahnya tingkat saling percaya diantara mereka, maka akan sangat sulit untuk mempersatukan kepentingan nasional dari tiap-tiap negara tersebut kedalam satu kepentingan bersama dalam Uni Eropa yang berkaitan dengan kerjasama pertahanan diantara mereka.

Dengan menyadari sepenuhnya akan sulitnya, atau mungkin hampir tidak bisa, mempersatukan kepentingan nasional terkait kerjasama pertahanan diantara mereka, maka negara-negara tertentu anggota Uni Eropa, termasuk Inggris yang memang

merupakan sahabat AS, lebih yakin kepentingan nasionalnya akan terjamin apabila AS, melalui NATO, yang menjaga keamanan Eropa.

Pasca runtuhnya Uni Sovyet tahun 1991, bagi negara-negara besar anggota Uni Eropa, terutama Prancis yang memang sangat berambisi untuk membentuk kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa dan lepas dari perlindungan AS, melalui NATO, merupakan kesempatan yang baik untuk membentuk, dan memang akhirnya berhasil membentuk CFSP pada tahun 1993. Namun, tidak demikian bagi negara-negara kecil sesama anggota Uni Eropa. Ambisi Prancis untuk mewujudkan kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa, ditanggapi secara ‘dingin’, dan seakan-akan membiarkan Prancis ‘berjalan sendiri’. Walaupun demikian, sikap dingin tersebut tidak diungkapkan secara ekstrim ataupun secara eksplisit, karena pada akhirnya kerjasama pertahanan Uni Eropa dalam CFSP dapat dibentuk.

Sekalipun CFSP akhirnya dapat dibentuk, tapi dalam pelaksanaannya belum efektif dan dapat dikatakan belum mampu memenuhi harapan, khususnya negara-negara yang sangat menginginkan terwujudnya kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa. Atau dengan kata lain, implementasi CFSP masih menemui kendala. Ketidak efektifan CFSP dapat dilihat ketika Uni Eropa tidak mampu menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995, padahal, AS sudah mempersilahkan Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah sesama negara Eropa tersebut (John W. Young dan John Kent; 2004; 638).

Kegagalan dalam mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995, dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang memberikan gambaran yang jelas tentang ketidak kompakannya yang terjadi dalam Uni Eropa, khususnya yang terkait dengan bagaimana mengimplementasikan CFSP untuk menyelesaikan perang tersebut. Beberapa negara anggota Uni Eropa malahan tampil dengan lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya dari pada kepentingan bersama Uni Eropa melalui CFSP. Jerman dapat diambil sebagai contoh, dimana atas inisiatif sendiri, Jerman dengan segera mengakui kemerdekaan Kroasia, dan demikian juga dengan Yunani yang keberatan mengakui Macedonia (Desmond Dinan; 2005; 590). Tindakan kedua negara tersebut, telah menyeleweng dari harapan Uni Eropa untuk memiliki sikap bersatu dalam menghadapi masalah Yugoslavia.

Munculnya ‘ketidak kompakannya’ internal Uni Eropa dalam menghadapi perang Yugoslavia, dimana seharusnya Uni Eropa muncul dengan satu kebijakan bersama melalui CFSP yang mereka telah bentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama,

dapat dinilai sebagai suatu ‘wujud sikap saling tidak percaya’ antara satu sama lainnya dalam tubuh Uni Eropa, terutama terkait dengan kerjasama pertahanan. Bila merujuk kepada pendapat yang disampaikan Desmond Dinan, yang mengatakan ‘*The member states reluctance to use force not only limited their policy options but also hindered the development of an EU “defence identity” during the early years of the CFSP’s existence*’ (2005; 592), maka kondisi tingkat saling kepercayaan antara sesama anggota Uni Eropa telah memunculkan keraguan apakah terbentuknya CFSP adalah benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama oleh seluruh negara anggota Uni Eropa. Artinya, apakah terbentuknya CFSP merupakan hasil kesepakatan seluruh negara anggota berdasarkan ‘one country one vote’, ataukah munculnya CFSP tersebut dilatarbelakangi oleh suatu keterpaksaan karena adanya paksaan dan tekanan dari ambisi dan kepentingan the big three Uni Eropa, Jerman, Inggris dan Prancis.

Bila melihat pengalaman perang dunia I dan perang dunia II, dimana the big three Uni Eropa ketika itu, Prancis, Inggris dan Jerman, saling bersaing antara satu sama lain untuk memenangkan perang, maka sikap saling tidak percaya diantara mereka, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang wajar. Dan hal tersebut dapat dilihat ketika ketiga negara tersebut, dengan mengatasnamakan Uni Eropa, terlibat dalam upaya penyelesaian perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995. Munculnya pendapat Desmond Dinan, yang mengatakan ‘*The Yugoslavia crisis was a salutary sharing sovereignty in the sensitive areas of security and defence*’ (2005; 592), dapat merupakan suatu gambaran bagaimana krisis tingkat saling percaya intern Uni Eropa yang pada akhirnya menghasilkan ketidakefektifan kerjasama pertahanan bersama, yang telah mereka sepakati dalam CFSP, dalam menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995.

Bila dalam mengatasi masalah perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, yang merupakan bagian dari Eropa, CFSP tidak mampu menyelesaikannya, maka akan sangat wajar apabila muncul rasa pesimis terkait sejauh mana komitmen dan keseriusan setiap negara anggota Uni Eropa untuk secara berani menyesuaikan, dalam arti mengorbankan kepentingan nasionalnya untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam Uni Eropa. Karena, bila menyimak pendapat yang disampaikan oleh Paul M. Heywood, Erik Jones, Martin Rhodes dan Ulrich Sedelmeier,

*'For these two states (France and United Kingdom) the EU is more often perceived as a constriction on national foreign policy or simply as a means to amplify national foreign policy. The United Kingdom and France are also often bracketed with Germany as three members of an informal EU foreign policy directorate between whom there needs to be agreement in areas of foreign policy if the EU is to have a coherent collective position' (2006; 40),*

maka dapat dikatakan bahwa sikap Prancis dan Inggris, termasuk Jerman, menunjukkan bagaimana kebijakan Uni Eropa secara umum hanya mengakomodir kebijakan luar negeri ketiga negara tersebut. Walaupun memang kebijakan ketiga negara tersebut cenderung melalui pintu Uni Eropa, atau mengatasnamakan Uni Eropa, tetapi kebijakan mereka belum berarti mewakili kebijakan setiap negara anggota lainnya, namun hanya mewakili kepentingan mereka saja. Bahkan bisa saja tidak sama, khususnya dengan negara-negara yang lebih kecil.

Contoh yang menunjukkan bagaimana ketiga negara tersebut memiliki kepentingan dan alasan yang berbeda dengan negara-negara lain sesama negara anggota Uni Eropa, khususnya dalam kasus perang Yugoslavia, adalah, seperti yang diungkapkan oleh Desmond Dinan,

*'The failure of the CFSP with regard to the Yugoslav wars became even more evident in April 1994 with the establishment of the Contact Group, consisting of Britain, France, Germany, Russia, and the United States, to "manage" the Yugoslav situation. Although the three EU member states in the Group (later joined by Italy) supposedly represented the EU, in fact they were included because of their size and influence and represented only themselves. The establishment of the Contact Group and the lack of formal EU membership in it harked back to the old days of great-power politics and caused considerable resentment among other member states, specially those (such as the Dutch) with sizable contingents of troops in Bosnia' (2005; 591).*

Tindakan sepihak the big three anggota Uni Eropa tersebut, disatu sisi karena memiliki kepentingan sendiri untuk tampil menonjol dalam menyelesaikan krisis Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, mengingat bagi Inggris dan Prancis, karena keberadaan kedua negara tersebut sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Namun disisi lain, tindakan mereka dapat juga didasari oleh pemikiran bahwa bila melibatkan seluruh negara anggota Uni Eropa maka akan menyita waktu yang banyak sebelum sampai pada suatu keputusan, karena setiap negara anggota akan memiliki kepentingan serta kemampuan pendekatan yang berbeda.

Disamping itu, ketiga negara besar Uni Eropa tersebut, memiliki alasan yang berbeda satu sama lain dalam melakukan pendekatan untuk menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia. Seperti yang diungkapkan oleh Desmond Dinan,

*'The impossibility of sending large numbers of Germany troops to Yugoslavia was a more pertinent legacy for the EU of recent Balkan European History. Britain's "Northern Ireland Syndrome" made the government in London extremely cautious about intervening militarily in Yugoslavia apart from providing limited humanitarian assistance under UN auspices. Of the EU's three "great powers", only France appeared willing to take some form of military action, but not alone. The member states' reluctance to use force not only limited their policy options but also hindered the development of an EU "defence identity" during the early years of the CFSP's existence' (2005; 592).*

Dengan adanya perbedaan alasan yang digunakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa dalam 'melihat dan menyelesaikan' perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, telah menempatkan tingkat kepercayaan diantara mereka akan semakin rendah. Seperti Jerman dengan pengalaman masa lalunya yang tidak harmonis dengan Serbia, khususnya pada perang dunia I, ketika Raja Ferdinand dari Austria-Hungaria yang merupakan sekutu dekat Jerman terbunuh di Bosnia dan melibatkan Serbia. Sehingga, dapat dikatakan, bukti yang menunjukkan bahwa Jerman masih terpengaruh sejarah masa lalu tersebut adalah ketika dengan cepat Jerman mengakui keberadaan Kroasia sebagai sebuah negara yang lepas dari Yugoslavia (Desmond Dinan; 2005; 592).

Sedangkan bagi Inggris, kasus Irlandia Utara, sebagai bagian dari Inggris, merupakan 'duri dalam daging' yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya, mengingat Irlandia Utara masih dalam proses berjuang untuk lepas dari Inggris. Dan kasus Irlandia Utara ini juga yang membuat Inggris sangat hati-hati untuk melakukan intervensi militer di Yugoslavia. Inggris perlu memperhitungkan strategi terbaik yang dapat digunakan untuk terlibat dalam penyelesaian perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, agar kasus Irlandia Utara tidak sampai diinternasionalisasikan oleh pihak-pihak lain. Karena bila sampai kasus Irlandia Utara dijadikan sebagai sebuah kasus yang 'memerlukan ataupun mengfharuskan campur tangan' masyarakat internasional, khususnya PBB, maka kredibilitas Inggris dimata masyarakat internasional akan jatuh dan kepercayaan kepada Inggris sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi akan runtuh.

Terkait dengan Prancis, karena memang tidak memiliki masalah yang tidak baik seperti Jerman dalam perang dunia I dan perang dunia II maupun ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri seperti yang terjadi pada Inggris atas masalah Irlandia Utara, memiliki kebebasan untuk memilih tindakan yang paling cocok sesuai

kepentingannya untuk mencari penyelesaian atas perang Yugoslavia, tetapi Prancis tidak mau jika hanya dilakukan sendirian.

Kondisi yang terjadi pada ketiga negara besar Uni Eropa tersebut, bukan saja sebagai bukti ketidak efektifan Uni Eropa melalui CFSP dalam menangani krisis Yugoslavia, tetapi juga melemahkan pandangan AS terhadap kesiapan Uni Eropa dan keefektifan CFSP (Desmond Dinan; 2005; 592). Pengaruh yang paling buruk yang bisa terjadi pada internal Uni Eropa terkait ketidakefektifan Uni Eropa dalam perang Yugoslavia adalah munculnya sikap yang mengesampingkan rasa kebersamaan sebagai sesama negara anggota Uni Eropa dan ketidak patuhan terhadap kebijakan bersama yang telah disepakati melalui CFSP dalam menangani krisis Yugoslavia. Tiap negara anggota akan berjalan sesuai kepentingannya masing-masing, dan akan melakukan aliansi dengan negara lain, termasuk aliansi dengan negara di luar Uni Eropa, menurut strategi yang mereka anggap paling cocok. Sehingga hanya negara-negara tertentu saja, yang memang memiliki kemampuan, dapat memainkan peran penting, seperti yang dilakukan oleh tiga negara besar Uni Eropa yang masuk dalam 'Contact Group'.

Bagi negara anggota yang lebih kecil, dengan ketidakefektifan yang ditunjukkan Uni Eropa melalui CFSP dalam menangani perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, ataupun dengan melihat bagaimana sikap ketiga negara besar Uni Eropa yang berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan mereka masing-masing, maka hal tersebut dapat dikatakan, telah memperbesar rasa ketidakpercayaan mereka terhadap kemampuan Uni Eropa, dan CFSP, ataupun memperdalam keraguan terhadap ketulusan ketiga negara besar tersebut bertindak benar-benar demi kepentingan bersama seluruh negara anggota Uni Eropa tersebut. Adanya keraguan terhadap kemampuan Uni Eropa dan CFSP maupun terhadap ketiga negara besar tersebut dapat juga diartikan sebagai telah menimbulkan keraguan tentang sejauhmana Uni Eropa dan CFSP maupun ketiga negara besar anggota Uni Eropa tersebut mampu mendukung kepentingan nasional negara-negara anggota lainnya, terutama negara-negara anggota yang lebih kecil.

Contoh yang dapat dilihat adalah adanya sikap Jerman, atas inisiatif sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri, yang memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Kroasia dan lepas dari Yugoslavia, seperti yang disampaikan oleh *Desmond Dinan 'Undoubtedly, Germany's support for Croatian independence in 1991 jogged memories of Nazi support for fascist Croatia fifty years previously...'*

(2005; 590). Tindakan Jerman tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena tidak sejalan dengan kebijakan Uni Eropa yang tetap menginginkan Yugoslavia bersatu, seperti yang dikatakan oleh Christopher Booker dan Richard North, *'Since the whole purpose of this Council was to discuss building a new federal government for "Europe", the Twelve could hardly be expected to welcome the idea of another federation collapsing'*, seiring dengan ungkapan yang disampaikan oleh president of the European Council, Luxembourg's prime minister Jacques Santer, ketika berbicara kepada jurnalis, yang dikutip kembali oleh Christopher Booker dan Richard North, *'We have to try all means to save the Federation'* (2003; 268).

Penyimpangan lain yang dilakukan oleh negara anggota Uni Eropa terhadap kebijakan Uni Eropa yang mendukung tetap bersatunya Yugoslavia adalah, seperti yang disampaikan oleh Desmond Dinan, bahwa *With its mediation effort in tatters, the EU's involvement in the Bosnian conflict was reduced to providing humanitarian assistance, although individual member states also sent troops under UN auspices to protect so – called safe areas* (Desmond Dinan; 2005; 591). Sehingga peran yang dimainkan oleh negara-negara tertentu Uni Eropa dalam menyelesaikan perang Yugoslavia tersebut bersifat ganda, artinya, mengatasnamakan Uni Eropa dan PBB.

Terjadinya kondisi yang demikian dalam tubuh Uni Eropa terkait krisis Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, sebagai cermin dari ketidak loyalan seluruh negara anggota terhadap kesepakatan mereka sendiri untuk bertindak dengan mengatasnamakan dan memberikan kewenangan kepada Uni Eropa, melalui CFSP dalam mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia.. Sedangkan disisi lain, terlihat dengan jelas adanya ketidak mampuan Uni Eropa dalam mengendalikan kepentingan seluruh anggotanya untuk tunduk kepada setiap kebijakan bersama yang diambil oleh Uni Eropa maupun dalam mendukung CFSP. Dengan demikian, kehadiran CFSP sebagai wujud kerjasama Uni Eropa sebagai satu suara dalam dunia internasional menjadi sangat diragukan dan apakah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memang memiliki keinginan yang sama untuk membangun Uni Eropa yang mandiri. Karena dalam kasus Yugoslavia, negara-negara anggota Uni Eropa sama sekali tidak memperlihatkan adanya keinginan kuat dalam diri setiap negara anggota untuk lebih mengutamakan kepentingan bersama dalam Uni Eropa. Dalam pengertian, semua negara anggota harus tunduk dan mendukung serta mengutamakan kepentingan bersama mereka dalam Uni Eropa. Seharusnya, perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada diantara mereka sudah terangkum

menjadi satu selama proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dan strategi Uni Eropa dalam menangani Krisis Yugoslavia.

Dari sudut pandang lain, disini terlihat adanya keraguan setiap negara anggota untuk kehilangan 'kedaulatan' mereka bila sampai Uni Eropa tampil layaknya sebagai sebuah 'negara' dimana seluruh elemen nasional setiap negara anggota harus mendukung kebijakan bersama yang diambil oleh Uni Eropa. Munculnya keraguan untuk mengesampingkan 'kedaulatan' setiap negara anggota, dan disisi lain muncul keinginan untuk memunculkan Uni Eropa sebagai satu suara dalam politik internasional, adalah merupakan dua hal akan sangat sulit disatukan. Sehingga sangat sulit memahami bagaimana mungkin Uni Eropa memiliki keinginan untuk membentuk CFSP bila ternyata 'kedaulatan' tiap-tiap negara anggota Uni Eropa akan selalu melekat dan ikut terbawa dalam setiap proses dan pengambilan kebijakan Uni Eropa.

Dalam kasus ini, dapat dilihat adanya faktor kesengajaan yang dibuat oleh negara-negara anggota Uni Eropa untuk membatasi kedaulatan dan kewenangan yang diberikan kepada CFSP, dalam rangka untuk menciptakan 'celah' yang dapat digunakan oleh negaranya masing-masing untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dan hal tersebut sangat masuk akal apabila melihat keberadaan CFSP yang hanya bersifat intergovernmental dimana keputusannya berdasarkan '*consensus only*' (Michael E. Smith; 2004; 213). Sehingga, dengan adanya kenyataan, yakni terbatasnya kedaulatan yang diberikan oleh setiap negara anggotanya kepada Uni Eropa, maka akan sangat dipahami apabila Uni Eropa, melalui CFSP, tidak mampu mengatasi krisis Yugoslavia, khususnya perang Bosnia.

Bila melihat kondisi negara-negara anggota Uni Eropa, dimana John W. Young dan John Kent menggambarkannya sebagai '*wealthy, well – armed West Europeans*' (2004; 638), maka faktor yang menjadi kelemahan dibalik kegagalan CFSP dalam mengatasi perang Yugoslavia bukanlah karena masalah ekonomi ataupun kekuatan militer. Apalagi posisi geographi Yugoslavia yang terletak di Eropa dan merupakan bagian dari Eropa, dimana kondisi tersebut seharusnya menjadi sebuah kemudahan bagi Uni Eropa dalam hal penguasaan dan pengendalian seluruh situasi yang terjadi di Yugoslavia. Namun dengan berbagai kondisi yang menguntungkan tersebut, dimana seharusnya memungkinkan Uni Eropa mampu memainkan perannya secara optimal dalam menyelesaikan krisis Yugoslavia,

khususnya perang Bosnia, ternyata disia-siakan dan tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh Uni Eropa.

Bila kenyataan yang berada dibalik kegagalan Uni Eropa dalam menyelesaikan krisis Yugoslavia bukanlah oleh faktor ekonomi dan faktor kekuatan militer, maka pendapat yang disampaikan oleh Michael E. Smith, yaitu,

*'it is misleading to argue that the EU will never have a common foreign policy as long as it is not a unitary state with centralized decision – making and its own army. As long as the EU remains a collection of states, this comparison is entirely inappropriate' (2004; 247),*

dapat merupakan suatu pembenaran alasan mengapa Uni Eropa, melalui CFSP belum efektif, khususnya atas kegagalan yang dialami di Yugoslavia. Karena, menurut Michael E. Smith *'We should also keep in mind that most states are not always able to coordinate all of their external policies in all areas of the world effectively; thus, we should not expect this of the EU'* (2004; 247). Pendapat yang disampaikan Michael E. Smith disini dapat dikatakan sebagai sebuah penegasan bahwa CFSP tidak akan pernah mampu memainkan perannya secara efektif karena adanya faktor Uni Eropa sebagai kumpulan banyak negara. Artinya, menyatukan kepentingan semua negara anggota Uni Eropa kedalam suatu kebijakan bersama dalam CFSP adalah merupakan hal yang sangat sulit diwujudkan, bahkan bisa saja tidak akan pernah terwujud. Oleh karenanya, Smith melihat bahwa harus ada sikap 'perlu memaklumi' atas ketidak efektifan CFSP, termasuk kegagalannya dalam mengatasi krisis Yugoslavia, khususnya perang Bosnia.

Terkait kegagalan Uni Eropa, melalui CFSP dalam mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, pandangan yang diberikan oleh Smith yaitu,

*'The EU's difficulties here have often been cited as a major deficiency of the CFSP, as it failed to use its economic leverage over Yugoslavia effectively before it broke up, failed to coordinate its recognition of the separate republics when dissolution seemed imminent, and then failed to stop the violence following dissolution', sebagai sebuah fakta yang terekam (2004; 195-196),*

dapat merupakan sebuah pengakuan akan tidak adanya kesamaan dan kesatuan pandangan seluruh negara anggota Uni Eropa tentang strategi implementasi CFSP yang tepat untuk menyelesaikan krisis Yugoslavia.

Walaupun kemudian Michael E. Smith menyampaikan alasan, yakni, pertama *'it should be kept in mind that the CFSP was not explicitly designed for stopping nationalist violence on the scale that took place in the Balkans'*, dan kedua *'The*

*collapse of Yugoslavia was a major challenge not only to the EU but also to the UN, NATO, and their member states*' (2004; 196), namun, bila memang Uni Eropa serius ingin membuktikan akan kemampuan CFSP, maka seharusnya Uni Eropa melihat kasus Yugoslavia sebagai suatu tantangan yang harus sukses di selesaikan. Karena, AS sendiri sudah mempersilahkan Uni Eropa untuk membuktikan CFSP-nya apakah mampu menyelesaikan krisis Yugoslavia (John W. Young dan John Kent; 2004; 638). Sehingga, alasan yang disampaikan oleh Michael E. Smith tersebut adalah sesuatu yang ingin 'mengkerdilkan' kemampuan CFSP dan ingin mengelak dari kenyataan bahwa CFSP maupun Uni Eropa sendiri belum bisa memberikan bukti akan harapan yang ada dalam CFSP dengan kenyataan yang dialami dalam kasus Yugoslavia.

Terkait dengan kebijakan AS terkait dengan 'its own overseas commitments' dan akan adanya kekhawatiran tentang 'another Vietnam' sehingga AS tidak ingin melibatkan diri dalam penyelesaian perang Yugoslavia (John W. Young dan John Kent; 2004; 639), dapat dikatakan dimaknai sebagai suatu strategi AS untuk melihat apakah Uni Eropa memang sudah siap dan serius untuk mengelola keamanannya sendiri. Disisi lain, kebijakan yang diambil oleh AS yang mendorong Uni Eropa, melalui CFSP-nya, untuk mengatasi perang Yugoslavia tersebut, dapat memberikan pemahaman yaitu tidak terlepas dari adanya keinginan Uni Eropa untuk menjadi 'counterbalancing' bagi AS dibalik ide awal yang memungkinkan Uni Eropa memiliki 'common EU foreign policy', yaitu, bahwa negara-negara anggota 'must speak with one voice internationally' (Desmond Dinan; 2005; 559). Kebijakan yang mempersilahkan Uni Eropa untuk bertindak menyelesaikan krisis Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, dapat merupakan arena dimana AS ingin melihat apakah Uni Eropa memang memiliki kemampuan untuk mewujudkan ambisinya dan memposisikan diri sebagai pesaing AS, yang ketika itu merupakan super power tunggal, sejak runtuhnya Uni Sovyet tahun 1991.

Prestasi yang diperlihatkan oleh Uni Eropa, melalui CFSP, dalam menangani krisis Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, pada akhirnya memang terbukti bahwa Uni Eropa belum mampu dan tidak layak untuk memposisikan diri sebagai pesaing AS dalam hubungan internasional. Artinya, kondisi internal Uni Eropa masih menghadapi kendala yang serius untuk mampu bertindak sebagai 'one voice', sekalipun kasus yang dihadapi adalah perang Yugoslavia, yang merupakan bagian dari Eropa itu sendiri. Walaupun, sebenarnya kegagalan Uni Eropa, melalui CFSP-nya, dalam menangani krisis Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, telah

diperkirakan oleh Desmond Dinan sebelumnya, yang mengatakan *'Of course, the EU could never become a superpower without developing a common defence policy and military capability comparable to those of the United States, which is unlikely ever to happen'* (2005; 560). Alasan lain yang dikemukakan Desmond Dinan, bahwa *'National sovereignty remains a formidable barrier to the development of a truly common foreign policy'* (2005; 560), dapat merupakan sebagai suatu pandangan sekaligus penegasan bahwa CFSP tidak akan pernah efektif dalam melaksanakan perannya, dan hal itu terbukti ketika bagaimana Uni Eropa, yang disertai mandat oleh AS, gagal mengatasi masalah Yugoslavia, khususnya perang Bosnia.

Bila melihat kondisi proses perubahan dari EPC menjadi CFSP, dimana negara-negara anggota Uni Eropa terlibat dalam suatu perdebatan terkait perubahan tersebut, maka sejak awal pembentukan CFSP itu sendiri memang telah memunculkan perbedaan-perbedaan antara negara anggota Uni Eropa, seperti pendapat Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd, yang mengatakan,

*'There were two main themes in the debate on EPC reform. The first was the call for a common foreign and security policy (CFSP), which would represent a "quantum leap forward." With varying degrees of priority, Italy, Germany, Belgium, the Netherlands, and Greece declared their interest in this first approach. The second approach was a concern to improve the internal workings of the EPC, a gradualist approach'* (2003; 41).

Dan perbedaan internal Uni Eropa inilah yang ikut memberikan pengaruh terhadap perkembangan CFSP selanjutnya, termasuk memperjelas alasan mengapa Uni Eropa, melalui CFSP, mengalami kegagalan dalam mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia.

Khusus bagi Inggris sendiri, lanjut Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd, bahwa *'The United Kingdom did not support developments that undermined NATO and showed little enthusiasm for majority voting in this area, being clear that decisions should be consensual'* (2003; 41), dapat merupakan suatu sikap dan penegasan bahwa Inggris tidak akan mendukung CFSP bila sampai mengesampingkan peran NATO. Sikap Inggris tersebut secara jelas bertentangan dengan pendapat yang disampaikan oleh Desmond Dinan bahwa adanya keinginan Uni Eropa untuk memosisikan diri sebagai *counterbalancing* bagi AS (2005; 559).

Dengan melihat akan banyaknya perbedaan kepentingan yang melatarbelakangi pembentukan CFSP, maka munculnya CFSP itu sendiri sebenarnya tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh negara anggota, bahkan sudah ada

negara anggota yang secara tegas tidak ingin sepenuhnya terlibat dalam CFSP, bahkan mungkin menolak kehadiran CFSP, seperti sikap yang ditunjukkan oleh Denmark. Sikap Denmark tersebut didasari oleh suatu pandangan bahwa keputusan yang diambil oleh CFSP adalah bersifat konsensus (Michael E. Smith; 2004; 213). Dalam arti bahwa keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa terkait dengan CFSP adalah bersifat kesepakatan dan tidak ada paksaan bagi negara anggota untuk ikut menyetujui kebijakan yang akan dilaksanakan dalam CFSP. Dan hal tersebut merupakan jalan terbaik untuk dapat mengakomodasikan seluruh perbedaan yang ada, sekalipun cara itu tidaklah memungkinkan munculnya Uni Eropa yang bersatu. Dengan adanya keputusan yang berdasarkan konsensus ini, maka munculnya Prancis, Inggris dan Jerman sebagai the big three Uni Eropa yang selalu tampil dominan diantara negara-negara anggota lainnya, dapat merupakan refleksi dari suatu kondisi akan adanya sikap yang segan atau keengganan untuk terlibat dari negara-negara tertentu anggota Uni Eropa, bahkan mungkin tidak peduli, terhadap kebijakan ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh Un Eropa, melalui CFSP.

Sekalipun kepercayaan yang ada diantara negara-negara anggota Uni Eropa, dapat dikatakan sangat kecil, dalam arti, tidak sepenuhnya ingin menggantungkan kepentingan keamanan nasionalnya kepada sesama negara anggota Uni Eropa, melalui CFSP, namun Uni Eropa tetap memerlukan adanya suatu jaminan akan keamanan dan kepentingan nasionalnya. Dalam pengertian bahwa Uni Eropa menyadari bahwa sekalipun Uni Sovyet, yang telah menjadi ancaman terhadap keamanan bersama seluruh anggota Uni Eropa, selama era perang dingin, telah runtuh, namun bukan berarti bahwa keamanan nasional setiap negara anggota sudah pasti terjamin. Apalagi, sejarah masa lalu Eropa yang sarat dengan peperangan antara mereka sendiri, khususnya pada pengalaman perang dunia I dan perang dunia II. Katakanlah, bagaimana, pada tahun 1950-an, Prancis yang melihat Jerman (masih Jerman Barat ketika itu) sebagai suatu negara perlu terus diwaspadai, sehingga perlu dan akan terus tidak boleh memiliki senjata (Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd; 2003; 20). Atau bagaimana Inggris dan Prancis menandatangani '*the Dunkirk Treaty of Alliance and Mutual Assistance, which was to last for fifty years*', dimana kedua negara setuju untuk bersatu untuk menghadapi agresi yang dilakukan kembali oleh Jerman (Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd; 2003; 17 - 18).

Sekalipun pernyataan diatas, tentang masih adanya kewaspadaan terhadap Jerman, muncul pada pasca perang dunia II dan jauh sebelum Uni Sovyet runtuh pada

tahun 1991, namun bukanlah berarti kewaspadaan terhadap Jerman sudah hilang dari ingatan kedua negara besar Uni Eropa tersebut, bahkan juga bagi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

Disamping itu, tidak satupun negara anggota Uni Eropa yang benar-benar yakin bahwa negara-negara pecahan Uni Sovyet maupun negara bekas anggota pakta warsawa, terutama Rusia, tidak akan menjadi ancaman terhadap keamanan Uni Eropa dimasa mendatang seperti ancaman yang ditimbulkan Uni Sovyet pada era perang dingin. Dengan kata lain, bahwa ancaman terhadap keamanan setiap negara anggota Uni Eropa masih bisa muncul dimasa akan datang, dan ancaman tersebut bisa datang dari mana saja, dari luar Uni Eropa, dari negara-negara pecahan Uni Sovyet maupun negara-negara bekas anggota pakta warsawa, bahkan ancaman keamanan tersebut bisa saja datang dari dalam Uni Eropa, yakni dari sesama negara anggota.

Keberadaan Inggris dan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB merupakan suatu kenyataan bahwa posisi yang telah memberikan peran penting dalam politik internasional tersebut membuat kedua negara anggota Uni Eropa tersebut dapat dianggap sangat wajar untuk tampil lebih dominan dibandingkan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Namun kemudian bisa muncul suatu pertanyaan terkait dengan apakah kedua negara tersebut bersedia meleburkan kepentingannya kedalam kepentingan bersama dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, ataupun dengan kata lain, bersedia mengorbankan kepentingannya demi kepentingan bersama dalam Uni Eropa. Karena, seperti yang disampaikan oleh Desmond Dinan,

*'The possibility of a single EU seat in the United Nations Security Council illustrates the challenge of developing a common foreign policy. If the EU wants to speak with one voice internationally, logically it should have a single seat in the Security Council. But Britain and France, permanent Security Council members, are opposed to that idea' (2005; 560),*

adalah merupakan suatu pandangan tidak yakin akan adanya kesediaan Inggris dan Prancis untuk secara sukarela mau mengorbankan peran internasionalnya demi kepentingan Uni Eropa.

Bila memang benar bahwa Inggris dan Prancis menghendaki adanya CFSP yang memiliki kemampuan sebagai sebuah institusi yang telah dibentuk oleh seluruh negara anggota Uni Eropa untuk menjaga keamanan Uni Eropa, maka kedua negara tersebut tidak bisa menghindar dari keharusan Uni Eropa 'speak with one voice

internationally'. Suatu hal yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin terjadi, yakni kedua negara tersebut rela untuk melepaskan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang telah memberikan peran penting kepada Inggris dan Prancis dalam politik internasional selama ini, hanya demi munculnya atau digantikan oleh satu suara, Uni Eropa, dalam PBB ataupun sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Kedua negara besar Uni Eropa tersebut, dalam kapasitasnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, bersama-sama dengan tiga negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, sangat berperan dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh PBB, dan peran tersebut telah membawa mereka menjadi negara yang memiliki pengaruh di seluruh dunia. Dengan pengaruh yang telah dimilikinya tersebut, ikut mendorong dan telah menjamin akan kesuksesan kepentingan nasional mereka, karena salah satu hak yang dimiliki oleh setiap negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah hak veto. Dan sudah pasti, Prancis dan Inggris akan menggunakan hak veto tersebut manakala ada kasus internasional yang merugikan kedua negara. Demikian juga Inggris dan Prancis akan menggunakan hak veto tersebut apabila dianggap akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Sehingga tidak akan sulit untuk menebak bahwa suatu hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin, bagi Prancis dan Inggris untuk bersedia melepaskan keuntungan yang mereka telah dapatkan dalam kapasitasnya sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk kemudian mendahulukan kepentingan Uni Eropa, dengan konsekuensi harus kehilangan pengaruh yang telah dimilikinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Karena bila sampai hal itu terjadi, berarti mereka juga akan kehilangan jaminan terhadap kepentingan nasionalnya, sesuatu yang sudah pasti akan terjadi kepada kedua negara tersebut.

Yang menjadi masalah bagi Uni Eropa adalah bahwa kedua negara tersebut ternyata juga terlibat dalam persaingan satu sama lain oleh karena adanya dorongan ambisinya masing-masing untuk mendominasi Uni Eropa dengan selalu berupaya menanamkan pengaruhnya kepada negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Bagi Prancis, yang secara nyata selalu mendukung munculnya Uni Eropa yang mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd, '*Another fundamental division underlay the discussion. For the France it was prudent for Europe to make preparation independently of the United States*' (2003; 43). Dan harus diakui bahwa sikap

Prancis memang sangat konsisten untuk selalu tidak mendukung NATO, dimana hal itu dapat dilihat bagaimana sikap Prancis, seperti yang disampaikan oleh Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd, '*France had remained in NATO, but outside the integrated military commands*', yang kemudian diikuti oleh Spanyol yang sejak tahun 1982 ketika menjadi anggota Uni Eropa (EC waktu itu) tidak mengambil bagian dalam '*integrated military structure*' (2003; 40). Sikap Prancis tersebut dibuktikan ketika bersama-sama dengan Jerman, pada tahun 1991-1992, membuat proposal untuk membangun brigade gabungan, dengan harapan akan menjadi inti dari, ataupun model bagi, '*a future European army*', dimana Belgia, Italia, Luxembourg, dan Spanyol tertarik untuk mengambil bagian di dalamnya (Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd; 2003; 43).

Sedangkan bagi Inggris, yang secara nyata dan tegas memihak AS dan NATO, dan melihat sikap yang ditunjukkan Prancis yang menghendaki Uni Eropa bebas dari pengaruh AS, melalui NATO, seperti yang disampaikan oleh Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd, '*this was the kind of attitude that would make the United States leave*' (2003; 43), akan dipandang sebagai sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Inggris. Karena bila sampai AS dan NATO keluar dari Eropa, maka Inggris, sebagai bagian dari the big three Uni Eropa, akan tampil sendiri untuk menghadapi kekompakan yang sudah tercipta antara Prancis dan Jerman. Mengingat adanya '*special relation*' antara Inggris dengan AS yang sudah tercipta selama ini, yang berarti, harapan ataupun ketergantungan Inggris kepada AS sangat besar.

Kondisi internal Uni Eropa yang sangat rumit tersebut, telah memberikan suatu pemahaman bahwa pembentukan CFSP hanyalah merupakan '*ambisi*' segelintir negara-negara anggota Uni Eropa yang ingin menunjukkan kepada dunia, dan mungkin juga kepada AS, bahwa Uni Eropa telah siap untuk bertindak sebagai dan melakukan '*counterbalancing*' terhadap super power AS. Uni Eropa menghindari untuk melihat realita kondisi internalnya sendiri yang penuh dengan persaingan antar kepentingan negara-negara anggotanya yang berbeda satu sama lain, sebagai sebuah '*permanent resistance*', dan hal itu telah terbukti ketika Uni Eropa, melalui CFSP gagal dalam mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia. Dimana, seharusnya sejak awal Uni Eropa sudah menyadari bahwa Uni Eropa tidak akan mampu mencapai suatu kesepakatan yang bulat untuk membentuk suatu kebijakan bersama, maupun akan terhalangi oleh '*permanent resistance*' dalam

mengimplementasikan CFSP, seperti yang disampaikan oleh Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd,

*‘The Maastricht text leaves a central ambiguity in interpretations of the goal of a “common defence,” namely: Was the long – term objective of the Union to change the basis of defence from membership of the Alliance to membership of the Union itself’ (2003; 49).*

Oleh karena itu, Uni Eropa seharusnya sudah menyadari dan bisa lebih realistis dalam melihat kenyataan kondisi internalnya bahwa terdapat rintangan yang sifatnya permanen dan hampir tidak mungkin bisa dihilangkan, yaitu faktor kedaulatan dan kepentingan nasional setiap negara anggotanya akan selalu menjadi prioritas dan lebih diutamakan oleh setiap negara anggota Uni Eropa dari pada kepentingan dan kedaulatan bersama dalam Uni Eropa.

Terkait dengan faktor kedaulatan, seperti yang disampaikan oleh **Simon Sweeny**, yaitu, *‘The ability of a state, or a constitutionally recognised body acting on behalf of the state, to exercise authority over its territory and its people without it being subject to any higher authority’ (2005; 72)*, ataupun merujuk kepada pendapat **Weber** yang mengatakan *‘for a (nation) state to be sovereign means having ‘absolute authority over its territory and people and to have independence internationally’ (2001; 14 dalam Simon Sweeny; 2005; 72)’*, adalah sesuatu yang menghambat implementasi kebijakan Uni Eropa, seperti CFSP. Karena selama Uni Eropa bukan sebagai sebuah negara kesatuan yang memiliki kedaulatan penuh dan memiliki pemerintahan sendiri seperti sebuah negara yang berdaulat, dan hanya merupakan kumpulan negara-negara yang memiliki kedaulatan dan kepentingan masing-masing, maka selama itu pula Uni Eropa hanya akan menghasilkan kebijakan yang hanya mengatasmakan seluruh negara anggotanya tetapi sebenarnya tidak mewadahi apa yang menjadi kehendak setiap negara anggotanya.

Setiap negara anggotanya merasa tidak memiliki kewajiban untuk tunduk kepada Uni Eropa karena setiap negara mempunyai pemerintahan dan teritori sendiri, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh setiap negara anggota itu semata tergantung kepada apa yang menjadi kepentingan mereka, dan bukan kepentingan Uni Eropa. Uni Eropa, bagi setiap negara anggotanya, dapat dikatakan hanyalah merupakan instrumen yang terbentuk atas kesepakatan bersama seluruh negara yang menjadi anggotanya, yang mereka dapat gunakan dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Keberadaan Uni Eropa yang tidak memiliki pemerintahan

dan teritori sendiri, menyebabkan dan dapat dipastikan tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengendalikan dan memerintah seluruh wilayah dan negara yang ada dalam cakupan dan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya sebuah negara kesatuan yang memiliki pemerintahan yang berdaulat sehingga memiliki hak dan kewenangan untuk memerintah dan mengendalikan seluruh teritorinya.

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Uni Eropa tersebut, tidaklah mengherankan apabila melihat negara seperti Inggris dengan tegas lebih mengutamakan hubungannya dengan AS, ataupun sikap Prancis yang dengan tegas tidak menghendaki lagi kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa. Demikian juga dengan negara anggota yang lebih kecil, Denmark, seperti yang diungkapkan oleh Trevor C. Salmon dan Alistair J. K. Shepherd, '*Denmark had national legislation that did not allow nuclear weapons or foreign troops to be stationed on its territory in peacetime*' (2003; 41). Contoh sikap ketiga negara anggota Uni Eropa tersebut tidaklah bisa disalahkan karena memang Uni Eropa bukanlah sebuah pemerintahan pusat yang didukung oleh suatu undang-undang atau aturan, selayaknya sebuah negara yang memiliki pemerintahan dan kedaulatan sendiri, untuk menegakkan semua aturan 'dalam negerinya'. Bahkan, bisa jadi mereka melihat keberadaan Uni Eropa hanyalah sebuah hambatan yang sangat mengganggu bagi tercapainya kepentingan nasional mereka. Dan, kondisi itulah yang menonjol ketika Uni Eropa mendapat kepercayaan AS untuk memainkan perannya melalui CFSP yang telah dibentuknya tersebut untuk mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995, sehingga Uni Eropa menuai kegagalan total dan tidak mampu menunjukkan kepada dunia, terutama kepada AS, bahwa Uni Eropa siap untuk menjaga keamanannya sendiri sekaligus menjadi sebuah institusi yang mampu melakukan counterbalancing bagi super power AS pasca runtuhnya Uni Soviet.

Oleh karena itu, faktor trauma perang dunia I maupun perang dunia II, sebagai peristiwa yang menakutkan, masih terlintas dalam diri setiap negara yang terlibat di dalamnya. Dan faktor trauma tersebut masih berperan terhadap munculnya rasa saling tidak percaya antara negara-negara anggota Uni Eropa, yang pada akhirnya kerjasama pertahanan bersama yang telah mereka bentuk dalam CFSP tidak mampu berfungsi sebagaimana seharusnya yang diinginkan oleh Uni Eropa. Sehingga sangatlah wajar jika ada negara-negara anggota Uni Eropa yang masih mendukung dan mengharapkan kehadiran AS, melalui NATO, yang telah berhasil mencegah munculnya konflik militer di Eropa selama era perang dingin, untuk tetap menjaga

keamanan Uni Eropa, sekalipun hal tersebut harus memunculkan perpecahan internal Uni Eropa.

*The CFSP Policy process under Maastricht* menjelaskan tentang *funding of the CFSP* dilakukan oleh *member of states and the European Community (EC)*, dimana pembiayaan tersebut dibedakan kedalam *'administrative'* dan *'operational'*, dan, pembelanjaan untuk *'administrative'* dibebankan kepada EC dan pembelanjaan untuk *'operational'* dibebankan kepada anggaran EC ataupun dapat dibebankan kepada negara-negara anggota sesuai dengan skala GNP (Michael E. Smith; 2004; 181, 183). Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa anggaran yang dipakai oleh CFSP bersumber dari dua sektor, yaitu EC dan negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri sesuai dengan skala GNP masing-masing. Jadi, bila merujuk kepada pendapat Smith di atas, maka setiap negara anggota Uni Eropa terlibat dan bertanggung jawab dalam pembiayaan *'administrasi'* dan *'operasional'* CFSP, dan keterlibatannya tersebut disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing negara anggota Uni Eropa. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab besarnya kontribusi yang harus diberikan oleh setiap negara anggota akan berbeda satu sama lain, sesuai dengan kemampuan GNP-nya masing-masing.

Karena keputusan yang dihasilkan oleh persetujuan Maastricht tersebut memberikan beban tanggung jawab berupa kewajiban kepada setiap negara anggota untuk ikut memberikan kontribusi dalam membiayai keperluan CFSP, maka semua negara-negara anggota Uni Eropa harus mentaati keputusan yang mereka buat sendiri tersebut, agar CFSP dapat diimplementasikan sebagaimana yang mereka harapkan. Bila sampai negara-negara anggota Uni Eropa terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Uni Eropa akan menemui kesulitan dalam mengimplementasikan CFSP. Dengan kata lain, bahwa suksesnya implementasi CFSP akan sangat membutuhkan dan bergantung kepada kontribusi setiap negara anggota Uni Eropa. Karena dalam kenyataannya, Uni Eropa bukanlah sebagai suatu negara kesatuan yang memiliki pemerintahan sendiri, dimana seluruh bagian dari negara kesatuan tersebut diikat oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku diseluruh negara, maka kontribusi tersebut akan sangat bergantung kepada kesediaan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap negara anggota Uni Eropa.

Setiap negara anggota Uni Eropa dalam mengelola sumber daya anggaran yang dimilikinya, akan membagi anggaran tersebut sesuai dengan kepentingan negaranya masing-masing, artinya, anggaran yang mereka miliki sudah habis terbagi

untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan negaranya masing-masing. Seperti antara lain kebutuhan untuk membangun sistem pendidikan, kesehatan, pertahanan. Sehingga kewajiban kontribusi yang harus diberikan oleh setiap negara anggota Uni Eropa kepada CFSP merupakan pengeluaran tambahan dari keseluruhan kebutuhan pembiayaan kepentingan nasionalnya, ataupun merupakan sebagian kecil dari keseluruhan anggaran yang dimilikinya. Sudah pasti, negara anggota Uni Eropa tidak akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada CFSP dari pada anggaran yang dibutuhkannya untuk membiayai kepentingan nasionalnya, sekalipun mereka mengetahui bahwa keberadaan CFSP itu sendiri juga dalam rangka untuk mendukung kepentingan Uni Eropa, dan berarti juga mendukung negara-negara anggota Uni Eropa.

Akan sangat sulit bagi setiap negara anggota Uni Eropa untuk menggantungkan seluruh keamanan negaranya kepada CFSP, organisasi yang memiliki anggota banyak negara yang berarti terdapat banyak kepentingan di dalamnya, yang mereka sadari sepenuhnya bahwa tidak mungkin bisa mereka kendalikan seluruhnya dan seutuhnya. Oleh karena adanya posisi CFSP yang berada di luar wilayah kedaulatan negara-negara anggota Uni Eropa, maka kondisi tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan setiap negara anggota Uni Eropa terkait apakah keamanan mereka benar-benar akan terjamin apabila peran untuk menjaga keamanan Uni Eropa diberikan kepada CFSP, sebuah institusi yang harus dibiayai oleh setiap negara anggota Uni Eropa. Adanya kenyataan bahwa CFSP lebih didominasi oleh negara-negara 'the big three', Inggris, Prancis dan Jerman, menjadi pertimbangan serius bagi negara-negara kecil anggota Uni Eropa secara sukarela memberikan kontribusi atau berpartisipasi dalam membiayai CFSP, karena terdorong oleh adanya kecurangyakinan mereka terhadap apakah kepentingan negara-negara kecil akan diperhatikan dan terakomodasika dalam CFSP.

Adanya keputusan Maastricht yang mengatakan besarnya kontribusi berdasarkan skala GNP, maka negara-negara yang memiliki GNP besar, karena secara otomatis akan memberikan kontribusi lebih besar dalam pembiayaan CFSP, akan merasa memiliki peran yang lebih besar dari pada negara-negara penyumbang lebih kecil atas pelaksanaan CFSP. Ataupun akan merasa memiliki hak yang lebih besar untuk mengendalikan CFSP dari pada negara-negara anggota penyumbang yang lebih kecil. Kenyataan tersebut akan mendorong penyumbang yang lebih besar tersebut untuk menuntut hak yang lebih, dalam arti pelaksanaan CFSP dalam mengelola

keamanan bersama Uni Eropa harus lebih memperhatikan kepentingan mereka. Dan lebih jauh lagi, negara-negara penyumbang besar terhadap pembiayaan CFSP tersebut dapat mengendalikan arah kebijakan dan keputusan terhadap pelaksanaan kerjasama pertahanan melalui CFSP dan mengabaikan kepentingan negara-negara penyumbang yang lebih kecil. Kondisi tersebut menyebabkan kerjasama pertahanan Uni Eropa dalam CFSP tidak akan pernah terwujud dan akan sulit untuk diandalkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsinya dalam menjaga keamanan Uni Eropa, dalam pengertian mampu mewartakan seluruh kepentingan negara anggota Uni Eropa.

Walaupun besarnya jumlah kontribusi pembiayaan CFSP berdasarkan skala GNP tiap-tiap negara, dimana secara otomatis negara-negara anggota Uni Eropa yang lebih kecil akan memberikan sumbangan yang lebih kecil, namun karena adanya kenyataan bahwa CFSP hanya didominasi oleh negara-negara anggota yang memberikan sumbangan yang lebih besar, seperti '*the big three*' tersebut, maka negara-negara anggota penyumbang lebih kecil tersebut akan enggan, bahkan alasan-alasan yang memungkinkan mereka untuk tidak terlibat ataupun dengan sengaja mempersulit keterlibatan mereka dalam memberikan kontribusi bagi pembiayaan CFSP. Karena, dalam pandangan negara-negara anggota Uni Eropa penyumbang yang lebih kecil, bahwa CFSP hanya akan mengedepankan kepentingan negara-negara anggota penyumbang yang lebih besar saja. Oleh karenanya, bagi negara-negara penyumbang lebih kecil akan menganggap CFSP tidak memiliki arti bagi mereka, dan persetujuan yang mereka berikan dalam pertemuan Maastricht, yang pada awalnya sangat mereka diharapkan akan adanya CFSP yang dapat mewartakan kepentingan mereka, pada akhirnya hanya akan merupakan sebagai simbol atau bahkan merupakan suatu keterpaksaan untuk menjaga solidaritas diantara sesama negara-negara anggota Uni Eropa. Ataupun, dengan alasan lain, demi untuk menjaga kepentingan mereka agar tidak terkucilkan oleh negara-negara kuat anggota Uni Eropa, seperti Inggris, Jerman dan Prancis.

Masalah lain yang menjadi krikil bagi negara-negara anggota Uni Eropa berkaitan dengan pandangan mereka terhadap peran yang dapat dan akan dilaksanakan oleh CFSP dalam menjaga keamanan Uni Eropa adalah adanya perbedaan pemahaman akan ancaman yang dihadapi oleh setiap negara anggota Uni Eropa. Bagi negara-negara anggota yang memang menganggap CFSP sangat penting bagi mereka, baik dalam rangka untuk menjaga keamanan bersama Uni Eropa dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO, seperti Prancis dan Jerman,

maupun hanya untuk memanfaatkan CFSP sebagai instrumen untuk mewujudkan perannya dalam politik internasional, seperti Inggris yang memposisikan diri sebagai 'bridge' antara Uni Eropa dengan NATO, akan selalu mengkondisikan bahwa kerjasama pertahanan Uni Eropa melalui CFSP penting bagi Uni Eropa dalam rangka untuk menjaga keamanan bersama Uni Eropa. Sehingga mereka tidak akan ragu untuk memberikan sumbangan yang besar terhadap CFSP.

Disisi lain, bagi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya yang memiliki pemahaman bahwa mereka tidak melihat adanya ancaman terhadap keamanan kepentingan negaranya, sudah tentu akan mengalokasikan anggaran yang realistis, sesuai dengan perspektif mereka terhadap ancaman yang mereka hadapi, termasuk sumbangan mereka kepada CFSP. Apalagi, keberadaan Uni Sovyet, ancaman yang paling mereka takutkan selama era perang dingin, sudah runtuh, artinya ancaman bagi mereka sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada alasan bagi negara-negara yang masuk dalam kelompok tersebut untuk mengalokasikan anggaran yang besar dalam bidang pertahanan, termasuk dalam menyumbang kepada CFSP.

Bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang masuk dalam kelompok Atlantists, yang menghendaki berlanjutnya kehadiran AS, melalui NATO, di wilayah Uni Eropa sebagai penjaga keamanan mereka seperti pada era perang dingin, akan sangat menguntungkan dari segi penghematan pengeluaran anggaran untuk menjaga keamanan mereka. Karena dengan tetap hadirnya AS, melalui NATO, dalam menjaga keamanan Uni Eropa, maka negara-negara yang masuk dalam kelompok atlantists tersebut tidak perlu mengalokasikan anggaran pertahanan tertentu untuk mewujudkan pelaksanaan kerjasama pertahanan mereka melalui CFSP untuk menjaga keamanan Uni Eropa.

Keinginan negara-negara kelompok atlantists untuk tetap menggantungkan keamanannya terhadap AS, melalui NATO, dapat dikatakan, memang masuk akal bila dilihat dari segi ancaman yang muncul pada pasca runtuhnya Uni Sovyet. Karena, bila ancaman yang dihadapi oleh Uni Eropa pada era perang dingin tidak pernah sampai menimbulkan perang di Eropa, padahal ancaman nyata dari Uni Sovyet dan pakta warsawa ketika itu sangat nyata dihadapan Uni Eropa, apalagi ketika Uni Sovyet sudah runtuh dan pakta warsawa sudah bubar. Artinya, ancaman nyata yang ada didepan mereka sudah tidak ada lagi. Dan hal itu sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Glyn Morgan yang mengatakan '*Indeed, NATO probably remains the best means of dealing with Russia. There is no obvious reason why European*

*political integration would provide the answer to a resurgent Russia*' (2005; 89), yang dapat diartikan sebagai tidak adanya alasan bagi Uni Eropa untuk membentuk kerjasama pertahanan sendiri dalam rangka menjaga keamanannya sendiri, karena Uni Sovyet sudah runtuh.

Demikian juga dengan pendapat yang disampaikan oleh Rachel A. Epstein dan Alexandra Gheciu, bahwa, *'Following the end of the Cold War, many politicians and observers argued that the new "world order" was emerging, where conventional definitions of security, enemies and threats were no longer relevant,'* (2006; 318 dalam Paul M. Heywood, Erik Jones, Martin Rhodes and Ulrich Sedelmeier; 2006; 318), dapat dikatakan sebagai pendapat yang melihat bahwa runtuhnya Uni Sovyet maka ancaman dan musuh, khususnya bagi negara-negara Uni Eropa sudah tidak ada lagi.

Uni Eropa perlu mendefinisikan kembali apa dan siapa musuh mereka sehingga begitu pentingnya bagi mereka untuk mewujudkan kerjasama pertahanan mereka melalui CFSP dengan alasan untuk menjaga keamanan mereka. Karena dengan mengetahui apa yang menjadi ancaman bagi mereka dan siapa musuh mereka pasca runtuhnya Uni Sovyet, akan membentuk kesamaan pandangan diantara negara-negara anggota Uni Eropa akan seberapa pentingnya bagi mereka untuk mewujudkan kerjasama pertahanan mereka melalui CFSP. Mengingat konsekuensi yang harus mereka hadapi adalah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan CFSP maka mereka harus mampu membiayai seluruh kebutuhan anggaran CFSP, semahal apapun juga.

Bila melihat kebijakan negara-negara anggota Uni Eropa yang mengurangi anggaran pertahanannya sebagai respon terhadap berakhirnya perang dingin (Paul M. Heywood, Erik Jones, Martin Rhodes and Ulrich Sedelmeier; 2006; 321), maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikasi bahwa secara umum negara-negara anggota Uni Eropa memiliki pandangan yang sama terkait berkurangnya atau sudah tidak adanya ancaman nyata yang dihadapi oleh Uni Eropa. Menurunnya anggaran pertahanan negara-negara anggota Uni Eropa tersebut dapat dilihat pada perbandingan yakni pada tahun 1988 dan 1989, era ketika perang dingin masih berlangsung, semua negara anggota Uni Eropa yang merupakan anggota NATO mengalokasikan anggaran paling sedikit 2 persen dari GDP-nya untuk pertahanan dan bahkan lebih dari itu, dimana Prancis mengalokasikan 3,7 persen, Jerman 2,9 persen, dan Inggris 4,1 persen, Italia 2,3 persen, Belanda 2,8 persen, dan Norwegia 2,9 persen (Paul M. Heywood, Erik Jones, Martin Rhodes and Ulrich Sedelmeier; 2006; 321). Sedangkan

mulai tahun 1990, ketika pakta warsawa sudah bubar dan menjelang runtuhnya Uni Sovyet tahun 1991, anggaran pertahanan negara-negara anggota Uni Eropa yang merupakan anggota NATO tersebut secara terus menerus mengalami penurunan hampir setiap tahun sampai dengan tahun 2001, dimana Jerman 1,4 persen pada 2002, sementara Prancis dan Inggris menurun sampai 2,5 persen pada 2002, dan anggaran pertahanan Eropa sekitar 1,9 persen dari GDP, berada dibawah rata-rata anggaran pertahanan global, dengan banyak negara-negara anggota Uni Eropa yang merupakan anggota NATO mengalokasikan anggaran pertahanannya jauh dibawah 2 persen (Paul M. Heywood, Erik Jones, Martin Rhodes and Ulrich Sedelmeier; 2006; 321).

Terjadinya penurunan anggaran pertahanan negara-negara anggota Uni Eropa, bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang tergabung dalam kelompok Atlantists, yang masih menghendaki kehadiran AS, melalui NATO, sebagai penjaga keamanan mereka, lebih masuk akal karena disamping memang sudah tidak adanya ancaman dari Uni Sovyet, kelompok Atlantists juga merasa bahwa keamanan mereka sudah ada yang menjaminkannya, yaitu AS, melalui NATO. Sehingga, bagi kelompok ini, mengeluarkan anggaran pertahanan untuk membiayai implementasi CFSP dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dan tidak penting, karena kepentingan keamanan mereka sudah terwadahi oleh kehadiran AS, melalui NATO, di Eropa. Disamping itu, kelompok Atlantists melihat belum adanya tanda-tanda bahwa NATO, khususnya AS, akan meninggalkan Eropa, bahkan sebaliknya lebih memantapkan kehadirannya di Eropa dengan melakukan ekspansi ke negara-negara bekas negara-negara anggota pakta warsawa maupun negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah lainnya.

Adapun negara-negara anggota Uni Eropa yang tergabung dalam kelompok Europeanists yang menginginkan kemandirian Uni Eropa dalam menjaga keamanannya sendiri melalui kerjasama pertahanan bersama dalam CFSP, seharusnya tidak perlu menurunkan anggaran pertahanannya, namun sebaliknya, perlu menaikkan anggaran pertahanannya, atau paling tidak, mempertahankan besarnya anggaran pertahanan yang sudah ada sebelumnya. Terutama negara-negara kelompok Europeanists, khususnya Prancis dan Jerman yang merupakan pelopor dalam mendorong lepasnya Uni Eropa dari AS, melalui NATO, dalam penjagaan keamanan mereka. Karena, sekalipun ancaman terhadap keamanan Uni Eropa dari Uni Sovyet sudah tidak ada, tetapi untuk melaksanakan dan mensukseskan kerjasama pertahanan Uni Eropa melalui CFSP memerlukan anggaran yang besar. Apalagi, bila memang CFSP disiapkan untuk menjaga keamanan Uni Eropa dan menggantikan peran AS,

melalui NATO, yang selama ini telah menunjukkan keberhasilannya, maka CFSP perlu dibangun kemampuannya, minimal memiliki kemampuan sama seperti yang dimiliki NATO. Dan untuk mewujudkan harapan akan adanya CFSP yang mampu memainkan peran seperti yang telah dilakukan oleh AS, dalam NATO selama ini, maka CFSP harus dibangun. Dan hal itu sudah pasti akan memerlukan anggaran yang sangat besar.

Seharusnya negara-negara yang masuk dalam kelompok Europeanists, terutama Prancis dan Jerman, mau dan mampu memberikan dan memperlihatkan contoh kepada AS dan NATO umumnya serta negara-negara kelompok Atlantists bahwa mereka memang serius untuk mensukseskan kerjasama pertahanan Uni Eropa yang mereka telah bentuk, yaitu CFSP, sebagai upaya untuk mengambil alih peran AS, melalui NATO, dalam menjaga keamanan Uni Eropa, dengan berusaha untuk meningkatkan kontribusi anggaran yang diberikan kepada CFSP. Dan, yang lebih penting dari itu adalah bahwa kelompok Europeanists tersebut seharusnya sudah menyadari akan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan mensukseskan kerjasama pertahanan bersama Uni Eropa melalui CFSP. Sehingga, ketika muncul masalah keamanan di kawasan Eropa yang memerlukan kehadiran CFSP untuk menyelesaikannya, maka CFSP bisa tampil sesuai dengan harapan Uni Eropa, khususnya kelompok Europeanists.

Kasus perang Yugoslavia merupakan sebuah indikator betapa masalah anggaran merupakan salah satu masalah penting yang menjadi kendala bagi Uni Eropa dalam mewujudkan dan mensukseskan kerjasama pertahanan yang mereka telah bentuk dalam CFSP. Dalam Treaty on European Union (TEU) dijelaskan bahwa pembiayaan '*for implementing CFSP joint action*' oleh Komisi Uni Eropa disarankan oleh negara-negara anggota Uni Eropa untuk menggunakan QMV (under article 205), yakni keputusan berdasarkan pemungutan suara, untuk membiayai joint action dibekas negara Yugoslavia, namun ditolak oleh Inggris karena lebih mengendaki dilaksanakan melalui konsensus (Michael E. Smith; 2004; 212, 213, 217). Penolakan Inggris untuk mentaati ketentuan yang telah diatur dalam TEU tersebut sebagai gambaran bagaimana internal Uni Eropa, terutama the big three, tidak memiliki kesamaan pandangan dalam melihat dan memutuskan bagaimana seharusnya mensukseskan CFSP dalam menyelesaikan perang Yugoslavia. Padahal, AS telah mempersilahkan Uni Eropa melalui CFSP-nya untuk menyelesaikan masalah Yugoslavia, yang merupakan salah satu negara Eropa, sehingga menjadi masalah

internal Eropa. Apalagi, Uni Sovyet sudah runtuh yang berarti kekuatan yang dapat menghalangi Uni Eropa dalam menangani perang Yugoslavia sudah tidak ada lagi. Atau dapat dikatakan Uni Eropa melalui CFSP-nya memiliki kebebasan sesuai kemampuannya untuk menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia.

Suatu kenyataan lain yang menjelaskan betapa kondisi internal Uni Eropa sangat lemah terkait dengan kemauan dan kesadaran untuk memberikan kontribusi untuk membiayai kerjasama pertahanan yang mereka telah bentuk melalui CFSP adalah seperti yang diungkapkan oleh Hagleitner yang dikutip kembali oleh Michael E. Smith, yakni,

*'The EU's administration of Mostar revealed how difficult it would be to fund the CFSP's operations through national means. Nearly a year after the initial Council decision (November 8, 1993) to support operation in part with national contributions, only three EU member states (Denmark, Greece, and Ireland) had contributed to it (2004; 216-217).*

Ketiga negara, Denmark, Yunani dan Irlandia, yang memberikan kontribusi tersebut adalah tergolong negara-negara kecil anggota Uni Eropa yang kemampuannya, dari segi anggaran, masih jauh berada dibawah Inggris, Prancis dan Jerman, tiga negara yang selalu berperan dalam mengendalikan setiap kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa. Dan bila cuma terdapat tiga negara anggota Uni Eropa yang memberikan kontribusi ketika itu, maka dapat dibayangkan kemampuan apa yang bisa diharapkan dari CFSP untuk dapat menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia. Sehingga sangat masuk akal apabila Uni Eropa melalui CFSP-nya gagal untuk mewujudkan keinginan mereka untuk mandiri dalam menjaga keamanan Eropa sekaligus juga gagal menjaga kepercayaan yang diberikan oleh AS untuk menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia.

Periode saat runtuhnya Uni Sovyet 1991 sampai dengan meletusnya perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995, merupakan kesempatan bagi Uni Eropa untuk membuktikan dan mewujudkan apa yang telah menjadi harapan mereka akan adanya Uni Eropa yang mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO. Periode waktu lima tahun, tahun 1991 sampai tahun 1995, merupakan waktu yang cukup panjang bagi Uni Eropa untuk merumuskan segala sesuatu yang penting dan harus disiapkan, termasuk merumuskan bagian yang sangat penting yaitu bagaimana pembiayaan operasional kerjasama pertahanan yang mereka bentuk nantinya, agar, ketika kerjasama

pertahanan Uni Eropa terbentuk, Uni Eropa sudah tidak menemui lagi kendala serius untuk mengoperasionalkannya. Dan yang terpenting adalah kerjasama pertahanan tersebut dapat langsung berfungsi dan menunjukkan suatu hasil yang positif, artinya, dapat menyelesaikan suatu masalah yang dipercayakan kepadanya.

Memang Uni Eropa berhasil membentuk suatu kerjasama pertahanan yaitu CFSP pada tahun 1993, periode antara runtuhnya Uni Sovyet tahun 1991 dan meletusnya perang Bosnia tahun 1995, namun kenyataannya Uni Eropa belum memperhitungkan secara cermat tentang bagaimana membiayai operasional organisasi yang mereka bentuk tersebut. Bila memperhatikan pernyataan yang disampaikan oleh John W. Young dan John Kent, terkait keinginan AS untuk melihat peran Uni Eropa yang *'wealthy, well-armed West Europeans'* dalam menyelesaikan sendiri masalah perang Yugoslavia (2004; 638), maka seharusnya dengan predikat sebagai *'wealthy, well-armed West European'* yang disandangnya, Uni Eropa tidak akan menemui masalah dalam merumuskan dan mendukung keperluan pembiayaan operasional yang dibutuhkan oleh CFSP. Apalagi, negara-negara anggota Uni Eropa yang juga anggota NATO sudah memiliki pengalaman ketika terlibat dalam pengamanan kawasan Eropa, dibawah bendera NATO, untuk menghadapi ancaman Uni Sovyet pada era perang dingin.

Bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang juga anggota NATO yang berperan langsung dalam pengamanan kawasan Eropa pada era perang dingin, sudah pasti memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana dan sebesar apa pembiayaan operasional suatu organisasi semacam NATO agar dapat mencapai sukses dalam menjalankan perannya. Dinamika internal NATO terutama terkait bagaimana sistem kontribusi dan kewajiban setiap anggotanya untuk membiayai operasional NATO, sehingga selama NATO menjaga keamanan kawasan Eropa selama perang dingin, era ketika ancaman nyata Uni Sovyet masih ada, berhasil mencegah munculnya konflik militer di Eropa. Padahal, era sebelum NATO dibentuk untuk menjaga keamanan kawasan Eropa, Eropa ketika itu penuh dengan peperangan, dimana dua peperangan besar terakhir yang terjadi adalah perang dunia pertama dan perang dunia kedua.

Disisi lain, beban yang ditanggung oleh negara-negara anggota Uni Eropa yang juga anggota NATO akan lebih besar karena harus memberikan kontribusi untuk membiayai operasional sekaligus kepada dua organisasi, yaitu NATO dan CFSP, pada waktu yang bersamaan, dan kondisi tersebut akan berlangsung dalam waktu yang lama karena keberadaan NATO dan CFSP bukanlah bersifat sementara tetapi akan

ada terus selama masih dibutuhkan. Karena harus terlibat dalam membiayai dua organisasi, dimana keduanya memainkan peran yang sama demi kepentingan keamanan Uni Eropa, maka menjadi masuk akal apabila negara-negara anggota Uni Eropa kelompok Europeanists sangat menginginkan masalah keamanan mereka dilaksanakan sepenuhnya oleh Uni Eropa dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO. Sehingga beban yang harus ditanggung oleh negara-negara anggota Uni Eropa yang juga anggota NATO bisa lebih ringan karena tinggal memberikan kontribusi kepada pembiayaan CFSP saja.

Walaupun demikian, beban tanggung jawab pembiayaan yang semula dipikul oleh AS dalam NATO harus diambil alih oleh Uni Eropa, dalam pengertian bahwa biaya yang dibutuhkan untuk operasional CFSP kurang lebih akan sama dengan biaya operasional NATO, terutama untuk mencapai kualitas peran CFSP yang sama dengan hasil yang telah dicapai oleh NATO sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh CFSP harus relatif sama dengan yang telah diberikan kepada NATO.

Bila melihat pendapat yang disampaikan oleh Michael E. Smith, *'The difficulties here have often been cited as a major deficiency of the CFSP, as it failed to use its economic leverage over Yugoslavia effectively before it broke up...'* (2004; 195), maka kegagalan Uni Eropa dalam mengatasi krisis perang Yugoslavia sangat sulit dibayangkan apabila dikatakan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi. Disamping itu kenyataan bahwa posisi Yugoslavia, seperti yang disampaikan oleh John W. Young dan John Kent, terletak di jantung Eropa (2004; 638), seharusnya menjadi lebih mudah bagi Uni Eropa melalui CFSP-nya untuk mengatasi krisis Yugoslavia. Apalagi negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya the big three, memiliki peralatan militer yang sangat modern dan sangat mudah untuk digerakkan ke wilayah konflik, Yugoslavia, sesuai dengan kebutuhan.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Michael E. Smith bahwa *'EU states increasingly looked to the EC budget for CFSP funds,..'* (2004; 224), merupakan gambaran bagaimana negara-negara anggota Uni Eropa merasa keberatan untuk memberikan kontribusi langsung untuk membiayai operasional CFSP, mengingat seperti yang tertuang dalam TEU, sumber anggaran untuk membiayai operasional CFSP dapat dibebankan kepada European Commission (EC) dan juga kepada negara-negara anggota Uni Eropa. Sikap Uni Eropa yang ingin membebaskan anggaran operasional CFSP kepada EC seakan bertentangan dengan ambisinya untuk mandiri

dalam mengamankan kawasannya sendiri dan lepas dari bayang-bayang AS, melalui NATO, selama ini. Suatu sikap yang bertentangan satu sama lain.

Adanya sikap sebagian negara-negara anggota Uni Eropa yang enggan untuk memberikan kontribusi anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh CFSP, dapat juga memberikan gambaran bahwa sebenarnya negara-negara tersebut lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya dengan tetap menggantungkan keamanan Eropa kepada AS, melalui NATO. Karena bila NATO yang menjaga keamanan Eropa berarti anggaran yang seharusnya dialokasikan bagi operasional CFSP dapat digunakan untuk kepentingan nasional mereka. Jadi, sekalipun negara-negara anggota Uni Eropa, terutama kelompok Europeanists, sangat bersemangat untuk mensukseskan kerjasama pertahanan Uni Eropa yang mereka telah miliki, yaitu CFSP, namun dalam kenyataannya mereka tidak mampu membiayai kebutuhan operasional CFSP, sehingga hal itu dapat diartikan bahwa mereka sebenarnya masih menginginkan AS, melalui NATO, untuk berperan menjaga keamanan Eropa, dalam satu syarat, harus sesuai dengan kepentingan negara-negara anggota Uni Eropa. Suatu keinginan yang hampir tidak mungkin tercapai mengingat kehadiran AS, melalui NATO, untuk menjaga keamanan Eropa merupakan strategi luar negeri AS untuk memposisikan Eropa berada dalam kendalinya, dan hal itu dapat dilihat, sekalipun Uni Sovyet sudah runtuh, namun AS, melalui NATO masih tetap hadir di Eropa, bahkan pada pasca runtuhnya Uni Sovyet melakukan ekspansi ke negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Kondisi Uni Eropa bukan sebagai suatu negara kesatuan yang memiliki satu pemerintahan merupakan faktor utama yang menjadi penghambat Uni Eropa untuk dapat merumuskan dan mengalokasikan anggaran bagi keperluan operasional kerjasama pertahanan yang telah mereka bentuk dalam CFSP, sebagaimana layaknya sebuah negara kesatuan yang dapat secara tegas menetapkan dan mengalokasikan kebutuhan anggaran pertahanan yang dibutuhkan sesuai kepentingan negara pada setiap tahunnya. Sedangkan bagi Uni Eropa, setiap negara anggotanya akan terlebih dahulu menetapkan anggaran bagi kepentingan pembangunan negaranya, dan memberikan kontribusi bagi CFSP sesuai dengan 'seleranya'. Artinya, kontribusi anggaran yang diberikan kepada CFSP tidak akan menjadi prioritas bagi setiap negara anggota Uni Eropa. Karena anggaran yang diberikan bagi pembangunan nasional dalam sebuah negara kesatuan sudah dapat diukur besarnya keuntungan yang dapat diperolehnya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada CFSP. Dalam arti, karena

walaupun CFSP adalah merupakan milik bersama seluruh negara anggota Uni Eropa, namun dalam kenyataannya suatu kebijakan Uni Eropa yang harus dilaksanakan oleh CFSP sangat tergantung kepada negara-negara kuat yang ada dalam Uni Eropa.

Karena Uni Eropa tidak memiliki pemerintahan yang memiliki otoritas yang kuat terhadap seluruh negara anggotanya sebagaimana kekuatan otoritas yang dimiliki oleh pemerintahan sebuah negara kesatuan, maka kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin Uni Eropa tidak memiliki kekuatan mutlak untuk menetapkan dan mengontrol suatu ketentuan yang berlaku bagi seluruh negara anggotanya. Demikian juga dalam masalah kontribusi yang dibebankan kepada setiap negara anggota Uni Eropa, Uni Eropa tidak memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum kepada negara anggotanya yang lalai dalam memberikan kontribusi bagi kepentingan operasional CFSP, baik itu disengaja maupun tidak. Seperti contoh pada masalah kontribusi kepada CFSP yang hanya dilakukan oleh tiga negara; Denmark, Yunani dan Irlandia, dimana Uni Eropa tidak memiliki kekuatan untuk memaksa sisa negara anggota lainnya untuk segera memberikan kontribusi bagi kebutuhan operasional CFSP untuk mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia. Ataupun pada contoh lainnya, bagaimana Jerman secara sepihak memberikan pengakuan kepada Kroasia sebagai sebuah negara tanpa melalui keputusan bersama dalam Uni Eropa. Dan tindakan yang dilakukan oleh Jerman tersebut tidak mendapat sanksi hukum dari Uni Eropa. Namun contoh yang mungkin paling menonjol adalah bagaimana Inggris, sebagai salah satu negara kuat dan sangat berpengaruh dalam Uni Eropa, yang membangun hubungan khusus dengan AS sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Uni Eropa, seperti munculnya sikap menentang dari Prancis.

Berbagai kendala yang ada dalam Uni Eropa, terutama dalam memenuhi kebutuhan anggaran operasional yang dibutuhkan oleh CFSP telah membuat kerjasama pertahanan yang telah mereka bentuk, yakni CFSP, tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sehingga periode runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 sampai dengan meletusnya perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tahun 1995 Uni Eropa belum mampu mewujudkan harapannya akan Uni Eropa yang mandiri dalam menjaga keamanannya dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO. Masih diperlukan adanya kesungguhan dari setiap anggota Uni Eropa untuk mau memberikan kontribusi bagi kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh CFSP, dan harus berani mengedepankan kepentingan bersama dalam CFSP bila memang ingin untuk mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri. Setiap negara

anggota Uni Eropa harus mau dan mampu mentaati seluruh ketentuan yang telah mereka putuskan terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan CFSP, terutama yang berhubungan dengan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran.

Pasca runtuhnya Uni Sovyet telah menghilangkan ancaman nyata yang ditakutkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa, sekalipun Rusia masih dapat dikategorikan sebagai negara yang mampu menghadirkan ancaman bagi Uni Eropa, namun Uni Eropa tidak menganggapnya sebagai ancaman sebagaimana Uni Sovyet pada era perang dingin. Sekalipun ancaman Uni Sovyet sudah tidak ada, namun Uni Eropa terdorong, melalui persetujuan Maastricht pada tahun 1993, untuk membentuk kerjasama pertahanan dalam CFSP, terutama kelompok Europeanists yang dimotori oleh Prancis dan Jerman. Seperti pendapat yang disampaikan Michael E. Smith yaitu *'CFSP does not provide direct material benefit to EU member states in term of either security or wealth'* (2004; 10), sebagai gambaran bahwa kehadiran CFSP tanpa dilengkapi oleh sasaran tertentu yang dapat dicapai dan tidak diberikan suatu batasan waktu kapan CFSP memberikan hasil yang dapat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Terlepas dari adanya ambisi kelompok Europeanists yang menghendaki Uni Eropa mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO, namun keinginan untuk menginstitutionalkan kerjasama pertahanan Uni Eropa, yang akhirnya terbentuk dalam CFSP, dapat diartikan bahwa negara-negara anggota masih melihat adanya ancaman terhadap keamanan mereka ataupun ancaman terhadap kepentingan mereka.

Bila memperhatikan bagaimana pada akhirnya Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan untuk membentuk kerjasama pertahanan dalam CFSP, maka bisa diartikan sebagai telah adanya kesamaan pemahaman diantara negara-negara anggota Uni Eropa bahwa Uni Eropa memang memerlukan suatu kerjasama pertahanan karena hal itu akan dapat memberikan keuntungan terhadap kepentingan nasional bagi negara-negara anggotanya. Disisi lain, tindakan yang diambil oleh Uni Eropa untuk membentuk dan menginstitutionalkan kerjasama pertahanan mereka dalam CFSP pada tahun 1993, dapat memiliki pemahaman lain sebagai suatu reaksi yang hanya terfokus pada runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991. Dan dengan keruntuhan negara yang menjadi ancaman terhadap negara-negara anggota Uni Eropa selama ini tersebut, ada harapan, terutama muncul pada negara-negara kelompok Europeanists,

bahwa akan segera diikuti oleh mundurnya AS dari Eropa, yang berarti NATO-pun akan mengakhiri perannya di Eropa yang telah dijalankannya sejak tahun 1949 sebagai penjaga keamanan Eropa. Alasan untuk mundurnya NATO dari Eropa memang masuk akal apabila melihat latarbelakang pembentukan NATO itu sendiri, yaitu untuk menjaga keamanan Eropa dari ancaman komunis Uni Sovyet, sehingga, oleh karena Uni Sovyet sudah runtuh, yang berarti ancaman terhadap negara-negara anggota Uni Eropa sudah tidak ada lagi, maka tidak ada lagi ancaman yang dihadapi NATO.

Namun, ternyata AS dan NATO, tidak melihat adanya alasan untuk meninggalkan Eropa sekalipun Uni Sovyet sudah runtuh, bahkan memperluas pengaruhnya dengan melakukan ekspansi ke negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah. Dan tindakan AS dan NATO tersebut dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan dari tujuan dibentuknya NATO. Disini terlihat dengan jelas adanya kepentingan baik itu AS maupun negara-negara tertentu dalam Uni Eropa, katakanlah Inggris, yang memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan AS.

Dengan tetap hadirnya AS dan NATO di Eropa sekalipun ancaman terhadap keamanan Uni Eropa sudah tidak ada lagi, telah membuat harapan negara-negara anggota Uni Eropa, yang selama ini menginginkan agar Uni Eropa tidak bergantung terus menerus kepada AS, melalui NATO, untuk menjaga keamanan mereka, tidak bisa diwujudkan. Karena, dengan masih adanya AS, melalui NATO, di Eropa, maka akan terjadi suatu perlombaan kepentingan antara AS, melalui NATO, dengan CFSP yang dibentuk oleh Uni Eropa sebagai wujud kerjasama pertahanan mereka. Sehingga hadirnya CFSP itu sendiri dapat diartikan sebagai langkah persiapan Uni Eropa untuk mengambil alih peran yang telah dilakukan oleh NATO selama ini apabila pada saatnya nanti AS dan NATO meninggalkan Eropa. Dan, langkah yang diambil oleh Uni Eropa dengan membentuk CFSP tersebut memang dapat dikatakan tepat, sebagai upaya untuk mencegah adanya kevakuman ataupun kekosongan antara ketika AS dan NATO pergi dari Eropa dan hadirnya institusi baru, CFSP, yang menggantikan NATO sebagai penjaga keamanan Uni Eropa.

Keputusan yang diambil oleh Uni Eropa untuk tetap mewujudkan dan menginstitutionalisasi kerjasama pertahanan mereka dengan membentuk CFSP padahal AS, melalui NATO, masih hadir sebagai penjaga keamanan Uni Eropa, dapat memberikan pemahaman lain bahwa Uni Eropa menginginkan agar AS, melalui NATO-nya, untuk melepaskan perannya tersebut dan segera meninggalkan Eropa.

Atau dengan kata lain, Uni Eropa ingin segera mengusir AS dan NATO-nya keluar dari Eropa dengan memperlihatkan bahwa Uni Eropa sudah memiliki institusi sendiri yang akan menggantikan peran AS, melalui NATO, dan ingin meyakinkan AS dan NATO-nya bahwa Uni Eropa sudah siap untuk menjaga keamanan kawasan Eropa. Reaksi yang diperlihatkan AS sendiri terhadap sikap Uni Eropa yang ingin melepaskan ketergantungannya kepada AS dalam menjaga keamanannya dapat dilihat dengan jelas ketika AS mempersilahkan Uni Eropa melalui CFSP-nya untuk menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, walaupun dukungan AS kepada Uni Eropa tersebut bukanlah sebagai sebuah indikasi bahwa AS akan keluar dari Eropa.

Hadirnya CFSP sebagai wujud kerjasama pertahanan Uni Eropa disaat AS, melalui NATO, masih memainkan peran dalam menjaga keamanan Uni Eropa dapat merupakan sebagai ambisi dari negara-negara Uni Eropa, khususnya negara-negara kuat anggota Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman. Dengan kata lain, bahwa ada sebagian negara anggota Uni Eropa yang mendorong terbentuknya kerjasama pertahanan Uni Eropa dalam CFSP karena merasa akan bermanfaat bagi kepentingan nasionalnya. Karena bisa saja negara-negara kuat anggota Uni Eropa tersebut sudah memahami dengan jelas bahwa kerjasama pertahanan Uni Eropa melalui CFSP akan menghadapi kendala untuk bisa berfungsi secara optimal selagi AS, melalui NATO, masih memegang peran sentral dalam menjaga keamanan Uni Eropa. Sehingga sikap mereka untuk tetap mendukung terbentuknya CFSP dapat diartikan sebagai adanya faktor kesengajaan yang mengabaikan kenyataan yang ada.

Pendapat yang disampaikan oleh John Gillingham bahwa.

*'How can Europes – unable to hold even civilian Eurocrats accountable – control a future of EU military establishment shielded by secrecy laws and supported by a multinational defence industry exempt from competition and disclosure rules' (2006; 30),*

dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang adanya ketidakpercayaan bahwa Uni Eropa akan mampu mengendalikan suatu kerjasama militer Uni Eropa. Karena dalam kerjasama pertahanan Uni Eropa, yang akhirnya dapat memutuskan untuk membentuk kerjasama pertahanan dalam CFSP pada tahun 1993, merupakan keputusan yang diambil oleh banyak negara, yang berarti banyak pula kepentingan yang terdapat di dalamnya. Sehingga, karena dalam CFSP tersebut terikutkan banyak kepentingan, artinya terdapat kepentingan seluruh negara anggota

Uni Eropa, dan sudah pasti setiap negara akan selalu berusaha untuk memperjuangkan agar kepentingannya selalu tercapai, dan bila dianggap perlu, akan melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dalam rangka untuk mendapatkan dukungan untuk memudahkan dalam mewujudkan kepentingannya.

Pendapat yang disampaikan oleh Michael E. Smith '*Most EU states were far more preoccupied with the broader transatlantic debate concerning the future role of NATO and its enlargement than with applying the CFSP's new capabilities..*' (2004; 201), dapat merupakan suatu indikasi bagaimana negara-negara Uni Eropa memberikan perhatian yang lebih kepada NATO dari pada Uni Eropa. Adanya sikap negara-negara anggota Uni Eropa yang demikian dapat merupakan suatu penjelasan bahwa terbentuknya CFSP tidak dilandasi oleh adanya suatu keinginan dan semangat yang sama dari seluruh negara anggota Uni Eropa. Artinya, ada negara anggota yang memang mendukung terbentuknya kerjasama pertahanan Uni Eropa dalam CFSP karena didorong oleh kepentingan nasionalnya, namun ada juga negara anggota yang tidak mendukung karena merasa tidak memiliki kepentingan terhadap kehadiran CFSP. Negara anggota Uni Eropa seperti Prancis yang memang sangat menginginkan adanya Uni Eropa yang mandiri dalam menjaga keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO, akan menganggap CFSP sebagai instrumen yang dapat mewujudkan ambisinya tersebut

Oleh sebab itu faktor kepentingan nasional setiap negara anggota Uni Eropa masih merupakan hal yang dominan dan lebih diutamakan, yang menyebabkan kepentingan bersama seluruh negara anggota dalam Uni Eropa seakan terabaikan dan dihindari. Dan, kondisi tersebut sangat memegang peran atas kesulitan Uni Eropa dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanan mereka dalam CFSP.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kerjasama pertahanan Uni Eropa dalam CFSP yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota Uni Eropa pada pertemuan Maastricht pada tahun 1993 adalah merupakan penegasan dari suatu keinginan dan kesiapan bahwa Uni Eropa sudah siap untuk melaksanakan peran sebagai penjaga keamanan Uni Eropa, yang selama ini dilaksanakan oleh AS, melalui NATO. Suatu keinginan yang sudah lama ingin diwujudkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa, terutama Prancis. Bila melihat waktu terbentuknya CFSP, yaitu tahun 1993, maka faktor runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991 dapat dikatakan sebagai alasan dibalik ketegasan Uni Eropa untuk segera memanfaatkan keruntuhan Uni Sovyet tersebut untuk mewujudkan kerjasama pertahanan mereka dalam CFSP. Dikatakan faktor Uni Sovyet, karena, pembentukan NATO, sebagai sebuah aliansi militer, pada tanggal 4 April 1949, oleh sebelas negara, yang terdiri dari AS Belgia, Kanada, Prancis, Iceland, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Denmark, Portugal, dan Inggris, adalah merupakan tindakan untuk melindungi negara-negara Eropa Barat (baca Uni Eropa) dari ancaman serangan komunis Uni Sovyet. Sehingga, ketika Uni Sovyet runtuh pada tahun 1991, maka Uni Eropa melihatnya sebagai akhir dari peran AS, melalui NATO, sebagai penjaga keamanan Uni Eropa.

Keinginan dan kesungguhan untuk dapat mengelola keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO, telah diperlihatkan oleh Uni Eropa dengan membentuk CFSP. Karena keberhasilan dalam membentuk CFSP itu sendiri adalah merupakan refleksi dari kesadaran seluruh negara anggota Uni Eropa, bahwa sudah saatnya Uni Eropa untuk mengelola keamanannya sendiri karena ancaman Uni Sovyet sudah tidak ada lagi, yang berarti AS dan NATO tidak dibutuhkan lagi.

Peluang untuk membuktikan bahwa Uni Eropa, melalui kerjasama pertahanan dalam CFSP, telah siap untuk mengambil alih peran sebagai penjaga keamanan Uni Eropa muncul pertama kali pada perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia pada tahun 1995, karena disamping letak Yugoslavia merupakan bagian dari Eropa, AS juga telah mempersilahkan dan membuka jalan bagi Uni Eropa untuk mengatasi

perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tersebut, melalui CFSP-nya. Namun, ternyata Uni Eropa, melalui CFSP-nya, menemui kegagalan untuk mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tersebut, dan berarti gagal untuk membuktikan bahwa Uni Eropa benar-benar telah siap mengelola keamanannya sendiri. Dan, hanya dengan bantuan AS, melalui NATO-lah, baru kemudian masalah perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia dapat diatasi. Padahal, dengan keberadaan Uni Eropa sebagai kumpulan dari negara-negara yang kaya dengan peralatan militer modern, seharusnya akan mampu mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia tersebut. Sehingga, dengan kegagalan tersebut, telah memunculkan keraguan oleh banyak pihak akan kemampuan dan kesungguhan Uni Eropa untuk mandiri dalam mengelola keamanannya sendiri, mengingat perang Bosnia saja tidak mampu diselesaikan, apalagi masalah-masalah keamanan yang lebih besar, seperti ketika ancaman Uni Sovyet masih ada.

Terjadinya kegagalan Uni Eropa dalam mengimplementasikan CFSP seperti yang terjadi pada perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, tidak terlepas dari adanya dua faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu karena masih kuatnya pengaruh AS di Eropa, dan karena adanya perbedaan pandangan antar negara-negara anggota Uni Eropa yang didorong oleh kepentingan nasionalnya masing-masing.

Kuatnya pengaruh AS di Eropa dapat dilihat pada bagaimana Inggris, salah satu dari tiga negara 'the big three' dalam Uni Eropa, memiliki hubungan yang lebih erat dengan AS dari pada dengan Uni Eropa. Posisi Inggris sebagai salah satu negara kuat di Eropa disamping sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memungkinkan Inggris untuk memiliki kekuatan untuk menanamkan pengaruhnya dan mengajak negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk tetap mendukung kehadiran AS, melalui NATO, dalam menjaga keamanan Uni Eropa. Disisi lain, Prancis, yang posisinya juga merupakan salah satu negara kuat di Eropa dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga posisinya dapat dikatakan sama dengan Inggris, sangat menginginkan adanya Uni Eropa yang mampu untuk menjaga keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO.

Perbedaan yang terjadi dalam Uni Eropa tersebut dapat dikatakan merupakan hal yang sudah pasti terjadi, mengingat Uni Eropa itu sendiri bukanlah merupakan sebuah negara kesatuan sehingga memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur kondisi 'dalam negerinya'. Oleh sebab itu, keinginan dan tindakan setiap negara anggota Uni Eropa untuk lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya dari pada kepentingan

bersama mereka dalam CFSP tidak dapat dicegah oleh Uni Eropa. Perbedaan internal negara-negara anggota Uni Eropa, akan terus menjadi masalah selama keberadaan Uni Eropa tetap bukan sebagai sebuah negara kesatuan, dan berarti Uni Eropa akan terus menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan CFSP-nya. Kondisi tersebut di perburuk oleh kenyataan bahwa AS, melalui NATO, belum memberikan tanda-tanda akan segera keluar dari Eropa, karena kenyataannya, AS, melalui NATO, telah dan sedang melakukan ekspansi ke Eropa Timur dan Tengah. Dan hal ini berarti posisi AS di Eropa semakin kuat

Sehingga kenyataan akan adanya pengaruh AS di Eropa yang sangat kuat dan adanya perbedaan pandangan yang terjadi dalam tubuh Uni Eropa dapat dikatakan sebagai faktor penentu yang berpengaruh kuat terhadap kegagalan Uni Eropa dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanan mereka dalam CFSP, yang diantaranya, terlihat jelas dalam kegagalan Uni Eropa, melalui CFSP, dalam mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Terkait dengan Kerjasama Pertahanan Uni Eropa**

Dengan melihat bahwa Uni Eropa masih menemui kesulitan dalam mengimplementasikan CFSP, khususnya pada contoh kasus perang Yugoslavia, untuk itu direkomendasikan untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang berbagai masalah yang terkait dengan kerjasama pertahanan Uni Eropa. **(1)** Kegagalan Uni Eropa melalui CFSP, dalam mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia pada tahun 1995, dapat menimbulkan kesan bahwa pembentukan CFSP pada tahun 1993 adalah merupakan tindakan yang tergesa-gesa dan muncul secara spontan, tanpa adanya perhitungan yang cermat dari Uni Eropa. Oleh karena sejauh ini peneliti belum menemukan adanya bukti yang menjelaskan kenapa CFSP dibentuk pada tahun 1993, dua hanya dua tahun setelah keruntuhan Uni Sovyet, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang alasan mengapa pembentukan CFSP harus dilakukan pada tahun 1993. **(2)** Dengan adanya kenyataan bahwa Uni Eropa adalah bukan merupakan negara kesatuan, tetapi merupakan kumpulan dari banyak negara yang memiliki kepentingan nasional masing-masing, maka dalam Uni Eropa terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan bersama yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota Uni Eropa dan kepentingan nasional masing-masing negara anggota. Mengingat bahwa kedua kepentingan tersebut berpengaruh terhadap implementasi

CFSP, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan sejauhmana kedua kepentingan tersebut dapat mempengaruhi implementasi CFSP. (3) Penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan sejauhmana Uni Eropa mengetahui bahwa dalam mengimplementasikan CFSP akan menemui kegagalan, mengingat negara-negara anggota Uni Eropa seperti antara lain Inggris dan Prancis sudah menyadari sepenuhnya bahwa rivalitas diantara kedua negara besar anggota Uni Eropa tersebut akan sangat sulit untuk diselesaikan. (4) Dua negara besar anggota Uni Eropa, Prancis dan Inggris, selalu bersaing satu sama lain dan berusaha untuk menanamkan pengaruhnya dalam Uni Eropa, dan hal tersebut sudah pasti memberikan pengaruh terhadap implementasi CFSP. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait sejauhmana persaingan Prancis dan Inggris dapat mempengaruhi implementasi CFSP.

(5) Tidak dapat disangkal bahwa Inggris dan AS memiliki hubungan yang sangat dekat, atau special relation, sehingga, sangat wajar apabila Inggris selalu berusaha untuk mendukung kehadiran AS, melalui NATO, sebagai penjaga keamanan Uni Eropa. Sikap Inggris tersebut ternyata menimbulkan masalah bagi internal Uni Eropa, terutama terhadap negara-negara yang menghendaki Uni Eropa untuk mengelola keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO. Dengan alasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait apa yang mendasari dan keuntungan apa yang diperoleh Inggris bila AS, melalui NATO, yang menjaga keamanan Uni Eropa. (6) Masih terkait dengan persaingan antara Inggris dengan Prancis dalam Uni Eropa, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan alasan dibalik ambisi Prancis yang terus memperjuangkan Uni Eropa untuk menjaga keamanannya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada AS, melalui NATO.

(7) Keberadaan Inggris dan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan peran tersebut sudah pasti telah memberikan keuntungan bagi kedua negara tersebut. Penelitian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah apakah Inggris dan Prancis bersedia mengorbankan perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB bila Uni Eropa harus menjadi satu suara dalam dalam masalah-masalah hubungan internasional. Suatu hal yang sangat sulit bagi kedua negara tersebut untuk mengedepankan kepentingan Uni Eropa, mengingat Uni Eropa, melalui CFSP, belum memiliki peran dalam politik internasional sebesar yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB. (8) Bila melihat hubungan Inggris dengan AS yang sangat dekat

dan sudah berlangsung lama, maka masalah lain yang memerlukan penelitian adalah apakah Inggris bersedia mengorbankan hubungan baiknya dengan AS demi mewujudkan kepentingan bersama Uni Eropa, melalui CFSP, untuk mengelola keamanannya sendiri. Karena bila Uni Eropa mengambil alih peran sebagai penjaga keamanan dari AS, maka hal itu berarti AS dan NATO harus meninggalkan Uni Eropa. Pada kondisi tersebut, hubungan AS dengan Inggris sudah pasti menjadi buruk, karena sudah jelas Inggris telah mengutamakan kepentingan Uni Eropa dari pada kepentingan AS.

(9) Bila melihat alasan dibentuknya NATO, yaitu untuk menghadapi ancaman dari Uni Sovyet terhadap keamanan Uni Eropa (baca Eropa Barat), maka setelah Uni Sovyet runtuh pada tahun 1991, maka berarti tugas NATO selesai, dan berarti AS dan NATO harus meninggalkan Uni Eropa. Namun kenyataannya, AS, melalui NATO, masih tetap mempertahankan kehadirannya di Eropa, bahkan memperkuat posisinya dengan melakukan ekspansi ke Eropa Timur dan Eropa Tengah. Dengan alasan tersebut, perlu untuk dilakukan penelitian selanjutnya terkait apa alasan sesungguhnya dibalik pembentukan NATO pada tahun 1949. (10) Dan terkait dengan ekspansi AS, melalui NATO, ke Eropa Timur dan Eropa Tengah, penting untuk dilakukan penelitian selanjutnya terkait apa alasan dibalik tindakan ekspansi tersebut. (11) Dan penelitian yang juga perlu dilakukan, terkait kebijakan ekspansi tersebut adalah mengapa AS memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempertahankan kehadiran di Eropa.

(12) Penelitian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah terkait dengan adanya hubungan yang dekat Inggris dengan AS, sementara disisi lain Inggris juga mendukung terbentuknya CFSP, sebagai institusi kerjasama pertahanan Uni Eropa. Sehingga akan muncul pertanyaan sekaligus sebagai bahan penelitian adalah apa alasan Inggris mendukung pembentukan CFSP. (13) Bila melihat dukungan AS terhadap Uni Eropa untuk menyelesaikan perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia, sementara disisi lain, adanya ambisi Uni Eropa, melalui CFSP-nya, untuk mengambil alih dari AS, melalui NATO, dalam mengelola keamanan Uni Eropa, maka hal lain yang memerlukan penelitian adalah apakah dukungan AS kepada Uni Eropa, melalui CFSP-nya, untuk mengatasi perang Yugoslavia, khususnya perang Bosnia adalah merupakan strategi AS untuk membuktikan bahwa Uni Eropa belum siap untuk menjaga keamanannya sendiri dan masih memerlukan AS, melalui NATO). (14) Terkait dengan runtuhnya Uni Sovyet, yang berarti ancaman terhadap

keamanan Uni Eropa (baca Eropa Barat) sudah tidak ada lagi, akan menimbulkan suatu pertanyaan sekaligus sebagai bahan penelitian adalah bagaimana Uni Eropa mendefinisikan sebuah ancaman keamanan pasca runtuhnya Uni Sovyet. **(15)** Dan selanjutnya, bila melihat sejarah perang dunia I dan perang dunia II, dimana Jerman muncul sebagai negara pencetus perang, akan muncul bahan penelitian, yaitu apakah Jerman dapat menjadi ancaman bagi Uni Eropa seperti pada perang dunia I dan perang dunia II. **(16)** Demikian juga perlu dilakukan penelitian tentang apakah Rusia dapat menjadi ancaman keamanan Uni Eropa dimasa mendatang.

Pentingnya untuk melakukan penelitian terhadap berbagai masalah yang telah diungkapkan diatas dalam untuk melengkapi jawaban-jawaban atas pertanyaan apakah Uni Eropa akan mampu mengelola keamanannya sendiri dan mengusir AS dan NATO dari Uni Eropa.

### **5.2.2 Terkait dengan penulisan Thesis**

Dalam rangka untuk mendapatkan keseragaman dan kelancaran dalam penulisan thesis, maka direkomendasikan; **(1)** Mendesak untuk diadakan terminology atau pengertian yang jelas bagi istilah-istilah ataupun singkatan-singkatan yang berkaitan dengan militer yang sudah ada dan berlaku secara umum di banyak negara, namun masih ditulis dalam bahasa Inggris. Hal tersebut sangat penting dalam rangka untuk mencegah terjadinya ketidakseragaman dalam penulisan maupun pemahaman, seperti contoh, antara lain; North Atlantic Treaty Organization (NATO), Common Foreign and Security Policy (CFSP), Military Power, Defense Community, Security dan Community. **(2)** Perlunya dibuat suatu system atau metode penulisan thesis di lingkungan Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) dalam rangka untuk memperlancar penulisan Thesis.

### **5.2.3 Terkait dengan Asean**

Dalam rangka meningkatkan posisi tawar Asean, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan bagaimana membangun Asean yang lebih solid dan memiliki sikap saling percaya yang tinggi. Asean dapat merujuk kepada pengalaman bagaimana faktor kuatnya pengaruh Amerika Serikat terhadap Uni Eropa dan faktor lebih kuatnya kepentingan individu negara anggota dari pada kepentingan bersama dalam Uni Eropa telah menyebabkan Uni Eropa mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kerjasama pertahanan mereka dalam CFSP.

Bagi Indonesia sendiri, perlu adanya penelitian terkait dengan bagaimana membangun Indonesia agar dapat memiliki peran menonjol dalam Asean dengan merujuk kepada pengalaman Inggris yang mampu meraih posisi penting sebagai salah satu dari the big three selain Prancis dan Jerman dalam Uni Eropa maupun sebagai negara yang memiliki special relation dengan Amerika Serikat, yang menyebabkan Inggris mampu menjadi penentu dan memberikan warna pada setiap kebijakan dalam Uni Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar buku

A. Almond, Gabriel, J. Dalton, Russel, Powell, Jr, G. Bingham & Strom, Kaare. (2006) 'European Politics Today' Third Edition, London: Pearson Longman.

Alexandrou, Alex, Bartle, Richard & Holmes, Richard. (2002) 'New People Strategies for the British Armed Forces' London: Frank Cass Publishers.

Alterman, Eric. (2004) 'When the Presidents Lie: A History of Official Deception and Its Consequences' New York: The Penguin Group.

Barany, Zoltan. (2003) 'The Future of NATO Expansion: Four Case Studies' Cambridge: Cambridge University Press.

Bartolini, Stefano. (2005) 'Restructuring Europe: Center Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union' Oxford: Oxford University Press.

Bergsten, C. Fred. (2005) 'The United States and the World Economy: Foreign Economic Policy for the Next Decade' Washington: Institute For International Economics.

Blair, Alasdair. (2006) 'Companion to the European Union' Abingdon: Routledge.

Booker, Christopher & North, Richard. (2003) 'The Great Deception: The Secret History of the European Union' London: Continuum.

British Ministry of Defense (2001) 'British Defense Doctrine' Shrivenham: The Joint Doctrine & Concepts Centre.

Butler, David & Westlake, Martin. (2005) 'British Politics and European Elections 2004' Basingstoke: Palgrave Macmillan.

C. Salmon, Trevor & J. K. Shepherd, Alistair. (2003) 'Toward a European Army: A Military Power in the Making' Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.

Cooper, Robert. (2003) 'The Breaking of Nations' London: Atlantic Books.

Cradock, Percy. (2002) 'Know Your Enemy' London: John Murray Ltd

Destler, I. M. (2005) 'American Trade Politics', Fourth Edition, Washington: Institute For International Economics.

Dinan, Desmon. (2005) 'Ever Closer Union: An Introduction to European Integration' *The European Series*, Third Edition, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

E. Smith, Michael. (2004) 'Europe's Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation' Cambridge: Cambridge University Press.

Eilstrup-Sangiovanni, Mette. (2006) 'Debates on European Integration: A Reader' New York: Palgrave Macmillan.

Gatignon, Hubert, R. Kimberly, John & Gunther, Robert. (2004) 'Alliance on Globalizing: Strategies for Building Successful Global Businesses' Cambridge: Cambridge University Press.

Gillingham, John. (2006) 'Design for a New Europe' Cambridge: Cambridge University Press.

Hardt, Michael & Negri, Antonio. (2004) 'Join Many. Join the Empowered. Join the Multitude' London: The Penguin Group.

Hartley, Emma. (2006) 'Facts You Need to Know: Europe' Thriplow: Icon Books Ltd.

Huysmans, Jef. (2006) 'The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU' Abingdon: Routledge.

J. Bolt, Paul, V. Coletta, Damon & G. Shackelford. JR, Collins. (2005) 'American Defense Policy' Eight Edition, Baltimore: The John Hopkins University Press.

J. Lieber, Robert. (2005) 'The American Era: Power and Strategy for the 21<sup>st</sup> Century' Cambridge: Cambridge University Press.

Kotzias, Nikos & Liacouras, Petros. (2006) 'EU – US Relations: Repairing the Transatlantic Rift' New York: Palgrave Macmillan.

Leonard, Dick. (2005) 'Guide to the European Union: The Definitive Guide to all Aspects of the EU' London: Profile Books Ltd.

M. Andrews, David. (2005) 'The Atlantic Alliance Under Stress: US-European Relations After Iraq' Cambridge: Cambridge University Press.

M. Fishman, Robert & M. Messina, Anthony. (2006) 'The Year of the Euro' Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame.

M. Gerstein, Daniel. (2005) 'Securing America's Future: National Strategy in the Information Age' Westport: Praeger Security International.

M. Heywood, Paul, John, Erik, Rhodes, Martin & Sedelmeier, Ulrich. (2006) 'Developments in European Politics' New York: Palgrave Macmillan.

MacDonald, John & Sir Bowden, Andrew. (2005) 'Dare We Trust Them: A New Vision for Europe' High Street, Lewes: The Book Guild Ltd.

Meunier, Sophie. (2005) 'Trading Voices: The European Union in International Commercial Negotiations' New Jersey: Princeton University Press.

Minford, Patrick, Mahambare, Vidya & Nowell, Eric. (2005) 'Should Britain Leave the EU: An Economic Analysis of a Troubled Relationship' Cheltenham: Edward Elger Publishing Limited.

Morgan, Glyn. (2005) 'The Idea of a European Superstate' New Jersey: Princeton University Press.

Nugent, Neill. (2003) 'The Government and Politics of the European Union' *The European Union Series*, New York: Palgrave Macmillan.

O. Chittick, William. (2006) 'American Foreign Policy: A Framework for Analysis' Washington: CQ Press

O. Goldman, Emily. (2004) 'National Security in the Information Age' London: Frank Cass Publishers.

P. M. Barnett, Thomas. (2004) 'The Pentagon's New Map' New York: G. P. Putnam's Sons.

Primakov, Yevgeny. (2004) 'Russian Crossroads: Toward the New Millennium' Yale University Press.

R. D. Underhill, Geoffrey & Zhang, Xiaoke. (2003) 'International Financial Governance under Stress: Global Structures Versus National Imperatives' Cambridge: Cambridge University Press.

Rifkin, Jeremy. (2004) 'The European Dream: How Europe's Vision of the Future is Quietly Aclipsing the American Dream' Cambridge: Polity Press.

Sampson, Anthony. (2004) 'Who Runs This Place ?: The Anatomy of Britain in the 21<sup>st</sup> Century' London: John Murray (Publishers)

Sawyer, Malcolm. (2005) 'The UK Economy', 16<sup>th</sup> Edition, Oxford: Oxford University Press.

Seldon, Anthony & Kavanagh, Dennis. (2005) 'The Balir Effect: 2001-2005' Cambridge: Cambridge University Press.

Sweeny, Simon. (2005) 'Europe, the State and Globalisation' Edinburgh: Pearson Education Limited.

Tenet, George & Harlow, Bill. (2008) 'At the Center of the Storm: The CIA During America's Time of Crisis' New York: Harper Perennial.

Verhofstadt, Guy. (2006) 'The United State of Europe' London: Federal Trust.

W. Young, John & Kent, John. (2004) 'International Relations Since 1945: A Global History' Oxford: Oxford University Press.

Wiener, Antje & Diez, Thomas. (2004) 'European Integration Theory' Oxford: Oxford University Press.

Woodward, Bob. (2004) 'Plan of Attack' London: Simon & Schuster.

Wulf, Herbert. (2005) 'Internationalizing and Privatizing War and Peace' New York: Palgrave MacMillan.

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. DAFTAR PUSTAKA... .....Lampiran A

**European States: membership of international organization (Paul M. Heywood,  
Erik Jones, Martin Rhodes dan Ulrich Sedelmeier; 2006; 37)**

	EU	NATO	WEU
Albania			
Andorra			
Austria	x		x
Belarus			
Belgium	x	x	x
Bosnia and Herzegovina			
Bulgaria		x	x
Croatia			
Cyprus	x		
Czech Republic	x	x	x
Denmark	x	x	x
Estonia	x	x	x
Finland	x		x
France	x	x	x
Germany	x	x	x
Greece	x	x	x
Holy See			
Hungary	x	x	x
Iceland		x	x
Ireland	x		x
Italy	x	x	x
Latvia	x	x	x
Liechtensten			
Lithuania	x	x	x
Luxembourg	x	x	x
Macedonia			
Malta	x		
Moldova			
Monaco			
Netherlands	x	x	x

Norway		x	x
Poland	x	x	x
Portugal	x	x	x
Romania		x	x
Russia			
San Marino			
Serbia and Montenegro			
Slovakia	x	x	x
Slovenia	x	x	x
Spain	x	x	x
Sweden	x		x
Switzerland			
Turkey		x	x
Ukraine			
United Kingdom	x	x	x

# PETA EROPA

